

**Faktor Politik yang Mempengaruhi Bantuan Kemanusiaan Amerika Serikat
Kepada Nepal Paska Gempa Pada Tahun 2015**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Peryaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hubungan
Internasional Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Peminatan

Global Political Economy

Oleh:

Christopher Claudi Wijaya

135120407111021



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2018**

Faktor Politik yang Mempengaruhi Bantuan Kemanusiaan Amerika

Serikat Kepada Nepal Paska Gempa Pada Tahun 2015

SKRIPSI

Disusun oleh :

CHRISTOPHER CLAUDI WIJAYA

NIM. 135120407111021

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus dalam Ujian Sarjana pada Tanggal 22 Januari 2018

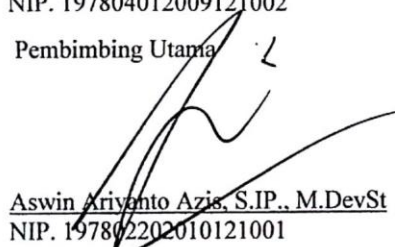
Tim Penguji

Ketua Majelis Penguji



Joko Purnomo, S.IP., MA
NIP. 197804012009121002

Pembimbing Utama



Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt
NIP. 197802202010121001

Sekretaris Majelis Penguji



Lia Nihla N, S.IP., M. Si
NIK. 2009068305212001

Pembimbing Pendamping



Muhaimin Zulhair A, S.IP., MA
NIK. 2016078509081001

Malang, 22 Januari 2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Brawijaya



Prof. Dr. Unti Hudigdo, SE, M.Si., Ak.
NIP. 196908141994021001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Christopher Claudi Wijaya dengan NIM 135120407111021 dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul **“Faktor Politik yang Mempengaruhi Bantuan Kemanusiaan Amerika Serikat Kepada Nepal Paska Gempa Pada Tahun 2015”** merupakan karya tulis saya sendiri. Semua kalimat dan tulisan yang bukan merupakan buah pikiran saya, telah disertai dengan catatan kaki dan dicantumkan sebagai daftar pustaka. Apabila ditemukan pada kemudian hari bahwa pernyataan saya tidak sesuai dengan apa yang tertulis, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh melalui skripsi ini.

Malang, 2018
Penulis pernyataan

Christopher Claudi Wijaya
NIM. 135120407111021

Faktor Politik yang Mempengaruhi Bantuan Kemanusiaan Amerika Serikat Kepada Nepal Paska Gempa Pada Tahun 2015

Christopher Claudi Wijaya (135120407111021)

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Brawijaya

ABSTRAKSI

Penelitian ini membahas mengenai faktor politik yang mendasari Amerika Serikat memberikan bantuan kemanusiaan kepada Nepal paska terjadinya gempa bumi pada tahun 2015. Paska terjadinya gempa bumi pada tahun 2015 Nepal mengalami kerusakan yang sangat parah dimana mengalami kerugian hingga 10 milyar USD sedangkan GDP dari Nepal hanya 20 milyar USD. Amerika Serikat dengan sigap memberikan bantuan kemanusiaan melalui USAID. Bantuan kemanusiaan Amerika Serikat dibagi dalam berbagai sektor baik dana bantuan, *emergency shelter*, bantuan pangan, sanitasi, air bersih dan sebagainya. Prinsip bantuan kemanusiaan menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan bersifat murni dan tidak dipengaruhi kepentingan militer, ekonomi, maupun politik. Namun, beberapa studi yang dilakukan para ahli menemukan pada kasus-kasus pemberian bantuan kemanusiaan sering kali terdapat kepentingan-kepentingan dari negara donor. Kondisi geografis Nepal berada diantara 2 negara dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di Asia yaitu Tiongkok dan India. Selain itu Tiongkok pada beberapa dekade terakhir menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat di dunia dan mengancam posisi Amerika Serikat sebagai negara dengan kekuatan ekonomi nomor 1 di dunia. Penelitian ini mencari faktor politik paling dominan yang menjadi dasar Amerika Serikat memberikan bantuan kemanusiaannya ke Nepal dengan menggunakan konsep *The Politic of Humanitarian Aid*. Terdapat 2 variabel yaitu *Political factors* dan *Non political Factor* dengan indikator-indikatornya yang akan menjadi alat untuk meneliti faktor politik dalam pemberian bantuan Amerika Serikat ke pada Nepal.

Kata Kunci: Bantuan kemanusiaan, faktor politik, Amerika Serikat, Nepal, bencana, The Politic of humanitarian aid

Political Factors Affecting the Humanitarian Assistance of the United States to Nepal

After the Earthquake in 2015

Christopher Claudi Wijaya (135120407111021)

International Relations Programme of Social and Political Science Faculty

University of Brawijaya

ABSTRACT

This study discusses the underlying political factors of the United States providing humanitarian assistance to Nepal following the earthquake in 2015. After the earthquake in 2015, Nepal suffered severe damage which suffered losses of up to 10 billion USD while the GDP of Nepal was only 20 billion USD. The United States is quick to provide humanitarian assistance through USAID. The United States humanitarian aid is divided into various sectors including aid funds, emergency shelter, food aid, sanitation, clean water and so on. The principle of humanitarian assistance states that humanitarian aid is pure and independent not influenced by military, economic, or political interests. However, several studies conducted by experts found that in cases of humanitarian relief there is often the interest of the donor country. Nepal's geographic condition lies between two countries with strong economic growth in Asia, China and India. In addition China in the last few decades became a country with a very strong economic growth in the world and threaten the position of the United States as a country with the number 1 economic power in the world. This study looks for the most dominant political factors that form the basis of the United States to provide humanitarian assistance to Nepal by using the concept of The Politic of Humanitarian Aid. There are two variables: Political factors and Non-Political Factor with the indicators that will be a tool to examine the political factors in providing US aid to Nepal.

Keywords: Humanitarian aid, political factor, United States, Nepal, disaster, The Politic of humanitarian aid

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus, karena atas kasih dan hikmatNya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Faktor Politik yang Mempengaruhi Bantuan Kemanusiaan Amerika Serikat Kepada Nepal Paska Gempa Pada Tahun 2015”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor politik yang mempengaruhi bantuan kemanusiaan Amerika Serikat kepada Nepal paska gempa tahun 2015.

Sehubungan dengan penyelesaian penelitian ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan memotivasi penulis, antara lain:

1. Tuhan Yesus atas kehadiran, berkat, serta hikmat yang telah diberikan kepada penulis setiap waktu.
2. Orang tua penulis, Bapak Sandianto Yodo Wijaya dan Ibu Laurentia Agatha Sianny Purwanti, saudara penulis Axel Wijaya dan Ezra Wijaya, serta nenek penulis Ibu Lilik Wananni atas segala kasih sayang, pengorbanan, dukungan, dan motivasi yang selalu diberikan pada penulis.
3. Putri Pebriana Hasibuan, S.P. kesayangan penulis, atas setiap perhatian, dukungan, kasih sayang, dan motivasi selama penulis mengerjakan penelitian ini.
4. Bapak Aswin Aryanto Azis, S.IP., M.DevSt serta bapak Muhaimin Zulhair A, S.IP., MA selaku dosen pembimbing penulis yang selalu sabar menerima penulis untuk melakukan bimbingan, mulai dari pembuatan proposal penelitian hingga menyelesaikan seluruh bagian penelitian.

5. Seluruh keluarga “Royal Family” Christian TS, Andrew, Andy, Ola, dan Laurencia yang selalu ada untuk mengisi waktu-waktu kosong penulis dengan tawa dan rasan-rasan.
6. Trimas kentir Robby, Alle dan Arif yang selalu menjadi inspirasi penulis untuk tidak malas mengerjakan penelitian ini, sekaligus menjadi teman-teman seperjuangan dalam perjalanan dari kecebong menjadi manusia yang sesungguhnya.
7. Seluruh pihak yang telah membantu baik secara nyata maupun moril yang penulis belum tulis namanya diatas, atau bahkan tidak disadari oleh penulis. Terima kasih.

Penulis juga berharap agar hasil penelitian yang penulis buat ini mampu bermanfaat untuk mahasiswa Hubungan Internasional yang hendak mengerjakan penelitian dan dapat memberi pandangan serta rekomendasi. Segala saran dan masukan dari semua pihak selalu penulis harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaannya.

Malang, januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Akademis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	11
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN.....	12
2.1 Studi Terdahulu.....	12
2.1.1 The Pseudo-Democrat's Dilemma.....	12
2.1.2 Africa Command: U.S. Strategic Interest and The Role of The U.S. Military in Africa.....	14
2.2 Kerangka Konseptual.....	16
2.2.1 Humanitarian Aid.....	16
2.2.2 <i>The Politics of Humanitarian Aid</i>	19
2.2.2.1 <i>Political Connection</i>	23
2.2.2.1.1 Donors Foreign Policy Concern or Reservation About The Potential Recipient State.....	23
2.2.2.1.2 <i>Donor Domestic Political Concerns</i>	24
2.2.2.1.3 <i>Domestic Politics Within The Potential Recipient State</i>	25
2.2.2.2 <i>Non Political Factors</i>	25
2.3 Operasionalisasi Konsep.....	26
2.3.1 <i>Political Connections</i>	26
2.3.1.1 <i>Donors Foreign Policy Concerns or Revelations About The Potential Recipient State</i>	26
2.3.1.2 <i>Donor Domestic Political Concerns</i>	28
2.3.1.3 <i>Domestic Politics Within The Potential Recipient State</i>	31
2.3.2 <i>Nonpolitical Factors</i>	33
2.3.2.1 <i>Type of Disasters</i>	33
2.5 Argumen Utama.....	38

BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	39
3.3 Teknik Penelitian	39
3.4 Jenis Data	39
3.5 Teknik Analisa Data	40
3.6 Sistematisasi Penulisan	40
BAB IV BANTUAN KEMANUSIAAN AMERIKA SERIKAT PASKA GEMPA DI NEPAL TAHUN 2015.....	42
4.1 Sejarah Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat ke Nepal	42
4.2 Karakteristik Bantuan Kemanusiaan Amerika Serikat	44
4.3 Kondisi Paska Bencana Banjir di Nepal	49
4.5 Program bantuan Kemanusiaan <i>Built Back Better</i> Amerika Serikat ke Nepal.....	50
BAB V ANALISIS FAKTOR POLITIK YANG MEMPENGARUHI BANTUAN KEMANUSIAAN AMERIKA SERIKAT KEPADA NEPAL PASKA GEMPA TAHUN 2015	56
5.1 <i>Political Connections</i>	56
5.1.1 <i>Donor Foreign Policy Concerns or Reservations about The Potential Recipient State</i>	57
5.1.1.1 <i>Alliance with the recipient state</i>	57
5.1.1.2 <i>Recipient's Regime Type</i>	63
5.1.1.3 <i>Recipient's Level of Development</i>	69
5.1.2 <i>Donors Domestic Political Concerns</i>	72
5.1.2.1 <i>Donors Current Budget Deficits</i>	73
5.1.2.2 <i>The Salience of the Disaster</i>	74
5.1.2.3 <i>Current Donor Disasters (Severity of Donor Disasters)</i>	78
5.2 <i>Nonpolitical Factor</i>	81
5.2.1 <i>Type of Disaster</i>	81
5.2.1.1 <i>Control For The Type of Disaster</i>	81
5.3 Faktor Dominan Bantuan Kemanusiaan Amerika Serikat Kepada Nepal Paska Gempa Tahun 2015.....	83
BAB VI PENUTUP	86
6.1 Kesimpulan	86
6.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah bantuan Nepal secara keseluruhan 2015.....	8
Gambar 1.2 Jumlah bantuan kemanusiaan Nepal.....	8
Gambar 4.1 Bantuan luar negeri AS ke Nepal Tahun 2001-2016.....	43
Gambar 4.2 Total bantuan kemanusiaan menurut donor.....	54
Gambar 4.3 Alokasi dana bantuan kemanusiaan AS.....	55
Gambar 5.1 Angka ekspor India ke Nepal 2012-2016.....	59
Gambar 5.2 Angka impor India dari Nepal 2008-2016.....	60
Gambar 5.3 Negara GDP terbesar di dunia.....	60
Gambar 5.4 Angka inflasi Nepal tahun 2015.....	70
Gambar 5.5 Persentase defisit anggaran AS 2007-2017.....	74
Gambar 5.6 Newsletter USAID-Nepal.....	76
Gambar 5.7 Peningkatan Jumlah Turis di Nepal.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Operasionalisasi Konsep The Politics of Humanitarian Aid.....	35
Tabel 5.1 Nilai ekspor Impor Nepal ke AS (NPR).....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk hubungan internasional satu negara dengan negara lain adalah dengan pemberian bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri sendiri didefinisikan berbeda-beda menurut para ahli. *Organization for Economics Cooperation and Development* sendiri mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai pinjaman dan hibah yang bersumber dari sektor publik yang hanya diberikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan minimal 25% dari jumlah bantuan tersebut adalah hibah.¹

Dalam memberikan bantuan luar negeri, negara-negara donor memiliki berbagai macam motif. Salah satu contoh motif bantuan luar negeri yang menjadi dasar pemberian bantuan oleh negara donor ke negara resipien adalah motif kemanusiaan. Motif kemanusiaan sendiri menjadi motif yang paling ditekankan dalam pedoman resmi untuk pemberian bantuan. Motif kemanusiaan ini memiliki tujuan yang sangat baik dalam hal menyelamatkan nyawa dan mengurangi angka penderitaan manusia.²

Amerika Serikat (AS) merupakan satu dari banyak negara yang merupakan negara donor besar yang sudah lama menjadi negara donor. Melalui

¹ Therien, Jean-Philippe. *Debating Foreign Aid: Right Versus Left*. London: Taylor & Francis, Ltd., 2002. Hlm. 450-451.

² Stromberg, David. *Natural Disasters, Economic Development, and Humanitarian Aid*. Nashville: American Economic Association, 2007. Hlm. 213.

United States Agency of International Development (USAID), AS bekerja dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pertahanan, menciptakan kondisi demokratis sambil meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Tujuan-tujuan ini dikerjakan dengan nilai *Passion for Mission, Excellence, Integrity, Respect, Empowerment, Inclusion, dan Commitment to Learning*.³ USAID menjadi instrumen AS untuk pemberian bantuan ke berbagai negara, dengan dana yang bersumber dari banyak pihak seperti pemerintah, pajak warga, maupun aktor-aktor swasta yang ingin menyumbangkan dana bantuan.⁴

Bantuan luar negeri yang diberikan AS sudah dimulai sejak lama ke berbagai negara. Program bantuan AS dibentuk sejak berakhirnya perang dunia II dimana saat itu negara-negara di Eropa banyak yang hancur karena dampak perang. Bantuan ini berupa pembangunan infrastruktur, memperkuat ekonomi, dan stabilisasi regional. Setelah bantuan tersebut berhasil pada tahun 1961 Presiden Kennedy menandatangani *Foreign Assistance Act* dalam hukum dan menciptakan *United States Agency for International Development* (USAID)⁵

AS melalui USAID memiliki banyak program bantuan luar negeri seperti *Agriculture and Food Securities, Democratic Human Right and Governance, Economic Growth and Trade, Education*, dan lain sebagainya yang berjumlah 11 sektor dengan banyak sub-sektor yang ada.⁶ Salah satu sektor bantuan USAID tersebut adalah *Working in Crises and Conflict* yang merupakan

³ "Mission, Vision, and Values". USAID.GOV. diakses 3 Juli 2017. <https://www.usaid.gov/who-we-are/mission-vision-values>.

⁴ "Budget". USAID.GOV. diakses 3 Juli 2017. <https://www.usaid.gov/results-and-data/budget-spending>

⁵ "What is US Government Assistance?". foreignassistance.gov. diakses 6 Juli 2017. <http://foreignassistance.gov/>.

⁶ "What We Do". USAID.GOV. diakses 6 Juli 2017. <https://www.usaid.gov/what-we-do>.

sektor yang mengurus krisis dan konflik yang dalam sub-sektornya terdapat bantuan bencana yang terjadi di seluruh negara khususnya negara berkembang.⁷ Salah satu program bantuan kemanusiaan yang AS kerjakan adalah saat terjadi gempa bumi di Nepal. Pada tanggal 25 April 2015, terjadi gempa di antara Khatmandu dan Pokhara yang terasa hingga Gorkha, Nepal. AS merespon permintaan bantuan internasional yang diminta Nepal. Ribuan rakyat Nepal kehilangan tempat tinggal, makanan dan air bersih, dan AS bertindak dengan mengirimkan *Disaster Assistance Response Team* (DART). AS langsung memberikan 10 juta Dollar untuk penyelamatan jiwa, dengan memberikan tempat penampungan, air minum, sanitasi, bantuan kesehatan, dan kepentingan-kepentingan lain.⁸

Sejarah hubungan bilateral AS dengan Nepal merupakan perjalanan politik yang cukup panjang. Hubungan AS dengan Nepal secara formal terbentuk pada tahun 1948 dan bersifat persahabatan. Kebijakan AS ke Nepal bertujuan untuk meningkatkan perdamaian, kemakmuran dan menciptakan masyarakat yang demokratis. Kerjasama AS dan Nepal ini juga untuk meningkatkan pemerintahan yang efektif, stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi. AS berusaha mengurangi ketergantungan Nepal terhadap bantuan kemanusiaan, dan meningkatkan kontribusinya dalam keamanan regional.⁹ Selain itu AS dan Nepal memiliki kesepakatan dalam hubungan ekonomi dimana saling menandatangani

⁷ Ibid.

⁸ “*USAID Arrives in Nepal, Earthquake Response Effort Begin*”. USIAD.GOV. 29 April 2015. Diakses 11 Juli 2017. <https://blog.usaid.gov/2015/04/usaaid-arrives-in-nepal-earthquake-response-efforts-begin/>

⁹ “U.S. Relation with Nepal”. state.gov. diakses 6 Juli 2017. <https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5283.htm>.

kesepakatan perdagangan dan mengadakan forum bilateral untuk memperkuat perdagangan antar kedua negara.

Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 25 April 2015 merupakan gempa bumi terburuk selama 80 tahun terakhir yang terjadi di Nepal. Dimana gempa ini sangat besar sehingga terasa hingga Pakistan, Banglades, India dan hingga sekitar pegunungan Everest.¹⁰ Sehari setelah terjadinya gempa yang berkekuatan 7,8 skala rikter, rakyat Nepal yang selamat masih dikejutkan dengan gempa susulan yang berkekuatan 6,7 skala rikter yang juga terasa hingga India utara dan Banglades.¹¹ Selama dua minggu sejak terjadinya gempa pertama tercatat 8,891 orang tewas, dan lebih dari 22,300 orang terluka. Gempa ini juga merusak lebih dari 893,000 bangunan baik rumah, sekolah, rumah sakit, kuil, dan tempat-tempat peninggalan sejarah. Gempa ini mempengaruhi kehidupan 8,1 juta orang dan segala makhluk hidup baik hewan dan tumbuhan yang tinggal di perkotaan maupun di sekitaran pegunungan Nepal.¹²

Bencana ini menimbulkan banyak kerugian di berbagai aspek kehidupan di Nepal baik secara ekonomi, politik, dan kemanusiaan. Hebatnya bencana alam ini mengakibatkan kerusakan yang sangat parah dan diperkirakan pemerintah Nepal akan memerlukan waktu beberapa tahun dan dana lebih dari 10 Milyar USD, hal ini cukup berat karena Nepal memiliki GDP hanya sebesar 20 Milyar USD.¹³ Sektor pariwisata Nepal yang merupakan sektor pendapatan

¹⁰ "Nepal Earthquake: Rescue Effort Intensifies". BBC News. 26 April 2015. Diakses 27 April 2017. <http://www.bbc.com/news/world-asia-32470731>.

¹¹ "Gempa Susulan 6,7 Skala Richter Guncang Nepal". BBC Indonesia. 26 April 2015. Diakses 27 April 2017. http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150426_gempa_susulan_nepal.

¹² "Nepal Earthquake Appeal". Disaster Emergency Committee. Diakses 27 April 2017. <http://www.dec.org.uk/appeal/nepal-earthquake-appeal>.

¹³ "Economic Impact of Nepal Earthquake" Globalede. 5 Juli 2015. Diakses 2 Mei 2017. <https://globalede.msu.edu/blog/post/21933/economic-impact-of-nepal-earthquake->.

terbesar negara Nepal pada tahun 2014 mendatangkan lebih 800 ribu turis mancanegara juga mengalami kerugian yang sangat besar, hal ini disebabkan banyaknya situs-situs pariwisata yang rusak akibat gempa Nepal.¹⁴

Gempa Nepal juga berdampak pada aspek kemanusiaan di Nepal. Gempa ini membuat hampir seluruh wilayah bencana kekurangan energi baik listrik maupun bahan bakar, selain itu kekurangan makanan dan juga air bersih yang mempengaruhi aspek kemanusiaan di wilayah tersebut.¹⁵ Akses jalan yang sulit di jangkau juga menyebabkan sulitnya pengiriman bantuan ke wilayah gempa, sehingga bantuan-bantuan yang bersifat *emergency* hanya bisa di kirimkan melalui udara.¹⁶ Pemerintah Nepal hanya bisa berupaya dengan memberikan pembangkit energi yang jumlahnya masih kurang mencakup seluruh wilayah bencana, sehingga harus dipakai secara bergiliran dari satu wilayah ke wilayah lainnya.¹⁷ Akses terhadap air bersih yang kurang membuat semakin buruknya keadaan warga Nepal, selain harus menderita akibat cedera ringan maupun berat warga Nepal juga diberatkan dengan ancaman bahaya berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan kebersihan seperti hepatitis, diare, dan lain sebagainya.¹⁸

AS menjadi salah satu dari sekian banyak negara-negara maju yang memberikan bantuan luar negeri melalui organisasi bantuan luar negeri, melalui USAID. Saluran bantuan yang diberikan USAID ini selain diberikan secara langsung pada negara juga diberikan melalui *Non Governmental Organizations*

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Humanitarian Crisis After The Nepal Earthquakes 2015. WHO., 2015. Hlm. 10.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid. hlm. 14

(NGOs) yang berada di Nepal untuk memperkuat kapasitas mereka, dan menciptakan kerjasama yang efektif dan berjangka panjang.¹⁹ Program bantuan AS melalui USAID merupakan salah satu bantuan yang besar dan berdampak cukup besar saat penanggulangan awal dari bencana, program bantuan ini disebut “*Build Back Better*” dimana AS menyiapkan dana sebesar 130 USD dalam program bantuan ke Nepal ini.²⁰ Program bantuan AS ini juga akan menciptakan *partnership* dengan pemerintah pusat dan pemerintah lokal, komunitas dan bantuan bisnis di area yang terkena bencana gempa, memulihkan mata pencaharian dan aset yang paling terkena dampak bencana, karena pengumuman bantuan sebesar 130 USD yang diberikan tersebut merupakan bantuan awal dan AS akan melanjutkan bantuannya dengan pemulihan jangka panjang gempa.²¹

Dana yang dijanjikan AS untuk program bantuan ini sebesar 130 juta USD yang dibagi dalam beberapa sektor yaitu 32% *Logistics Support & Relief Commodities*, 25% *Shelter & Settlements*, 24% *Urban Search and Rescue*, 10% *Water, Sanitation, and Hygiene*, 3% *Health*, 2% *Humanitarian Coordination & Information*, 2% *Agriculture & Food Security*, dan 2% untuk sektor-sektor lainnya. Jangka waktu bantuan yang diberikan AS ini bersifat jangka panjang dan dilanjutkan hingga tahun-tahun kedepan.²²

¹⁹ “Non-Governmental Organizations (NGOs)”. USAID.GOV. <https://www.usaid.gov/partnership-opportunities/ngo>.

²⁰ “US Announces \$130 Million Contribution to Nepal to Build Back Better”. USAID.GOV. Diakses 11 Juli 2017. <https://www.usaid.gov/nepal/fact-sheets/us-announces-130-million-contribution-nepal-build-back-better>.

²¹ *Ibid*.

²² “Nepal Earthquake Fact Sheet #1”. USAID.GOV diakses 11 Juli 2017. <https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/12.23.15%20-%20USAID-DCHA%20Nepal%20Earthquake%20Fact%20Sheet%20%231%20%281%29.pdf>

Bantuan AS ke Nepal ini terlihat kecil jika dibandingkan dengan bantuan ke negara-negara yang terkena bencana lainnya serta diantara negara-negara Asia Selatan yang lainnya. Namun, alokasi dana bantuan AS ke Nepal meningkat dari tahun 2014 ke 2015, sedangkan alokasi dana bantuan AS ke negara-negara Asia Selatan lainnya menurun dari tahun 2014 ke 2015. Sebagai contoh pada tahun 2014 bantuan AS ke India tercatat 91,01 Juta USD, Sri Lanka 31,33 Juta USD, Nepal 80,26 Juta USD. Pada tahun 2015 bantuan AS ke India tercatat 87,76 Juta USD, Sri Lanka 24,42 Juta USD, dan Nepal meningkat hingga 139,89 Juta USD.²³ Data ini menunjukkan bahwa bantuan AS ke Nepal meningkat cukup banyak pada tahun 2015..

Pada tahun 2015 sendiri ada banyak negara-negara di dunia yang terkena bencana. Satu dari sekian banyak itu adalah Nepal.²⁴ Dalam tahun 2015 terjadi banyak sekali bencana alam di berbagai negara, seperti banjir di Mozambik, angin topan di Vanuatu, gelombang udara panas di India dan Pakistan, gempa di Cile, dan banjir di sekitar wilayah Carolina Selatan.²⁵ Masih banyak lagi bencana yang tersebar di seluruh dunia. Namun, dari negara-negara tersebut yang sangat mendapat perhatian AS dan mendapat bantuan yang banyak hanya beberapa negara saja. Sedangkan bantuan AS ke Nepal bisa dibilang cukup banyak.²⁶

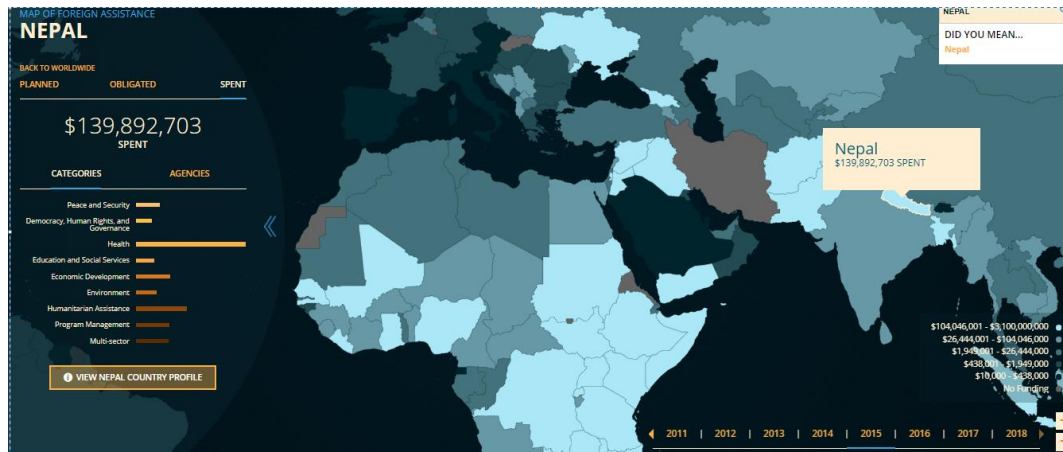
²³ “*Foreign Aid in South Asia*”. Foreignassistance.gov diakses pada 29 Agustus 2017. [http://foreignassistance.gov/explore/country/Asia-\(South-&-Central-Asia\)](http://foreignassistance.gov/explore/country/Asia-(South-&-Central-Asia)).

²⁴ “*Floods, earthquakes, wildfires and heat waves: the worst natural disasters of 2015*”. Cbc.ca. diakses pada 19 Oktober 2017. <http://www.cbc.ca/news/world/year-end-2015-natural-disasters-1.3346639>.

²⁵ *Ibid.*

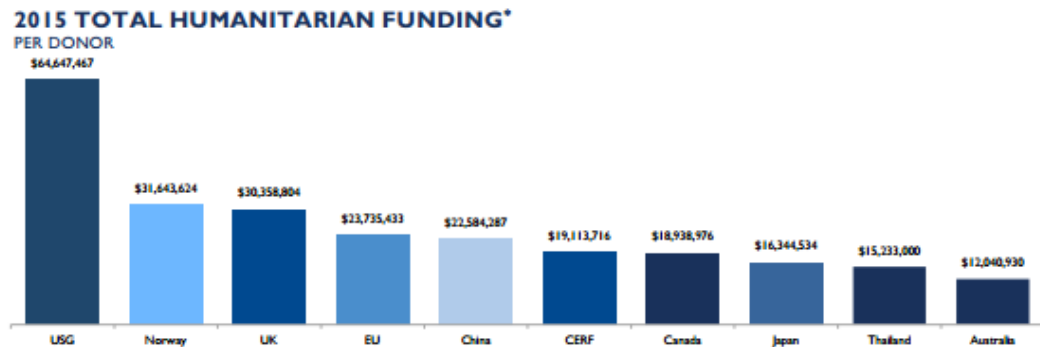
²⁶ “*Map of Humanitarian Worldwide*”. Foreignassistance.gov diakses pada 1 November 2017. <https://foreignassistance.gov/explore>

Gambar 1.1 Jumlah bantuan keseluruhan 2015



Sumber: Foreignassistance.gov

Gambar 1.2 Jumlah bantuan kemanusiaan Nepal



Sumber: <https://www.usaid.gov/nepal-earthquake/fy15/fs23>

Dalam data peta persebaran bantuan luar negeri AS oleh ForeignAssistance, Nepal termasuk dalam kategori tertinggi penerima bantuan AS yaitu sebesar 139.892.703 USD.²⁷ Bantuan luar negeri AS ke Nepal termasuk dalam kategori tertinggi ketiga.²⁸ Sedangkan Bantuan kemanusiaan AS ke Nepal sendiri pada akhir tahun 2015 paska terjadi gempa berjumlah 64.075.408 USD. Hal ini membuat penelitian penulis menjadi menarik karena jumlah bantuan yang AS berikan pada Nepal berjumlah cukup banyak sedangkan Nepal merupakan negara kecil yang belum berkembang.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Pada prinsipnya sendiri bantuan kemanusiaan adalah bantuan yang bersifat murni dan tidak memiliki unsur-unsur kepentingan maupun politik dalam bentuk apapun. Namun pada penelitian-penelitian yang dilakukan para ahli, ditemukan bahwa bantuan-bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh negara donor ke negara resipien merupakan salah satu ‘cara’ negara donor mencapai kepentingan mereka yang ingin dicapai di negara resipien tersebut. Sebagai contoh adalah jurnal yang ditulis oleh Ploch dimana dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa pada tahun 2007 AS memberikan bantuan kemanusiaan berupa bantuan militer di Afrika. Bantuan militer tersebut adalah untuk menstabilkan keadaan negara Afrika yang rawan adanya terorisme, namun dibalik itu AS juga bertujuan untuk mengamankan perdangan minyak yang dilakukan AS-Afrika.²⁹

Dalam jurnal milik Drury, Olson, dan Van Belle yang melihat adanya kepentingan politik dibalik bantuan kemanusiaan yang diberikan AS pada tahun 1964-1995 ke beberapa negara. Bantuan kemanusiaan yang diberikan AS berbeda-beda pada setiap negara dalam jumlah alokasinya, namun pada saat itu terjadi perang dingin dimana dunia terbagi dalam 2 aliansi blok barat dan timur. AS merupakan negara aliansi blok barat dan selama 30 tahun tersebut, AS memberikan bantuan kepada negara-negara yang bergabung dalam blok barat.³⁰ Hal ini menunjukkan bahwa AS memiliki kepentingan politik untuk memperkuat aliansinya.

²⁹ Ploch, Lauren. *Africa Command: U.S. Strategic Interests and the Role of the U.S. Military in Africa*. 2007.

³⁰ Drury, A. Cooper, Richard Stuart Olson, Douglas A. Van Belle. *The Politics of Humanitarian Aid: U.S Foreign Disaster Assistance, 1964-1995*, 1995.

Dari beberapa contoh tersebut ditunjukkan bahwa bantuan kemanusiaan tidak semurni yang dituliskan pada prinsip bantuan kemanusiaan. Ada faktor-faktor politis didalamnya yang mendorong negara donor untuk memberikan bantuan kemanusiaannya. Penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa bantuan kemanusiaan pada periode-periode lalu diwarnai dengan adanya kepentingan negara donor. Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti adanya faktor-faktor politis pada bantuan kemanusiaan yang diberikan AS kepada Nepal paska gempa tahun 2015.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang tersebut penulis membuat rumusan masalah penelitian yaitu “Apa yang menjadi faktor politik yang mempengaruhi bantuan kemanusiaan Amerika Serikat kepada Nepal paska gempa pada tahun 2015?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis buat berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas adalah untuk mengetahui faktor-faktor politik yang menjadi alasan Amerika Serikat memberikan bantuan kemanusiaan kepada Nepal paska gempa tahun 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis buat ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Sebagai kajian yang dapat digunakan untuk memahami dan mengaplikasikan konsep *Humanitarian Aid*.
2. Sebagai referensi untuk penelitian yang dilakukan di kemudian hari, terkait dengan *Humanitarian Aid*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Mampu memberi penjelasan dan pemahaman faktor-faktor politik yang mempengaruhi Amerika Serikat memberi bantuan kemanusiaan kepada Nepal paska gempa tahun 2015.
2. Memberi masukan bagi pemerintah dengan kasus pemberian bantuan kemanusiaan Amerika Serikat kepada Nepal paska gempa tahun 2015, guna menganalisa faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi suatu negara memberikan bantuan kemanusiaan.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Studi Terdahulu

Untuk membantu menyelesaikan penelitian yang penulis angkat, penulis menggunakan beberapa penelitian lain yang memiliki kemiripan studi kasus dengan kasus yang penulis teliti selain itu penulis juga menggunakan penelitian yang memiliki konsep yang sama dengan konsep yang akan digunakan dalam penelitian penulis. Penelitian yang pertama adalah penelitian yang berjudul *The Pseudo-Democrat's dilemma* dimana meneliti adanya kepentingan negara donor pada pemberian bantuan sebagai alat *influence* tipe pemerintahan demokatis. Penelitian yang kedua yang penulis pakai sebagai acuan berjudul *Africa Command: U.S. Strategic Interest and The Role of The U.S Military in Africa*, penelitian ini menulis adanya kepentingan negara donor yakni AS dalam memberikan bantuan kemanusiaan dalam bentuk bantuan militer di Ethiopia. studi terdahulu ini akan menjadi perbandingan yang penulis gunakan dalam menyelesaikan penelitian yang penulis lakukan baik dari segi kasus, aktor maupun konsep yang ada.

2.1.1 The Pseudo-Democrat's Dilemma

Jurnal ini merupakan penelitian milik Susan D. Hyde dimana dalam jurnal ini membahas beberapa kasus negara yang memberikan bantuan mereka kepada calon kepala negara-negara yang baru memberlakukan sistem demokrasi. Susan D. Hyde melihat adanya kepentingan negara-negara donor yang sudah

menerapkan sistem demokrasi dalam negara mereka kepada negara yang baru melakukan demokrasi tersebut. Dalam Jurnalnya ia mengambil contoh pada tahun 2005 dimana Etiopia menerima bantuan dari AS dan negara anggota UN dan menjadikan Etiopia sebagai salah satu negara dengan jumlah bantuan terbanyak di Afrika. Walaupun pada tahun 2000 Etiopia menolak untuk mengundang observer internasional, pada tahun 2005 perdana menteri Etiopia Meles Zenawi mengundang lebih dari 300 observer internasional. Seperti dikutip dalam *Economist* ini akan menandai perubahan ideologi pemerintahan dari Marxis menjadi Demokrasi multi partai.¹

Begitu juga dengan kampanye pada saat itu berjalan dengan sangat baik, dimana Meles dipuji karna mengadakan debat terbuka, dan sangat sedikit terjadi pelanggaran kampanye. Namun, ternyata pemerintahan Meles pada akhirnya malah memanipulasi hasil pada saat-saat akhir dimana pada saat voting ditutup pemerintah langsung mengeluarkan hasil voting menurut pemerintah yang langsung memenangkan pemerintah yang berkuasa saat itu.² Hal itu membuat Inggris sebagai salah satu negara donor pada saat itu membekukan bantuannya berjumlah 30 Juta USD, dan diikuti beberapa negara donor. Singkatnya Meles tidak berhasil mendapat pengakuan sebagai pemerintah yang demokratis, sehingga jumlah bantuan yang Etiopia terima berkurang.³

Begitu pula saat masa perang dingin dimana AS pada awal pemerintahan Kennedy memberikan bantuan kepada negara demokratis dan

¹ Hyde, Susan D., *The Pseudo-Democrat's Dilemma*. 2011. hlm.89

² *Ibid.* hlm. 90

³ *Ibid.*

menekankan anti komunisme pada kebijakan luar negerinya. Kennedy melalui program *Alliance for Progress* berusaha mempromosikan demokrasi di Amerika Latin dengan menyiapkan dana 22,3 Trilyun USD.⁴ Susan D. Hyde melalui jurnalnya ini menunjukkan bahwa AS menggunakan bantuannya sebagai alat untuk menularkan ideologi mereka.

Persamaan tulisan yang penulis teliti dan yang Hyde teliti adalah pada persamaan isu dimana penulis meneliti tentang pemberian bantuan kemanusiaan di Nepal dan Hyde meneliti bantuan berupa dana. Disini penulis dan Hyde melihat adanya kepentingan negara donor dalam pemberian bantuan ke negara resipien. perbedaan penelitian yang penulis lakukan dan yang Hyde lakukan adalah perbedaan studi kasus, konsep yang digunakan, serta fokus pada bantuan kemanusiaan yang diberikan AS kepada Nepal tahun 2015 sedangkan Hyde melihat bantuan AS ke negara Afrika dan Amerika Latin..

2.1.2 Africa Command: U.S. Strategic Interest and The Role of The U.S. Military in Africa

Jurnal yang ditulis oleh Lauren Ploch ini merupakan penelitian yang menggali kepentingan AS dalam pemberian bantuan militer ke Afrika sebagai bentuk perlawanannya terhadap ancaman teror global. Dalam jurnalnya Ploch menemukan 5 kepentingan AS melalui bantuan kemanusiaanya tersebut. Pertama berkaitan dengan perdagangan minyak AS-Afrika dimana AS pada tahun 2006 memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhannya minyak negaranya dari Afrika sebanyak 75%. Hal ini untuk menjadikan Afrika alternatif pemasok minyak AS

⁴ *Ibid.* hlm.97

yang sebelumnya dipasok Timur Tengah. Sehingga adanya militer AS akan mengamankan sumber minyak dan kelancaran ekspor-impor mereka.⁵ Kedua adalah, keamanan maritim, kawasan perairan Afrika merupakan kawasan yang rentan terjadi *illegal fishing*, *Drug Trafficking*, serta pembajakan. Perairan Afrika merupakan tempat transit narkoba dan pada tahun 2005 AS telah memperkenalkan strategi nasional untuk mengamankan maritimnya. Termasuk dengan memperkuat Afrika dalam meningkatkan kapabilitas angkatan laut, serta pengawasan dan peningkatan hukum maritim negaranya.⁶

Ketiga adalah konflik bersenjata di Afrika. Afrika merupakan negara dengan kestabilan politik yang rendah sehingga rawan dengan keamanan ekonomi maupun penduduk Afrika sendiri. Sehingga banyak sekali konflik bersenjata yang sangat merugikan aspek kemanusiaan di Afrika. Hal ini membuat AS memberikan kontribusi sebagai salah satu donor terbesar bantuan militer untuk meningkatkan kapabilitas militer Afrika dan memulihkan segi kemanusiaan di Afrika.⁷ Keempat adalah kelompok-kelompok ekstrimis di Afrika dimana kedutaan besar AS mendapat berbagai serangan bom di Afrika. Hal ini membuat AS dengan gencar memusatkan perhatian terhadap perlawanan kelompok-kelompok ekstrimis di Afrika.⁸ Dan yang kelima adalah bantuan kesehatan, kawasan Afrika merupakan kawasan yang sangat rentan dengan penularan HIV hal ini dibuktikan dengan data bahwa 67% penderita HIV merupakan dari kawasan Afrika. Sehingga AS

⁵ Ploch, Lauren. *Africa Command: U.S. Strategic Interests and the Role of the U.S. Military in Africa*. 2007. Op.Cit. hlm. 12.

⁶ Ibid, hlm. 13.

⁷ Ibid, hlm. 14.

⁸ Ibid, Hlm. 15

bekerjasama dengan Afrika mendirikan pusat penelitian kesehatan angkatan laut di San Diego.⁹

Kesamaan yang ada dalam penelitian penulis dengan jurnal milih Ploch ini adalah kesamaan isu yaitu pemberian bantuan kemanusiaan. Penulis meneliti pemberian bantuan kemanusiaan AS kepada Nepal dan dalam jurnal Ploch meneliti pemberian bantuan kemanusiaan berupa bantuan militer. Fokus penelitianpun memiliki kemiripan dimana penulis fokus mencari faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan AS ke Nepal dan Ploch mencari kepentingan AS dalam pemberian bantuan militer ke Afrika. Perbedaan yang dimiliki penelitian penulis dan jurnal Ploch adalah konsep yang digunakan.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Humanitarian Aid

Humanitarian aid didefinisikan sebagai bantuan yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa , menghilangkan penderitaan dan menjaga kemanusiaan selama bencana alam maupun bencana yang diciptakan manusia maupun paska bencana tersebut, sekaligus mempersiapkan pencegahan dan penguatan kesiapan untuk bencana di kemudian hari.¹⁰ Definisi *Humanitarian aid* ini didasarkan pada prinsip-prinsip *humanitarian* yang telah diakui dan diratifikasi di konvensi wina tahun 1949 yaitu *humanity, neutrality, impartiality*, dan *independence*.¹¹ Dalam setiap kasus bantuan luar negeri baik bencana alam maupun bencana yang

⁹ Ibid, Hlm. 16

¹⁰ “*Defining Humanitarian Assistance*.” Global Humanitarian Assistance. Diakses 5 Juni 2017.
<http://www.globalhumanitarianassistance.org/data-guides/defining-humanitarian-aid/>

¹¹ “*Humanitarian Principle*.” European Commission. Diakses 5 Juni 2017.
http://ec.europa.eu/echo/who/humanitarian-aid-and-civil-protection/humanitarian-principles_en

diciptakan manusia terdapat perbedaan baik jenis bencana, maupun kondisi domestik yang ada dalam negara yang terkena bencana alam. Sehingga memiliki prinsip penanggulangan yang berbeda-beda pula sesuai kebutuhan negara tersebut. Perbedaan prinsip tersebut menciptakan batasan-batasan yang berbeda-beda dari bantuan kemanusiaan, namun walau begitu masih berhubungan dengan prinsip *humanitarian* itu sendiri.

Bantuan kemanusiaan menjadi instrumen penting bagi korban bencana dan rekonstruksi di wilayah bencana. Bantuan kemanusiaan juga perlu didistribusikan dengan benar dan dikoordinasikan dengan baik oleh pihak-pihak yang bersangkutan baik negara donor maupun *resipien*.

Dalam prinsip *humanitarian* terdapat prinsip *independence* yang berarti kemanusiaan tidak terpengaruh dengan politik, ekonomi, militer, dan sebagainya.¹² prakteknya negara donor memiliki banyak sekali cara pandang dalam pemberian bantuan kemanusiaan. Sehingga hal ini menimbulkan banyak perdebatan mengenai tujuan-tujuan pemberian bantuan kemanusiaan. Seperti dalam jurnal penelitian *The Politics of Humanitarian Aid*, menunjukkan adanya tujuan yang berbeda dari prinsip *humanitarian* itu sendiri. Bantuan kemanusiaan bukan lagi dianggap murni bertujuan membantu negara resipien, namun memiliki kepentingan-kepentingan politik kepada negara resipien yang disertakan dalam memberikan bantuan tersebut.

Studi lain berupa jurnal yang di tulis oleh Fiona Terry berjudul *The Paradox of Humanitarian Aid* juga memperkuat bahwa bantuan kemanusiaan bukan saja menjadi bantuan yang bersifat *independence*. Bantuan kemanusiaan

¹² “*Humanitarian Principle*.” European Commission. Op.Cit.

tidak lepas dari kepentingan politik dari negara. bantuan kemanusiaan dapat digunakan oleh negara sebagai kamufase untuk mendapatkan tujuan politik mereka.¹³ Bagaimana sebuah negara memandang bantuan luar negeri dan bagaimana negara itu memanfaatkannya akan sangat mempengaruhi pemberian bantuan itu sendiri.

Sebuah negara memberikan bantuan luar negeri bisa dimaksudkan untuk bantuan kemanusiaan atau bantuan pembangunan. Kedua bantuan ini sering kali diartikan sama karena sama-sama bantuan luar negeri. namun, ada perbedaan yang cukup signifikan diantara bantuan kemanusiaan dan bantuan pembangunan. Bantuan kemanusiaan merupakan bantuan yang diberikan langsung ke lokasi yang terkena bencana. Bantuan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seperti air bersih, makanan tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. prioritas bantuan ini adalah untuk membantu orang-orang yang kehilangan rumah, mencegah meluasnya konflik, dan rehabilitasi.¹⁴

Bantuan pembangunan adalah bertujuan untuk membangun negara baik secara infrastruktur, institusi, maupun ekonominya. Bantuan ini menjadi kunci untuk sebuah negara menjadi semakin berkembang. Prinsipnya adalah menggunakan dana bantuan itu dengan memperhitungkan kondisi untuk meningkatkan ekonomi dan politik yang akan memperkuat keamanan dan kestabilan pemerintahan.¹⁵ Efektivitas dan efisiensi bantuan ini yang menjadi kendala karena bantuan ini akan terpengaruh juga dengan masalah-masalah

¹³ Terry, Fiona. 1998. *The Paradox of Humanitarian Aid*. Hlm 139

¹⁴ Branczik, Amelia. 2004. *Humanitarian Aid and Development Assistance*.

¹⁵ *Ibid*.

kompleks di level domestik negara resipien seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya.¹⁶

Studi-studi, prinsip mengenai bantuan kemanusiaan serta perbandingan dengan bantuan pembangunan penulis gunakan sebagai pandangan bantuan yang diberikan Amerika Serikat kepada Nepal yang penulis teliti. Selain itu juga akan menjadi bahan pendukung untuk penulis mencari faktor-faktor yang mempengaruhi AS memberi bantuan kemanusiaan kepada Nepal.

2.2.2 The Politics of Humanitarian Aid

Konsep *The Politics of Humanitarian Aid* adalah konsep yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini. Konsep yang dipakai A. Cooper Drury, Richard Stuart Olson, dan Douglas A. Van Belle pada jurnal mereka yang berjudul *The Politics of Humanitarian Aid: U.S Foreign Disaster Assistance, 1964-1995*.¹⁷ Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa alasan-alasan AS sebagai negara donor memberikan bantuan kepada beberapa negara selama sekitar 30 tahun. Alasan-alasan yang mendasari pemberian bantuan itu didapatkan berbeda-beda pada setiap negara begitu juga bentuk bantuan dan jumlah alokasi dana yang diberikan. Bantuan-bantuan yang berbeda-beda berdasar pada kondisi perpolitikan yang ada antara AS dan negara tersebut.¹⁸ Melalui penelitian ini mereka berusaha membuktikan adanya faktor-faktor politik yang mempengaruhi pemberian bantuan AS yang selama ini dianggap obyektif.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Drury, A. Cooper, Richard Stuart Olson, Douglas A. Van Belle. Op.Cit. hlm 454

¹⁸ *Ibid.* hlm. 470.

¹⁹ *Ibid.*

Dunia pada saat itu berada pada masa perang dingin, yaitu kondisi dimana dunia terbagi dalam 2 aliansi blok barat dan blok Timur. Salah satunya adalah AS yang tergabung sekaligus memimpin blok Barat. Dari analisa yang dilakukan terlihat bahwa AS memberikan bantuannya pada negara-negara yang tergabung dalam aliansinya. Hal ini menunjukkan adanya faktor politik AS yang berpengaruh cukup kuat dalam pemberian bantuan kemanusiaan mereka. Dengan AS memberikan bantuan pada negara-negara anggota aliansinya maka tanpa disadari hal ini akan memperkuat aliansinya, selain itu juga AS menggunakan bantuan luar negerinya sebagai alat untuk mempengaruhi negara-negara yang berada dalam satu blok dengannya tersebut ikut dalam aliansi blok barat.²⁰

Dalam jurnal ini juga ditemukan bahwa rezim kepemimpinan dalam negara *resipien* AS juga mempengaruhi AS dalam memberikan bantuannya, dari negara-negara yang diberi bantuan oleh AS hanya ada sedikit negara non demokrasi. Sedangkan negara yang menganut demokrasi akan lebih mudah mendapat bantuan oleh AS, ini menunjukkan adanya faktor persamaan rezim yang dianut oleh AS dan negara-negara yang mendapatkan bantuan luar negerinya.²¹ Kapabilitas ekonomi suatu negara juga mendasari pemberian bantuan luar negeri AS. AS cenderung memberi bantuan luar negeri pada negara-negara yang memiliki kapabilitas ekonomi dibawah AS. Negara-negara dengan kapabilitas ekonomi yang tinggi dinilai mampu menyelesaikan permasalahan bencana yang mereka hadapi sehingga AS tidak banyak membantu negara dengan kapabilitas ekonomi yang tinggi.²²

²⁰ *Ibid.* hlm. 457.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.* hlm. 458

Dari kondisi domestik sendiri bantuan luar negeri yang AS berikan sangat dipengaruhi dengan defisit anggaran yang ada. Jumlah bantuan yang diberikan AS akan semakin banyak saat AS tidak mengalami defisit anggaran.²³ Peran media di AS juga mempengaruhi pemberian bantuan AS, dimana semakin intens sebuah media dalam memberitakan sebuah bencana maka hal ini akan meningkatkan rasa simpati AS untuk memberikan bantuan kepada negara tersebut.²⁴ Begitu juga dengan tipe bencana yang dialami oleh sebuah negara, Tipe bencana yang dialami akan mempengaruhi bantuan akan yang akan diterima atau akan mempengaruhi pemberian bantuan. Semakin parah bencana yang dialami sebuah negara maka semakin banyak bantuan yang diterima dan semakin banyak bantuan yang diberikan si pembantu bencana. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian Drury, Olson, dan Van Belle adalah adanya faktor politik yang sangat kuat mempengaruhi pemberian bantuan AS selama periode tahun 1964-1995. Terlihat dari dampak bantuan itu sendiri memperkuat aliansinya.

Pada konsep *The Politics of Humanitarian Aid* ini dijelaskan bahwa bantuan kemanusiaan memiliki keterkaitan dengan aspek politik yang terjadi antara negara donor dengan negara resipien. Konsep ini mencoba melihat aspek politik yang mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara resipien.²⁵

Konsep ini memiliki dua variabel dan beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis kebijakan bantuan kemanusiaan. Yang pertama

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* hlm. 459

²⁵ *Ibid.*

adalah variabel *political connection*, variabel ini akan melihat keterkaitan politik dan pemberian bantuan kemanusiaan tersebut baik hubungan politik kedua negara serta keadaan domestik negara resipien.²⁶ Selain melihat dari hubungan politik terdapat variabel *nonpolitical factors*, variabel ini melihat hal lain selain hubungan politik sebagai faktor yang ikut mempengaruhi negara donor memberikan bantuan kemanusiaan.²⁷

Pada dasarnya konsep ini berfokus pada analisa faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan sebuah negara memberi bantuan kemanusiaan. Pada tulisan Jean-Phillip Therien yang berjudul *Debating Foreign Aid: Left or right* dijelaskan bahwa bantuan luar negeri merupakan bantuan yang berakar dari paham *left-wing* dimana pada tahun 1901 mulai lahir banyak NGO's yang berfokus pada pemberian bantuan kemanusiaan yang bersifat jangka pendek, dan menjunjung nilai '*world citizenship and universal human kinship*'.²⁸ Paham ini percaya bahwa bantuan luar negeri merupakan bantuan murni tanpa ada maksud-maksud tertentu di baliknya. Sehingga konsep yang penulis pakai adalah konsep yang menentang pernyataan tersebut, dan merupakan studi yang meneliti kepentingan-kepentingan politik dibalik pemberian bantuan luar negeri.

Konsep ini relevan jika digunakan dalam meneliti kasus yang penulis angkat. Penulis akan menganalisa faktor-faktor apa saja yang membuat Amerika Serikat memberi bantuan kemanusiaan kepada Nepal paska gempa tahun 2015. Oleh alasan itu penulis menggunakan konsep ini untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian yang penulis lakukan.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.* hlm. 549

²⁸ Therien, Jean-Philippe. Op.Cit. hlm 452

2.2.2.1 Political Connection

Variabel *political connection* melihat hubungan politik antara negara donor dan negara resipien. Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh negara donor sangat dipengaruhi dengan keadaan politik baik negara donor itu maupun negara resipien. Sub-variabel dari *political connection* antara lain, fokus kebijakan luar negeri kepada negara resipien, fokus keadaan politik domestik negara donor dan juga fokus politik domestik negara resipien.²⁹ Ketiga hal tersebut yang akan menjadi bukti bahwa hubungan politik negara donor dan negara resipien akan mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan.

2.2.2.1.1 Donors Foreign Policy Concern or Reservation About The Potential Recipient State

Banyak aspek yang dilihat dalam menentukan sebuah keputusan untuk memberikan bantuan luar negeri. hal ini menjadi penting karena sering kali bantuan luar negeri dipakai sebagai alat oleh negara untuk mencapai kepentingannya dalam sebuah kebijakan. Aliansi, rezim negara resipien, dan tingkat pembangunan negara resipien menjadi tolok ukur yang berpengaruh dalam pemberian bantuan ini.

Aliansi disini merupakan pola hubungan antara negara donor dan resipien yang bersifat saling mengikat. Pada konsep ini aliansi sendiri dicontohkan dalam AS yang memberikan bantuan hanya pada negara-negara yang bergabung dalam blok barat. Negara donor akan lebih mudah untuk memberikan bantuan kepada negara-negara anggota aliansinya. Berkaitan dengan rezim negara

²⁹ Drury, A. Cooper, Richard Stuart Olson, Douglas A. Van Belle. Op.Cit. hlm 454

resipien, dalam konsep ini dijelaskan bahwa sebuah negara akan lebih mudah memberikan bantuan kepada negara yang memiliki kesamaan ideologi.³⁰

Pertimbangan berikutnya adalah tingkat pembangunan negara resipien, dimana jika tingkat pembangunan sebuah negara tinggi maka bisa diasumsikan bahwa negara tersebut termasuk negara dengan tingkat kekayaan yang cukup tinggi. Negara-negara ini dianggap memiliki kemampuan yang cukup untuk menanggulangi bencana di negaranya sendiri. Sedangkan negara dengan tingkat pembangunan yang rendah diasumsikan sebagai negara dengan tingkat kekayaan yang rendah, dan negara tersebut akan membutuhkan bantuan dari negara-negara lain untuk memperbaiki negaranya paska bencana. Sehingga, hal ini mempengaruhi negara donor dalam pemberian bantuan kemanusiaan.³¹

2.2.2.1.2 Donor Domestic Political Concerns

Tidak dipungkiri bahwa keadaan politik domestik negara donor juga akan mempengaruhi sebuah kebijakan bantuan kemanusiaan. Untuk mengukur faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya defisit anggaran belanja negara, pemberitaan bencana di media-media negara donor, serta pengalaman bencana negara donor menjadi tolok ukur dalam konsep ini.³²

Semakin besarnya defisit belanja negara donor akan semakin sedikit dana bantuan kemanusiaan yang akan dikeluarkan negara donor. Kedua, negara donor akan lebih memberi perhatian kepada bencana-bencana yang pemberitaannya besar dan disorot banyak media. Dan sejarah bencana yang pernah dialami negara donor akan mempengaruhi jumlah bantuan yang diberikan

³⁰ *Ibid.* hlm. 457

³¹ *Ibid.* hlm. 458

³² *Ibid.*

negara donor. Karena konsep ini percaya pengalaman bencana akan lebih mendorong rasa empati sebuah negara dalam memberi bantuan kepada negara yang mengalami hal yang sama.³³

2.2.2.1.3 Domestic Politics Within The Potential Recipient State

Dalam sub-variabel melihat adanya pengaruh pemberian bantuan kemanusiaan terkait dengan kondisi politik domestik di negara resipien. Namun dalam sub-variabel konsep ini Drury, Olson, dan Van belle meragukan politik domestic negara resipien secara konsisten mempengaruhi bantuan. Sehingga mereka hanya menggunakan 2 sub-variabel pertama dalam jurnal mereka.³⁴

Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi politik domestik negara resipien mempengaruhi kebijakan pemberian bantuan negara donor kepada negara resipien. Tolok ukur dari sub-variabel ini adalah tingkat korupsi di negara resipien, dan kondisi pemerintahan yang ada di dalam negara resipien.³⁵ Walaupun dalam jurnal Drury, Olson dan Van Belle sub-variabel ini tidak digunakan, penulis akan mencoba untuk mencari tahu apakah ada faktor politik domestik negara Nepal yang mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan AS.

2.2.2.2 Non Political Factors

Konsep ini juga memiliki variabel non-politik yang juga diasumsikan mempengaruhi pengambilan kebijakan pemberian bantuan kemanusiaan. Variabel ini juga menjadi pelengkap diantara faktor-faktor politik yang ada. Karena,

³³ *Ibid.* hlm. 459

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Loc.cit

terlepas dari kondisi politik tersebut bencana yang terjadi itulah yang akan mempengaruhi negara donor untuk memberikan bantuan kemanusiaan.³⁶

Untuk mengukur variabel non-politik ini indikator yang digunakan adalah tipe bencana yang terjadi. Bencana yang berbeda-beda akan memerlukan tipe bantuan yang berbeda-beda pula. Tipe bencana sendiri dibagi menjadi dua yaitu bencana yang disebabkan manusia, dan yang disebabkan oleh alam.³⁷

2.3 Operasionalisasi Konsep

Setelah penulis memahami definisi konseptual, variabel dan indikator dari konsep *The Politics of Humanitarian Aid*, penulis melakukan operasionalisasi konsep yang telah penulis jabarkan. Konsep ini memiliki dua variabel yang dilengkapi dengan indikator-indikator yang berfungsi sebagai alat ukur penelitian. Variabel yang terdapat dalam konsep ini adalah *political connections* dan *nonpolitical factors*. Selanjutnya konsep ini akan penulis gunakan untuk menganalisis kasus yang penulis angkat yaitu faktor-faktor apa yang mempengaruhi Amerika Serikat memberikan bantuan kemanusiaan kepada Nepal pasca gempa tahun 2015.

2.3.1 Political Connections

2.3.1.1 Donors Foreign Policy Concerns or Revelations About The Potential Recipient State

Untuk mengukur sub-variabel ini pada definisi konseptual terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengukur yaitu Aliansi, Rezim negara resipien,

³⁶ *Ibid.* hlm. 460

³⁷ *Ibid.*

dan tingkat pembangunan di negara resipien. AS dan Nepal tidak secara resmi berada dalam sebuah aliansi. Namun seorang mantan Brigjen *Nepal Army* sekaligus anggota peneliti *Institute of Defense Studies and Analysis*, Umesh K. Bhattarai pernah menuliskan sebuah artikel yang dimuat di *The Himalayan Times* mengenai hubungan aliansi US-India-Nepal untuk menahan Tiongkok sebagai negara global power yang baru.

Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa Nepal harus sangat teliti dalam membuat kebijakan dan memilih aliansi karena Nepal dikelilingi 3 negara pemilik nuklir. Saat ini, sedang terjadi sebuah perubahan negara global power dimana AS dan Tiongkok sama-sama bersaing dalam berbagai kepentingan. Tiongkok menjadi negara dengan peningkatan ekonomi terbesar dari seluruh dunia dan ingin menguasai pasar asia selatan dan termasuk Samudra Hindia, Laut Arab, serta Teluk Benggala. Sehingga Nepal menjadi salah satu kunci dalam strategi AS-India membendung kepentingan Tiongkok di Asia Selatan.³⁸

Indikator kedua adalah rezim yang berjalan dalam negara resipien. dalam sejarah pemerintahan Nepal, ideologi *Maoist* sangat kental pada pemerintahannya. Namun saat ini Nepal telah berada dalam pemerintahan yang demokratis.³⁹ Hal ini menunjukkan adanya kesamaan dengan pemerintahan yang dianut AS. Ini membuktikan bahwa AS memberikan bantuan kemanusiaannya pada negara yang memiliki rezim yang sama dengan apa yang dianutnya. Konsep ini melihat ideologi negara donor dan negara resipien sebagai faktor pendorong pemberian bantuan kemanusiaan.

³⁸ "US-India-Nepal Alliance: Countering China". *The Himalayan Times*. Diakses pada 11 September 2017. <https://thehimalayantimes.com/opinion/us-india-nepal-alliance-countering-china/>

³⁹ "Ideological Deviation in Politics". *The rising Nepal*. Diakses pada 7 Juni 2017. <http://therisingnepal.org.np/news/14941>

Tingkat pembangunan di negara resipien adalah indikator ketiga untuk melihat adanya faktor pemberian bantuan kemanusiaan di negara resipien. Semakin rendah tingkat pembangunan di negara resipien maka diasumsikan negara tersebut merupakan negara miskin dan tidak mampu menanggulangi bencana sendiri. Sehingga semakin rendah tingkat pembangunannya maka semakin mendorong bantuan kemanusiaan negara donor. Nepal termasuk dalam kategori negara termiskin dan tidak berkembang. Dengan mencapai seperempat dari populasinya berada dalam garis kemiskinan. Dan hanya memiliki GDP sekitar 20 Milyar USD.⁴⁰ Hal ini menunjukkan bahwa Nepal tidak memiliki kapabilitas untuk menanggulangi efek bencana gempa yang terjadi pada tahun 2015. Faktor ini mendorong AS memberi bantuan kemanusiaan ke Nepal.

2.3.1.2 Donor Domestic Political Concerns

Dalam sub-variabel ini terdapat 3 indikator yang menjadi tolok ukur dalam melihat faktor-faktor pemberian bantuan kemanusiaan. Defisit anggaran belanja negara, pemberitaan bencana di media-media negara donor, serta pengalaman bencana negara donor. Defisit anggaran belanja negara donor merupakan hal yang penting karena mempengaruhi besar kecilnya alokasi dana bantuan ke negara resipien. semakin besar defisit anggaran maka akan semakin sedikit bantuan yang diberikan dan begitu sebaliknya.

Pada 10 tahun terakhir AS mengalami defisit anggaran yang besar pada tahun 2009. Namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2011 defisit anggaran AS mulai menurun dan pada saat terjadinya gempa di Nepal pada tahun 2015

⁴⁰ “Nepal”. World Factbook. Diakses pada tanggal 7 Juni 2017.
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/np.html>

defisit anggaran AS menurun hingga angka 3% dari GDP dan merupakan angka defisit terendah selama 10 tahun.⁴¹ Defisit anggaran AS pada tahun 2015 ini merupakan yang terendah sepanjang 10 tahun terakhir yaitu pada angka 439 Milyar Dollar. Data lain menunjukkan dana bantuan AS ke Nepal mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2015 sekitar 40 Juta Dollar.⁴² Hal ini menunjukkan bahwa bantuan luar negeri AS bertambah banyak sejalan dengan menurunnya angka defisit anggaran belanja negara AS.

Peran media dalam bencana yang terjadi juga akan mempengaruhi pemberian bantuan oleh negara donor. Jika dalam sebuah bencana banyak media lokal negara donor yang menyorot maka akan besar kemungkinan negara donor memberikan bantuan dengan jumlah yang besar. Dalam bencana gempa di Nepal pada tahun 2015, media-media pemberitaan AS memberi perhatian yang cukup besar. Baik media elektronik maupun media cetak di AS cukup banyak menyorot pemberitaan mengenai gempa Nepal.

Pemberitaan media elektronik seperti *Fox News*, *CNN*, *CBS News*, *NBC News* cukup besar, selain itu laman berita seperti *USA Today*, *Time*, *Washington Post* juga memuat berita-berita tentang gempa di Nepal pada tahun 2015. Disamping itu, dalam negara AS terdapat *civil society* yang sangat peduli terhadap bencana yang terjadi di Nepal. Contohnya adalah *Colorado Nepal Alliance* dimana sejak tahun 2003 telah berdiri dengan tujuan membantu masyarakat di Nepal untuk mendapat pakaian yang layak dan akhirnya

⁴¹ "Recent US Current Budget Deficit". [usgovernmentdebt](http://www.usgovernmentdebt.us/spending_chart_2006_2016USp_XXs2li111mcn_G0f_Recent_Federal_Deficits_as_Pct_GDP). Diakses tanggal 7 Agustus 2017.

⁴² "Nepal". [Foreignassistance.gov](http://www.foreignassistance.gov/explorer/country/Nepal). diakses tanggal 7 Agustus 2017.

berkembang hingga membantu pendidikan serta kesehatan di Nepal. Namun, pada tahun 2015 semua bantuan akan di alokasikan untuk membantu bencana gempa Nepal.⁴³ Hal-hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah AS memberikan bantuan kemanusiaannya ke Nepal. Disisi lain dengan memberikan bantuan yang besar pemerintah AS membangun citra positif dalam tingkat domestiknya.

Indikator ketiga dari sub-variabel ini adalah sejarah bencana yang pernah dialami oleh negara donor. Negara donor yang pernah mengalami bencana baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan manusia akan mendorong pemberian bantuan untuk negara lain. AS sendiri pernah mengalami beberapa bencana alam maupun yang disebabkan kesalahan manusia yang membekas bagi AS. Selama 17 tahun terakhir AS sering mengalami bencana angin topan dan banjir pada tahun 2001 hingga 2008 AS mengalami angin topan yang terjadi di berbagai negara bagian yang dimiliki AS. Pada tahun 2005 terjadi angin topan di Florida, Louisiana, Mississippi dan Alabama yang dinamai Hurricane Katrina. Ini merupakan angin topan yang sangat parah dalam sejarah AS dimana pada bencana ini terdapat sekitar 1836 korban jiwa dan kerugian sebesar 108 Milyar Dollar.⁴⁴

Pada tahun 2014 banyak terjadi banjir dan kebakaran di negara-negara bagian AS yang menewaskan banyak korban jiwa dan menimbulkan kerugian jutaan Dollar. Pada Januari 2014 terjadi perubahan cuaca yang cukup ekstrim di

⁴³ "About Colorado Nepal Alliance". coloradonepalalliance.org. diakses pada tanggal 24 September 2017. <https://coloradonepalalliance.org/about-us/>

⁴⁴ "The 10 Worst U.S. Natural Disaster" Livescience. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2017. <https://www.livescience.com/11365-10-worst-natural-disasters.html>.

wilayah New York yang dinamakan *Polar Vortex*. Pada bulan April terjadi tornado di bagian Arkansas. Pada bulan Mei terjadi kebakaran besar di wilayah California. Selain itu masih banyak sekali banjir yang terjadi di beberapa negara bagian AS.⁴⁵ Selain bencana alam AS pun pernah mengalami bencana yang disebabkan manusia. Pada tahun 2001 terjadi tragedi 9/11 dimana merupakan serangan teroris di New York yang menewaskan sekitar 3000 orang.⁴⁶ Pengalaman AS dalam bencana-bencana yang terjadi di negaranya ini juga yang mendorong negara AS untuk membantu negara-negara yang mengalami bencana dan bersifat *emergency*.

Ketiga indikator tersebut menunjukkan adanya pengaruh dari kondisi politik domestik negara donor yang menjadi faktor pemberian bantuan kemanusiaan. Dalam hal ini AS memiliki dinamika tersendiri dalam politik domestiknya yang mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan pada Nepal paska gempa Nepal tahun 2015.

2.3.1.3 Domestic Politics Within The Potential Recipient State

Sub-variabel ini melihat kondisi domestik negara resipien, dimana indikator yang dapat dilihat adalah tingkat korupsi di negara resipien dan ketegangan politik yang ada di negara resipien. Nepal sendiri merupakan negara dengan tingkat pembangunan yang rendah, dan korupsi yang cukup besar. Data ini diambil oleh *Transparency International*, dimana dalam data yang diambil oleh mereka Nepal menempati urutan 131 dari 176 negara. Urutan ini

⁴⁵ "The Worst Natural Disaster in 2014". Time. Diakses pada 9 Agustus 2017. <http://time.com/3630106/natural-disaster-weather-photos-2014/>.

⁴⁶ "A Decade of Disaster 2000-2009". Govtech. diakses pada 9 Agustus 2017. <http://www.govtech.com/em/disaster/A-Decade-of-Disasters-2000-2009.html>.

mengurutkan negara dengan tingkat korupsi terendah hingga terbesar.⁴⁷ Hal ini terbukti dengan tingkat pembangunan yang rendah di Nepal, karena menurut studi yang dilakukan *Transparency International* didapatkan bahwa negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi sejalan dengan tingkat korupsi yang tinggi pula di negara tersebut.⁴⁸

AS sendiri dalam pemberian bantuannya tidak terpengaruh dengan keadaan pemerintahan Nepal yang sangat korup ini. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya ancaman AS untuk memotong anggaran bantuan kepada Nepal. Di sisi lain tingkat korupsi yang tinggi di Nepal ini membuat Inggris mengancam untuk memotong anggaran bantuan di Nepal. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari pemerintah Inggris yaitu “Britain should cut its 86 million pound (\$128 million) aid budget for Nepal unless the country acts to combat poor governance and "endemic" corruption” . Dalam pesan tersebut anggota perlemen Inggris berpendapat bahwa Inggris perlu memotong anggaran bantuannya jika Nepal tidak melakukan aksi perlawanan terhadap pemerintahan yang buruk dan korupsi.⁴⁹ Hal ini menunjukkan bahwa Nepal adalah negara yang berada dalam tingkat korupsi yang tinggi dan susah diatasi namun hal tersebut tidak mempengaruhi pemerintah AS dalam memberikan bantuan kepada Nepal.

Faktor kedua yang dapat dilihat dalam sub-variabel ini adalah ketegangan politik yang ada dalam negara resipien. Nepal saat ini berada dalam kondisi politik domestik yang tidak stabil, Hal ini dikarenakan perebutan

⁴⁷ “Corruption Preception Index 2016”. *Transparencyinternational*. diakses pada 8 Juni 2017. https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ “UK should cut aid to Nepal if ‘endemic’ corruption persist: report”. *Reuters*. diakses pada 8 Juni 2017. <http://www.reuters.com/article/us-britain-nepal-aid-corruption-idUSKBN0MN00F20150327>

kekuasaan diantara pemimpin politiknya. Selama 8 tahun terakhir pemerintah Nepal sudah berganti pemimpin sebanyak 8 kali. Pergantian pemimpin yang terjadi berulang-ulang berdampak pada pertumbuhan dan perekonomian negara. Hingga saat ini tidak ada tanda-tanda politik di Nepal akan stabil.⁵⁰ Jauh sebelum hal ini terjadi AS telah mengancam Nepal untuk memotong bantuan militer maupun bantuan kemanusiaan yang diberikan ke Nepal jika Nepal tidak kembali pada sistem pemerintahan yang demokratis.⁵¹ Namun, saat ini walaupun pemerintahan Nepal belum stabil, Nepal telah memberlakukan sistem yang lebih demokratis. Sehingga tidak mempengaruhi AS dalam memberi bantuan ke Nepal.

Dari sub-variabel ini didapat bahwa kondisi domestik negara Nepal cukup mempengaruhi bantuan kemanusiaan AS, korupsi di pemerintahan tidak menjadi faktor yang mempengaruhi berkurangnya bantuan yang diberikan AS walaupun negara lain mengancam untuk mengurangi bantuan ke Nepal, namun ketidak stabilan politik yang terjadi di Nepal saat ini juga tidak menjadikan faktor AS mengurangi bantuan kemanusiaannya. Berbeda dengan beberapa tahun lalu dimana AS mengancam untuk mengurangi jumlah bantuannya karena mempertanyakan sistem demokrasi di Nepal.

2.3.2 Nonpolitical Factors

2.3.2.1 Type of Disasters

Pada tanggal 25 April tahun 2015 Nepal mengalami gempa. Tipe bencana yang terjadi di Nepal ini merupakan bencana alam. Gempa yang terjadi di

⁵⁰ “Nepal’s unending political instability”.TheDiplomat. diakses pada 8 Juni 2017.
<http://thediplomat.com/2016/07/nepals-unending-political-instability/>

⁵¹ “U.S. Warns Nepal of Aid Freeze”.Dawn. diakses pada 8 Agustus 2017.
<https://www.dawn.com/news/383033>.

Nepal ini merupakan hasil dari tumbukan 2 lempeng benua India dan lempeng Eurasia. Pusat gempa Nepal yang berkekuatan 8,7 skala rikter ini berada dalam kedalaman 15km, dan pergeseran 3m.⁵² Selain Kathmandu gempa ini terasa hingga India, Pakistan dan Bangladesh. Bencana gempa ini merupakan bencana gempa terburuk selama 80 tahun terakhir di Nepal yang sebelumnya terjadi pada tahun 1934 yang meluluh lantahkan Kathmandu.⁵³ Gempa bumi ini menelan korban jiwa sekitar 8000 orang dan 2.2000 orang mengalami cedera parah maupun ringan. Tidak hanya sampai disitu, sekitar 700.000 tempat tinggal hancur akibat gempa ini.⁵⁴

Akibat besarnya dampak yang sangat besar dan merugikan ini AS memberi Nepal bantuan kemanusiaan. Sebelumnya AS telah memberikan bantuan pembangunan ke Nepal, namun AS juga memberikan bantuan kemanusiaan paska gempa yang terjadi dan faktor besarnya bencana ini juga mempengaruhi AS untuk memberi bantuan kemanusiaan ini.

⁵² "The science behind Nepal earthquake". Earthsky. Diakses pada 8 Juni 2017. <http://earthsky.org/earth/the-science-behind-the-nepal-earthquake>

⁵³ "*Nepal Earthquake: Rescue Effort Intensifies*". *Op.Cit.*

⁵⁴ "Quick fact: What do you need to know about the nepal earthquake". MercyCorps. diakses pada 8 Juni 2017. <https://www.mercycorps.org/articles/nepal/quick-facts-what-you-need-know-about-nepal-earthquake>

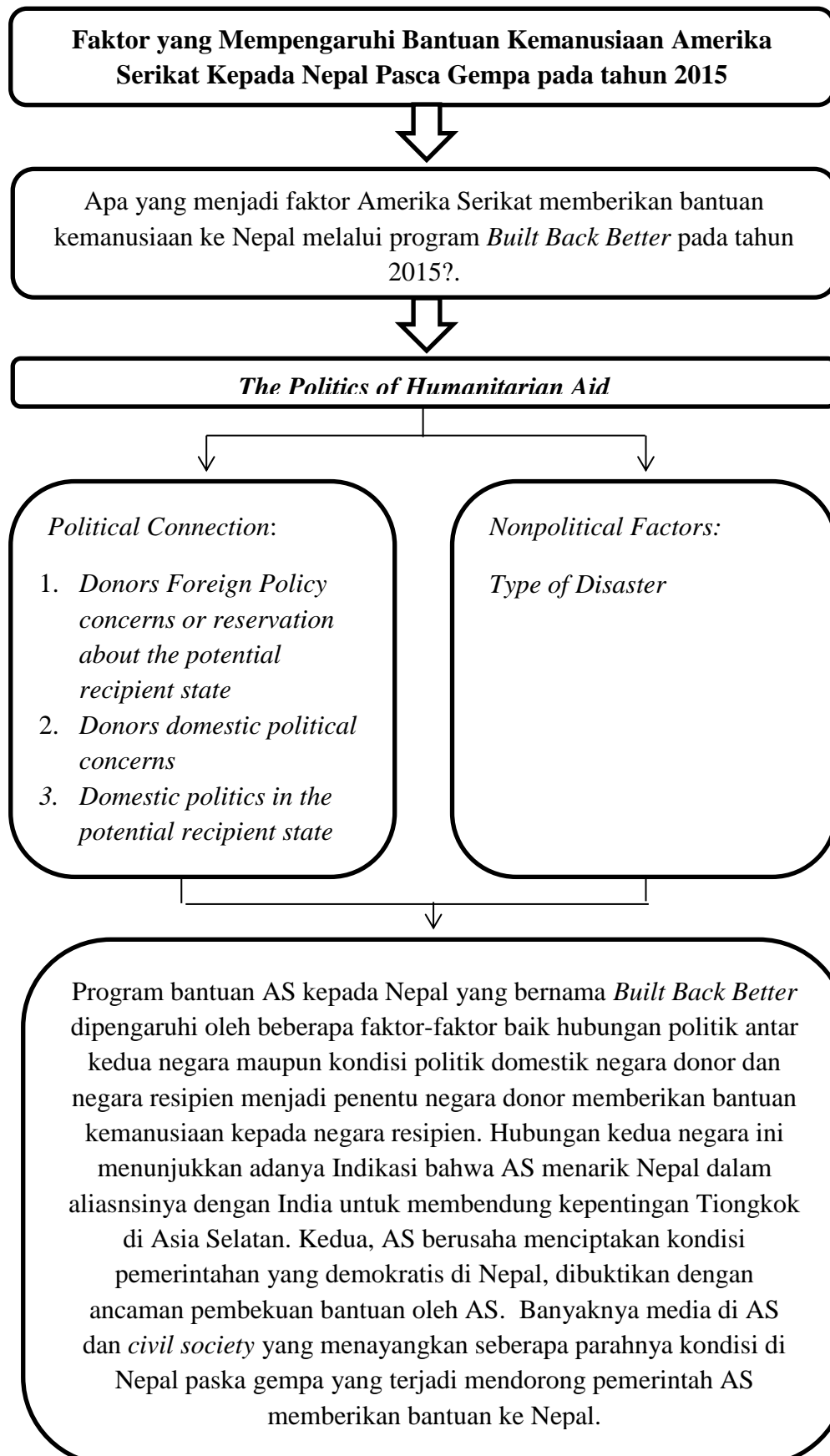
Tabel 2.1. Operasionalisasi Konsep *The Politics of Humanitarian Aid*

Variabel	Sub-Variabel	Indikator	Operasionalisasi
<i>Political Connection</i>	<i>Donors Foreign Policy Concerns or Reservations about The Potepotential Recipient State</i>	<i>Alliances with recipient's state</i>	Adanya indikasi AS mendekati Nepal dalam aliansi dengan India sebagai bentuk usaha membendung kepentingan Tiongkok di Asia Selatan.
		<i>Recipient's regime type</i>	Nepal adalah negara yang demokratis, sejalan dengan AS yang merupakan liberal dan demokratis. AS sangat peduli terhadap tipe rezim yang dianut negara resipiennya. Karena sering kali AS membuat bantuan sebagai alat mengganti tipe rezim suatu negara.
		<i>Recipient's level of development</i>	Nepal merupakan negara miskin dan belum berkembang dengan tingkat GDP hanya 20 Milyar USD. Nepal belum bisa menanggulangi dampak gempa dengan kemampuan negaranya.
	<i>Donor's domestic political concerns</i>	<i>Donor's current budget deficit</i>	Pada tahun 2015 AS mengalami penurunan angka defisit hingga pada tingkat 3% dari GDP yang sebelumnya pada tahun 2014 berada pada tingkat 4% dari GDP. Hal ini berjalan lurus dengan bertambahnya jumlah bantuan luar negerinya ke Nepal yang bertambah sekitar 30 juta Dollar.

		<i>The Salience of the disaster</i>	Media AS banyak menyoroti bencana gempa Nepal, baik siaran berita dan laman berita. Serta <i>civil society</i> yang mendorong pemberian bantuan.
		<i>Current donor disaster (severity of donor disaster)</i>	AS merupakan negara yang sering terkena bencana alam baik angin topan, perubahan cuaca, banjir, kebakaran dan beberapa bencana yang disebabkan manusia ini meningkatkan rasa empati AS ke Nepal
	<i>Domestic politics within the potential recipient state</i>	<i>Recipient's level of corruption</i>	Tingkat korupsi di nepal masih tinggi tidak membuat AS memotong jumlah bantuan
		<i>Recipient's political fractiousness</i>	Walaupun keadaan politik domestik di Nepal masih belum stabil dengan adanya perebutan kekuasaan AS tetap memberikan bantuan kemanusiaannya
<i>Nonpolitical Factor</i>	<i>Type of Disaster</i>	<i>Control for the type of disaster</i>	Dampak Gempa Nepal yang sangat parah dan menimbulkan korban ribuan jiwa membuat AS memberikan bantuan dana yang cukup besar bagi Nepal

Sumber: Konsep *The Politics of Humanitarian Aid* dari jurnal A. Cooper Drury, Richard Stuart Olson, dan Douglas A. Van Belle. *The Politics of Humanitarian Aid: U.S Foreign Disaster Assistance, 1964-1995*. 1995

2.5 Alur Pemikiran



2.5 Argumen Utama

Kebijakan bantuan kemanusiaan AS kepada Nepal paska gempa yang terjadi pada tanggal 2015, melalui program *Built Back Better* didorong beberapa faktor politik. Hal ini ditunjukan dari kondisi hubungan politik negara donor dengan resipien, maupun kondisi politik dari dalam negeri negara donor dan dalam negeri negara resipien.

Hubungan kedua negara ini menunjukkan adanya Indikasi bahwa AS menarik Nepal dalam aliasnsinya dengan India untuk membendung kepentingan Tiongkok di Asia Selatan. Kedua, AS berusaha menciptakan kondisi pemerintahan yang demokratis di Nepal, dibuktikan dengan ancaman pembekuan bantuan oleh AS. Faktor domestik AS juga mendorong AS memberikan bantuan, di tunjukan dengan banyaknya media di AS yang menayangkan seberapa parahnya kondisi di Nepal paska gempa yang selain itu di sertai dengan dorongan *civil society* yang sangat peduli dengan kondisi di Nepal yang akan mendorong pemerintah AS memberikan bantuan ke Nepal. Terakhir adalah faktor nonpolitik yang mempengaruhi pemberian bantuan AS adalah dampak gempa yang sangat parah yang meningkatkan rasa empati AS untuk memberikan bantuan ke Nepal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian Deskriptif. Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan kenyataan. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang tidak melakukan eksperimen.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan memiliki ruang lingkup pada tahun 2015. Ruang lingkup ini penulis pilih karena pada tahun tersebut terjadi gempa besar di Nepal. Amerika Serikat sebagai negara maju memberikan bantuan kemanusiaan ke Nepal dengan program “*Built Back Better*”.

3.3 Teknik Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan teknik penelitian kajian pustaka, penulis menggunakan literatur yang berhubungan dan membantu penulis meneliti studi kasus yang penulis ambil.

3.4 Jenis Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data ini penulis peroleh melalui kajian pustaka. Data ini menjadi bahan utama yang digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah yang penulis buat. Sumber data-data ini merupakan sumber terpercaya dari buku, jurnal, situs

berita, sehingga data-data ini dapat dipertanggung jawabkan dan bisa menjadi dasar penelitian.

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang penulis lakukan adalah analisa data kualitatif. Dimana penulis akan menganalisa artikel, literatur, studi-studi terdahulu, dan pemberitaan media untuk menganalisa kasus yang penulis angkat.

3.6 Sistematik Penulisan

BAB I

Bab ini berisi latar belakang penelitian rumusan masalah tujuan penelitian, serta manfaat penelitian yang dilakukan penulis. Pada bagian latar belakang penulis menjelaskan secara garis besar studi kasus yang penulis teliti dan sehingga memunculkan rumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini.

BAB II

Bab ini berisi kerangka pemikiran yang penulis lakukan, antara lain studi terdahulu yang berfungsi sebagai alat pembanding, kerangka konseptual dan operasinalisasi konsep yang digunakan untuk meneliti studi kasus yang penulis bahas, serta argument utama yang merupakan hipotesis yang penulis buat.

BAB III

Bab ini berisi metode penelitian yaitu jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan penelitian yang penulis lakukan.

BAB IV

Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian yang penulis ambil yaitu bantuan kemanusiaan yang diberikan Amerika Serikat kepada Nepal dalam mengatasi dampak gempa Nepal tahun 2015 dari segi karakteristik, mekanisme, dan jumlah bantuan yang diberikan.

BAB V

Bab merupakan analisis menggunakan variabel dan indikator dari konsep *The Politics of Humanitarian Aid*. sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dimunculkan terkait pemberian bantuan kemanusiaan Amerika Serikat pada bencana gempa Nepal tahun 2015.

BAB VI

Bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan serta saran yang penulis buat terkait dengan studi kasus yang penulis teliti.

BAB IV

BANTUAN KEMANUSIAAN AMERIKA SERIKAT PASKA GEMPA DI NEPAL TAHUN 2015

Penulis akan menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian yang diteliti yaitu bantuan luar negeri Amerika Serikat dalam bantuannya kepada Nepal paska gempa tahun 2015. Penulis akan menggambarkan secara umum mengenai bantuan tersebut dengan, yang pertama adalah menjelaskan profil dari *USAid* yang akan menunjukkan posisi *USAid* dalam pemerintahan Amerika Serikat beserta kepentingan-kepentingan di belakang institusi ini. Selain itu penulis akan menjelaskan hubungan bantuan luar negeri dari Amerika Serikat pada Nepal, termasuk yang penulis teliti yaitu bantuan kemanusiaan Amerika Serikat pada Nepal paska gempa tahun 2015.

4.1 Sejarah Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat ke Nepal

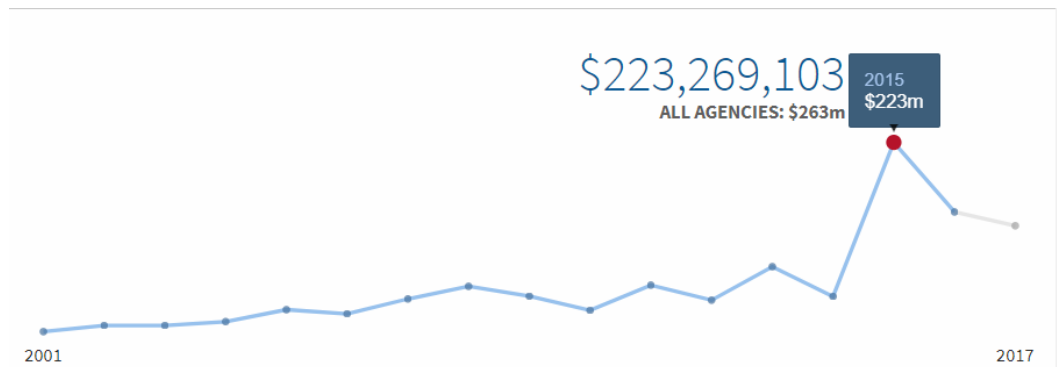
AS dengan Nepal telah lama memiliki hubungan bantuan luar negeri yang baik, sejak tahun 1951 AS dan Nepal menandatangani *Assistance Agreement*.¹ Sejak itu AS menjadi negara yang selalu berkontribusi dalam kesuksesan pembangunan negara Nepal. Contohnya adalah pembangunan infrastruktur pertama di Nepal, pemasangan pesawat telepon di Nepal, Membasmi wabah malaria di Nepal, dan lain sebagainya.²

¹ 'History'. *USAid.gov*. Diakses pada tanggal 5 Desember 2017.
<https://www.usaid.gov/nepal/history>

² *Ibid*.

Banyaknya bantuan AS ke Nepal sifatnya fluktuatif. Dalam memberikan bantuan AS memberikan dengan jumlah yang naik-turun dari tahun ke tahun.

Gambar 4.1 Bantuan luar negeri AS ke Nepal Tahun 2001-2016



Sumber: Foreign Aid Explorer USAid

Jumlah bantuan ini adalah jumlah keseluruhan bantuan yang diberikan Amerika ke Nepal. Data ini penulis sajikan untuk menunjukkan hubungan bantuan AS dan Nepal secara umum.

Dalam menjaga program bantuan yang berjalan dalam sebuah negara, USAID memiliki *Evaluation Policy* yaitu sebuah *policy* yang dibuat untuk meniai seberapa efektif sebuah program bantuan diberikan.³ *Evaluation Policy* USAID dibentuk pada tahun 2011 namun saat ini telah disesuaikan dengan Foreign Aid Transparency and Accountability Act yang ditandatangani dalam hukum pada Juli 2016.⁴ Sejak diterbitkannya *Evaluation Policy* ini telah ada lebih dari 1000 evaluasi, lebih dari 2600 training evaluasi, meningkatkan kualitas evaluasi dengan memastikan perencanaan, implementasi dengan metode terbaik, dan melaporkan

³ USAID Evaluation Policy. Washington DC:2011 *Updated* 2016.

⁴ "Evaluation".USAID.gov. diakses pada tanggal 2 Januari 2018.
<https://www.usaid.gov/evaluation>.

secara transparan berkaitan dengan proses evaluasi, serta memperkuat program monitoring sehingga evaluasi bisa fokus mendalami program bantuan yang berjalan.⁵

4.2 Karakteristik Bantuan Kemanusiaan Amerika Serikat

AS pada masa paska berakhirnya perang dunia 2 menjadi negara yang kerap memberikan bantuan luar negeri, bahkan bentuk bantuan luar negeri saat ini merupakan hasil dari Marshall Plan yang merupakan program bantuan AS ke negara-negara Eropa untuk membangun kembali infrastruktur, meningkatkan perekonomian, dan menciptakan stabilitas regional.⁶

Pada masa presiden Truman terdapat 2 tujuan AS dalam memberikan bantuan luar negeri yaitu untuk menciptakan pasar untuk AS dengan alasan akan mengurangi kemiskinan dengan menciptakan produksi di negara berkembang, selain itu untuk memerangi komunisme dengan menanamkan anggapan kesejahteraan melalui kapitalisme.⁷ Seiring berkembangnya bantuan luar negeri AS, pada tahun 1980an bantuan AS berfokus pada stabilitas mata uang dan sistem finansial. Sekaligus AS menggalakan bantuan rekonstruksi pasar untuk kepentingan peningkatan ekonomi.⁸

Pada tahun 1990an bantuan AS memiliki tren untuk melakukan pembangunan berkelanjutan, sekaligus mempromosikan demokrasi. Seperti pada tahun 1989 dimana AS sangat berperan dalam pemersatuan Jerman, Bantuan AS

⁵ *Ibid.*

⁶ "USAID History".USAID.gov. Diakses pada tanggal 2 Januari 2018. <https://www.usaid.gov/who-we-are/usaid-history>.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

lalu masuk dan menciptakan kondisi demokratis dengan sistem ekonomi pasar terbuka.⁹ Hingga pada tahun 2000an AS memiliki tren untuk perang dan membangun kembali negara yang terkena dampak perang tersebut. Contohnya di Afganistan dan Irak dimana bantuan AS masuk untuk membenahi sistem pemerintahan dan menciptakan pasar bebas untuk meningkatkan perekonomiannya.¹⁰

Dari sejarah tren pemberian bantuan USAID di masa-masa pembentukan hingga saat ini bisa dilihat bahwa AS memiliki *ideas* yang condong mengarah ke *Right* karena banyak kepentingan AS yang berkaitan dengan politik maupun ekonomi. Hal ini dilihat dari bantuan AS yang bersifat Demokratisasi, dan *market based*, AS selalu masuk dan berusaha membuka pasar bebas dengan alasan untuk meningkatkan perekonomian dan menciptakan pemerintahan yang demokratis dengan alasan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahterah.

Arti dari *ideas* disini adalah nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dalam sebuah negara, berkaitan dengan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang pantas dan apa yang tidak pantas.¹¹ Nilai-nilai dalam sebuah masyarakat ini disebut sebagai karakteristik bantuan karena merupakan produk dari masyarakat yang berbeda-beda di setiap negara.¹²

AS merupakan negara Federal, dan bersistem presidensial, dimana terdapat 3 pilar utama didalam pemerintahannya yaitu legislatif, eksekutif, dan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Lancaster, Carol. Chapter 1. *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*. University of Chicago, 2007. Hlm. 18

¹² *Ibid.*

yudikatif.¹³ Eksekutif terdiri Presiden yang berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Wakil Presiden yang akan berperan sebagai Presiden ketika Presiden tidak mampu melayani lagi, dan jajaran Kabinet yang akan menjadi penasehat yang dipilih langsung oleh Presiden dan harus disetujui 51% senat. Eksekutif bertugas untuk melaksanakan undang-undang.¹⁴

Legislatif terdiri dari Senat dan *House of Representatives*. Senat dipilih sebanyak 2 dari setiap negara bagian dan total ada 100 Senator di pemerintahan AS. *House of Representatives* berjumlah 435 orang terpilih, yang dibagi dari 50 negara bagian dan porsi tiap negara bagian bergantung pada populasi di negara bagian tersebut. *Representatives* bertugas selama 2 tahun. Tugas dari Legislatif adalah menyusun undang-undang.¹⁵ Yudikatif terdiri dari *Supreme Court* dan *Federal Court* yang lain Yudikatif bertugas untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan memberikan sanksi kepada pelanggar undang-undang. Yudikatif merupakan pilar yang akan mewujudkan check and balance dalam pemerintahan. Karena Supreme Court tidak bisa dibayangi kekuasaan lain.¹⁶

Pada tahun 2015 pada saat terjadinya gempa di Nepal, Presiden AS terpilih adalah Barrack Obama. Pada masa pemerintahan Obama sejak tahun 2008 terjadi peningkatan jumlah anggaran bantuan AS dari pemerintahan sebelumnya.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa pada periode pemerintahan Presiden Barrack Obama AS peduli terhadap bantuan luar negeri. Institusi ini dilihat dari 3 aspek yaitu

¹³ "Branches of Government" .usa.gov. Diakses pada tanggal 2 Januari 2018.
<https://www.usa.gov/branches-of-government>.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ "Aid-Trends".Explore.usaid.gov. Diakses pada tanggal 2 Januari 2018.
<https://explorer.usaid.gov/aid-trends.html>

sistem pemilihan, sistem pemerintahan, peran pemerintah daerah, serta entitas publik lain, untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh pemerintah terpilih dalam memberikan bantuan luar negerinya.¹⁸

AS juga adalah negara dengan peringkat 2 tujuan ekspor Nepal.¹⁹ Nilai ekspor Nepal ke AS mencapai 70 juta USD pada tahun 2015 yang didominasi dengan barang-barang konsumsi dan tekstil hingga 60 juta USD.²⁰ Selain itu di AS terdapat banyak *Nepalese civil society* dimana mereka juga berpengaruh terhadap hubungan AS dengan Nepal. Terdapat sekitar 80 *Nepalese civil society* yang tersebar di seluruh wilayah AS.²¹ kelompok kepentingan dipandang sebagai kekuatan yang sangat berpengaruh dalam politik, terutama dalam negara yang memiliki sumber daya publik yang besar.²²

Sejalan dengan ini bantuan luar negeri juga digunakan sebagai sarana sebuah negara mengeluarkan kekayaan mereka baik bahan baku pangan, kekayaan intelektual, maupun kebijakan yang dibuat. *Interest* sendiri dibagi menjadi tiga yaitu yang pertama adalah untuk kepentingan komersil dibalik bantuan yang pada akhirnya bantuan luar negeri akan berujung pada hubungan ekspor impor negara baik bahan pangan, teknologi, infrastruktur, dan lain sebagainya.²³ Kedua, adanya NGOs dan kelompok-kelompok tertentu yang pro terhadap bantuan, maupun

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ "Nepal Trade at a Glance: Most Recent Values". Wits.worldbank.org. diakses pada 2 Januari 2018. <https://wits.worldbank.org/CountrySnapshot/en/NPL> .

²⁰ "Nepal Product Export US\$ Thousand". Wits.worldbank.org. diakses pada 2 Januari 2018. <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/NPL/StartYear/2012/EndYear/2016/TradeFlow/Export/Indicator/XPRT-TRD-VL/Partner/USA/Product/All-Groups>.

²¹ "Nepalese Organization". Nepalicount.com. diakses pada 2 Januari 2018. <https://nepalcount.com/nepalese-organizations.html>.

²² Lancaster, Carol. Op. Cit. Hlm 21.

²³ *Ibid.*

tujuan-tujuan lain.²⁴ Dan yang ketiga adalah kelompok dengan kesamaan etnis, agama, dan lain sebagainya yang mendukung pemberian bantuan.²⁵

USAID adalah agensi pemerintah AS dalam mengelola pemberian bantuan luar negeri, yang produk dari pemerintah AS pada tahun 1961 dimana sejak di tanda tangani Foreign Assistance Act pada hukum oleh Presiden Kennedy.²⁶ USAID menjadi instrument utama pemerintah AS untuk mengakhiri kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang demokratis dan meningkatkan potensi mereka.²⁷ Dalam memberikan bantuan luar negeri USAID selalu memiliki 2 tujuan, selain bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di negara berkembang. USAID menjalankan *U.S. Foreign Policy* dengan mempromosikan stabilitas, masyarakat yang bebas, dan menciptakan pasar dan kerjasama dengan negara resipien.²⁸ USAID sendiri telah bekerja di lebih dari 100 negara dan salah satunya adalah untuk memberikan bantuan kemanusiaan dalam bencana alam maupun bencana yang di ciptakan manusia.²⁹

USAID juga bekerja sama dengan lebih dari 4000 organisasi diluar pemerintah di lebih dari 100 negara, dengan berbagai macam bentuk bantuan dan bekerja di berbagai macam sektor bantuan.³⁰ *Organization* juga menunjukkan karakteristik bantuan sebuah negara, aspek ini didefinisikan dengan bagaimana pemerintah menciptakan organisasi pengelola bantuan luar negeri dan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ "USAID History". USAID.gov. diakses pada 2 Januari 2018. <https://www.usaid.gov/who-we-are/usaid-history>.

²⁷ "Who We Are". USAID.gov. diakses pada 2 Januari 2018. <https://www.usaid.gov/who-we-are>.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ "USAID Partners". USAID.gov. diakses pada 3 Januari 2018. <https://www.usaid.gov/work-usaid/resources-for-partners/usaid-partners>.

bekerjasama secara baik bersama agensi-agensi bantuan lain yang tidak berhubungan dengan pemerintah.³¹

4.3 Kondisi Paska Bencana Banjir di Nepal

Nepal merupakan negara yang terletak di Asia Selatan yang merupakan negara *Landlocked* antara India dan Tiongkok. Populasi di Nepal sebanyak 29,384,297 jiwa dan terdiri dari beberapa etnis masyarakat. Agama mayoritas di Nepal adalah agama hindu. Bentuk negara Nepal adalah negara federal dengan terbagi menjadi 7 bagian provinsi.³² Pada Juli tahun 2015, Nepal mengalami bencana gempa yang sangat besar dengan kekuatan mencapai 7,8 skala Rikter tepatnya di antara Khatmandu dan Pokhara dan menjadi bencana gempa terparah selama 80 tahun terakhir.³³ Terdapat sekitar 8.891 orang yang meninggal, dan lebih dari 22.300 terluka, selain itu kerugian materil baik rumah maupun sekolah, rumah sakit, dan bangunan-bangunan bersejarah yang mencapai sekitar 893.000 bangunan.³⁴

Gempa ini juga mengakibatkan Nepal mengalami kerugian yang sangat mendalam bagi pemerintah juga msyarakatnya, karena kerugian dari gempa ini Nepal membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kembali bangkit dengan kerugian biaya yang diperkirakan mencapai 10 Milyar USD dimana merupakan setengah dari GDP Nepal itu sendiri yang hanya 20 Milyar USD.³⁵ Selain itu sektor pariwisata Nepal yang merupakan sumber pendapatan Nepal yang cukup

³¹ Lancaster, Carol. Op.Cit. Hlm 22.

³² "Nepal". World Factbook.. Loc. Cit.

³³ "Nepal earthquake: Rescue effort intensifies".Loc. Cit.

³⁴ "Nepal earthquake Appeal".Loc.Cit.

³⁵ "Economic Impact of Nepal Earthquake".Loc.Cit.

besar juga harus mengalami kerugian karena banyak situs-situs keagamaan dan bangunan bersejarah yang pada tahun 2014 mendatangkan sekitar 800.000 turis yang hancur dan rusak parah akibat bencana ini.³⁶ Gempa Ini bisa dibilang bencana yang sangat besar karena tidak hanya terasa di wilayah Nepal saja namun juga terasa hingga wilayah Pakistan, Banglades, India dan hingga sekitar pegunungan Everest.³⁷

Gempa di Nepal sangat merugikan sektor jasa dan manufaktur yang merupakan tingkat pertama dalam menyumbang GDP di Nepal, yaitu mencapai angka 50,68% GDP pada tahun 2014.³⁸ Kerugian di sektor manufaktur ini tidak hanya merugikan Nepal sebagai negara namun juga perusahaan asing yang berinvestasi di Nepal. Banyak sekali perusahaan-perusahaan Asia dan Internasional yang berinvestasi di Nepal contohnya Coca-Cola. perusahaan-perusahaan tersebut mengalami gangguan dalam produksi mereka karena pabrik mereka dievakuasi tanpa adanya kejelasan batas waktu hingga laporan structural selesai disusun.³⁹

4.5 Program bantuan Kemanusiaan *Built Back Better* Amerika Serikat ke Nepal

Paska terjadinya gempa bumi di Nepal pada April tahun 2015. Nepal langsung mengeluarkan deklarasi kondisi emergensi dan secara resmi meminta bantuan internasional. Pemerintah Nepal juga langsung mengeluarkan tim medis

³⁶ *Ibid.*

³⁷ "Nepal earthquake: Rescue effort intensifies".Loc.Clt.

³⁸ "Nepal Distribution of Gross Domestic Product (GDP) Across Economic Sectors From 2005 to 2015".Statista.com. <https://www.statista.com/statistics/425750/nepal-gdp-distribution-across-economic-sectors/>.

³⁹ "Nepal's Economy Will Take Years to Recover From the Deadly Earthquake".Time.com. <http://time.com/3837817/nepal-earthquake-economic-business-financial-impact/>.

ke daerah yang paling parah terkena dampak gempa.⁴⁰ AS sendiri melalui USAID langsung merespon panggilan emergensi yang dikeluarkan oleh pemerintah Nepal. Pada tanggal 25 April tepat setelah deklarasi emergensi pemerintah Nepal, USAID mengirimkan tim DART yang beranggotakan 54 orang spesialis *humanitarian aid* sekaligus memberikan dana langsung sebesar 1 juta USD untuk keperluan emergensi di daerah bencana.⁴¹ USAID juga membantu dengan cara memperkuat kapasitas respon terhadap gempa dengan berkoordinasi dengan pemerintah, NGOs, sekolah, dan komunitas lokal.⁴²

Pada tanggal 27 April 2015, USAID menambahkan bantuan sebesar 9 juta USD untuk meresponi dan upaya pembenahan Nepal dari gempa. dengan total bantuan hingga tanggal 27 April adalah sebesar 10 juta USD, dana tersebut adalah untuk keperluan penyelamatan nyawa yaitu *search and rescue effort*, membangun *emergency shelter* dan untuk keperluan emergensi lain.⁴³ Pada tanggal 29 April 2015, dengan bantuan dana USAID organisasi *Save the Children* telah mendistribusikan 204 *shelter kits* dimana setiap *shelter kits* tersebut akan membantu 5 orang. USAID juga mengirimkan 700 gulung tempat tidur plastik yang diperkirakan akan mencukupi kebutuhan 35.000 orang. Selain itu untuk memenuhi krisis pangan yang terjadi di Nepal USAID memberikan dana sebesar

⁴⁰ "Nepal Earthquake-factsheet #1".USAID.gov. diakses pada 2 januari 2018.
<https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/04.25.15-USAID-DCHANepalEarthquakeFactSheet1.pdf>.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ "Nepal Earthquake-factsheet #2".USAID.gov. diakses pada 2 januari 2018.
<https://www.usaid.gov/nepal-earthquake/fy15/fs02>.

2,5 juta USD untuk mengadakan beras sebanyak 1390 metrik ton bagi sekitar 120.000 orang selama 1 bulan.⁴⁴

Pada tanggal 3 Mei, 5 pesawat militer AS sampai ke Khatmandu untuk membantu pemerintah dan respon internasional. Pesawat ini digunakan untuk transportasi personel-personel humaniter, dan mengirimkan barang-barang penting terkait bantuan, serta memobilisasi korban yang ada di sekitaran pegunungan yang terkena dampak gempa yang akses jalannya susah dilalui dari darat.⁴⁵ Pada tanggal 5 Mei *Acting Administrator* USAID Alfonso E. Lenhardt mengumumkan penambahan dana bantuan ke Nepal sebesar 11 juta USD. Dana ini akan digunakan untuk mendanai *shelter*, peralatan medis, dan *Hygiene Kits* bagi korban gempa.⁴⁶

Tanggal 8 Mei 2015 tim penyelamat dari USAID maupun negara lain telah mencapai 39 distrik dari 75 distrik yang terkena dampak bencana gempa. sehingga semakin banyak korban ditemukan baik yang menjadi korban jiwa maupun terluka dan kehilangan tempat tinggal. Pada tanggal 15 Mei USAID menambah kan sebanyak 1.820 gulung Kasur plastik untuk memenuhi kebutuhan korban-korban bencana gempa.⁴⁷ Pada tanggal 19 mei 2015 USAID menambahkan bantuan sebesar 9 juta USD. Dana baru ini akan digunakan untuk menambah perlengkapan penyelamatan, material untuk *emergency shelters*,

⁴⁴ "Nepal Earthquake-Factsheet #3".USAID.gov. diakses pada 2 januari 2018.
<https://www.usaid.gov/nepal-earthquake/fy15/fs04>.

⁴⁵ "Nepal Earthquake-Factsheet #7".USAID.Gov. Diakses pada 2 januari 2018.
<https://www.usaid.gov/nepal-earthquake/fy15/fs07>.

⁴⁶ "Nepal Earthquake-factsheet #9".USAID.Gov. diakses pada 2 Januari 2018.
<https://www.usaid.gov/nepal-earthquake/fy15/fs09>.

⁴⁷ "Nepal Earthquake-factsheet #13".USAID.Gov. Diakses pada 2 Januari 2018.
<https://www.usaid.gov/nepal-earthquake/fy15/fs13>.

Hygiene Kits, dan air layak minum. Selain itu dana tersebut akan digunakan untuk menambah program perlindungan dan rehabilitasi psikologi pada korban.⁴⁸

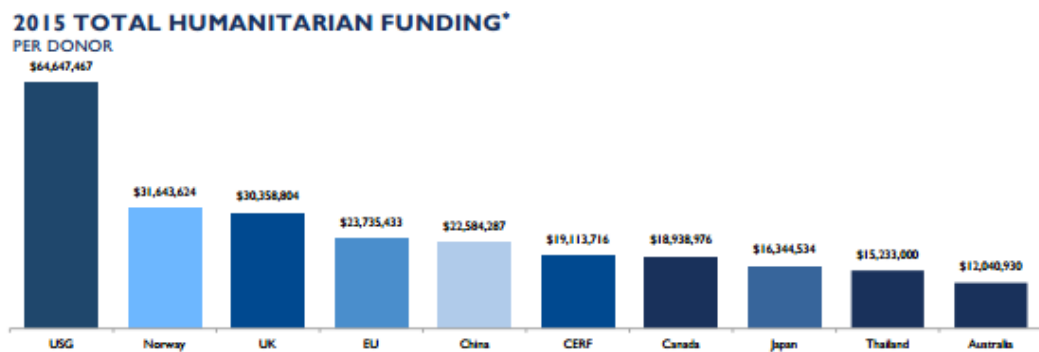
Pada tanggal 25 Juni 2015, sekretaris AS John Kerry menyatakan bahwa AS akan memberikan bantuan sebesar 130 Juta untuk membangun kembali Nepal. Dana ini akan digunakan dalam berbagai hal antara lain adalah untuk melatih masyarakat Nepal untuk membangun rumah yang lebih stabil terhadap gempa, membuat ruang belajar sementara untuk anak-anak di Nepal, membantu setiap orang dengan memberikan dana bantuan untuk membangun kembali kehidupan mereka. Serta memperkuat sektor agrikultur yang merupakan sumber perekonomian dari sekitar 75% populasi Nepal. Dana tersebut juga digunakan untuk mendanai dibuatnya institusi yang akan merespon secara efektif pada bencana-bencana selanjutnya yang akan datang.⁴⁹ Selain itu USAID juga mendanai media masa yaitu British Broadcasting Corporation sebesar 200 ribu USD untuk menciptakan program siaran ke 14 distrik paling parah terkena dampak bencana. Program ini akan berisi informasi bagaimana cara untuk mendapat akses bantuan baik *shelters*, air, sanitasi, dan *hygiene service*.⁵⁰

⁴⁸ "Nepal Earthquake-factsheet #15".USAID.Gov. Diakses pada 2 Januari 2018.
<https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/05.20.15-USAID-DCHANepalEarthquakeFactSheet15.pdf>.

⁴⁹ "U.S. Announce \$130 Million Contribution to Nepal to 'Build Back Better'".USAID.gov. diakses pada tanggal 2 Januari 2018.
<https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/2015%20Nepal%20Donors%20Conference%20Fact%20Sheet.pdf>.

⁵⁰ "Nepal Earthquake-factsheet #15".USAID.Gov. Diakses pada 2 Januari 2018.
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/nepal_eq_fs21_06-25-2015.pdf.

Gambar 4.2 Total bantuan kemanusiaan menurut donor



Sumber: <https://www.usaid.gov/nepal-earthquake/fy15/fs23>

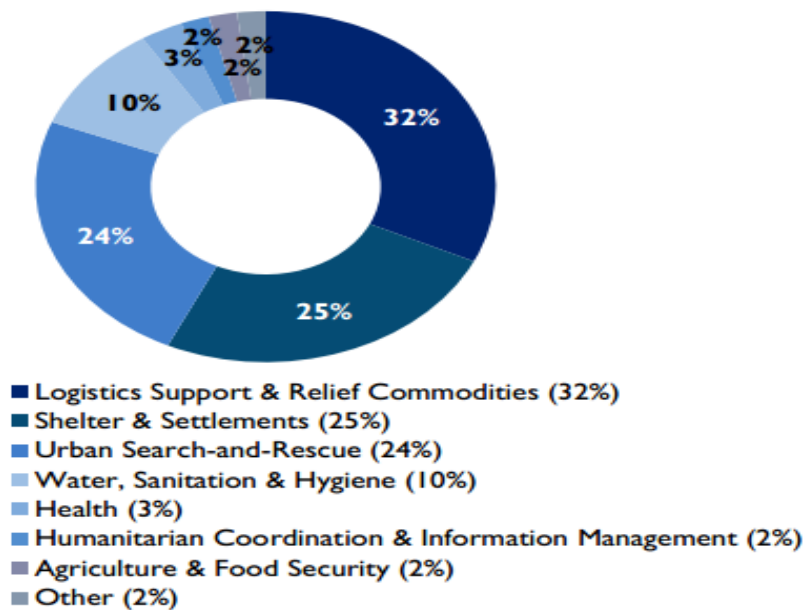
Gambar diatas menunjukkan banyaknya bantuan kemanusiaan yang diberikan negara-negara donor kepada Nepal hingga bulan Desember tahun 2015. Data tersebut menunjukkan bahwa bantuan kemanusiaan yang diberikan AS menjadi sumber bantuan terbanyak yang didapatkan Nepal dengan angka 64.075.408 USD . jumlah ini merupakan jumlah total bantuan yang telah di terima Nepal paska gempa terjadi.⁵¹ Bantuan tersebut dialokasikan dalam pembagian 32% untuk komoditas dan logistik, 25% untuk *Shelters*, 24% untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, 10% untuk air, sanitasi dan kebersihan, 3% untuk kesehatan, 2% untuk manajemen informasi dan koordinasi kemanusiaan, 2% untuk keamanan pangan, dan 2% lainnya untuk keperluan lain yang sehubungan dengan dampak gempa yang terjadi.⁵²

⁵¹ "Nepal Earthquake-factsheet #1 (FY 2016)".USAID.Gov. diakses pada 9 Januari 2018.
<https://www.usaid.gov/nepal-earthquake/fy16/fs01>.

⁵² *ibid.*

Gambar 4.3 Alokasi dana bantuan kemanusiaan AS

**USAID/OFDA¹ FUNDING
BY SECTOR IN FY 2015 & FY 2016**



Sumber: <https://www.usaid.gov/nepal-earthquake/fy15/fs23>

Pemberian bantuan kemanusiaan USAID baik berupa dana, *emergency shelters*, Kasur plastik, pangan, air bersih dan lain sebagainya termasuk dengan program-program pembangunan baik infrastruktur maupun tempat tinggal di Nepal juga disalurkan melalui NGOs yang ada.⁵³ Bantuan ini diberikan sesuai dengan kebutuhan yang bersifat emergensi ke berbagai sektor. Dari total bantuan USAID yang memiliki nilai bantuan tertinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, menunjukkan bahwa bantuan AS ke Nepal adalah bantuan yang sangat berarti dan AS sangat peduli terhadap Nepal.⁵⁴

⁵³ "Nepal Earthquake-factsheet #15".USAID.Gov.Loc. Cit.

⁵⁴ *Ibid.*

BAB V

ANALISIS FAKTOR POLITIK YANG MEMPENGARUHI BANTUAN KEMANUSIAAN AMERIKA SERIKAT KEPADA NEPAL PASKA GEMPA TAHUN 2015

Pada bab ini penulis akan mengaplikasikan konsep *The Politics of Humanitarian Aid* untuk meneliti kasus yang penulis angkat mengenai faktor politik yang mempengaruhi bantuan kemanusiaan Amerika Serikat kepada Nepal paska gempa tahun 2015. Sekaligus akan menjawab anomali yang penulis temukan dalam kasus ini yaitu mengapa Amerika Serikat memberikan bantuan yang cukup besar kepada Nepal yang merupakan negara kecil dan tidak terlalu berpengaruh untuk Amerika Serikat. Analisis yang dilakukan penulis akan mendiskripsikan sesuai dengan sistematika yang dimiliki konsep, serta menggunakan indikator-indikator yang ada pada konsep. Penulis akan menuliskan kesimpulan mengenai relevansi fakta terkait dengan data dan indikator yang ada pada konsep, yang mengartikan bahwa penulis akan menyimpulkan apakah indikator yang ada terbukti atau tidak dalam kasus ini.

5.1 *Political Connections*

Dalam pemberian bantuan kemanusiaan sangat mungkin terjadi Amerika Serikat mendasarkan pada hubungan politik yang terjalin dengan Nepal. Variabel berikut yang akan dibahas adalah aspek yang secara langsung berkaitan dengan hubungan politik antara negara donor dan negara resipien, yang menjadikan alasan negara donor memberikan bantuannya kepada negara resipien.

Political Connections memiliki 2 sub variable didalamnya, yakni *donor foreign policy concerns or reservations about the potential recipient state* dan *Donors Domestic Politics within the potential Recipient State*. Analisis yang penulis lakukan akan dilengkapi dengan indikator-indikator yang ada di dalam Variable tersebut.

5.1.1 Donor Foreign Policy Concerns or Reservations about The Potential Recipient State

Kepentingan negara donor di negara resipiennya bisa dilihat dari kebijakan luar negerinya di negara donor. Hal ini akan sangat mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan dari negara donor ke negara resipien. Berikut penulis akan menggunakan indikator-indikator yang bisa digunakan dalam menganalisis faktor-faktor politik yang dominan yang menjadi alasan AS memberikan bantuan kemanusiaan kepada Nepal pasca gempa tahun 2015.

5.1.1.1 Alliance with the recipient state

AS dan Nepal adalah 2 negara yang memiliki kedekatan cukup lama, mengingat Nepal pada masa awal menjadi sebuah negara sangat akrab dengan bantuan dari AS. Dimulai pada tahun 1951 AS dan Nepal menandatangani *Assistance Agreement*, yakni sebuah perjanjian antar kedua negara yang berisi kan bahwa AS akan membantu Nepal dalam mendirikan negara yang demokratis, dan mengurangi kemiskinan.¹ Bantuan yang diberikan AS tidak hanya pada level *high politics* saja namun AS juga membantu Nepal dalam pembangunan infrastruktur pertama, pemasangan pesawat telepon, membasmi wabah malaria dan bantuan-

¹"History".USAID.gov. Loc. Cit.

bantuan pembangunan yang lain.² Sejarah bantuan AS tersebut menunjukkan bahwa AS dengan Nepal sudah melakukan hubungan bilateral yang baik melalui bantuan pembangunan AS ke Nepal.

Meskipun sejarah hubungan AS dengan Nepal sudah cukup panjang, namun hubungan AS dengan Nepal tidak diimbangi dengan hubungan aliansi secara resmi diantara keduanya. Namun bukan berarti AS dan Nepal tidak melakukan hubungan aliansi. Kondisi geografis Nepal merupakan negara *Landlock* diantara 2 negara besar yaitu India dan Tiongkok. Walaupun Nepal berhubungan dengan kedua negara ini baik India dan Tiongkok, Nepal lebih memiliki kedekatan budaya, linguistik, agama, dan ekonomi dengan India, dibandingkan dengan Tiongkok.³ Perekonomian Nepal sendiri sangat bergantung pada India dimana India merupakan negara pemasok barang impor di Nepal dan merupakan pasar ekspor bagi Nepal.⁴

Gambar 5.1 Angka ekspor India ke Nepal 2012-2016



Sumber: <https://tradingeconomics.com/india/exports-to-nepal>

² *Ibid.*

³ Vaughn, Bruce. *Nepal: Background and U.S. Relations*. 2006. Hlm 16.

⁴ *Ibid.*

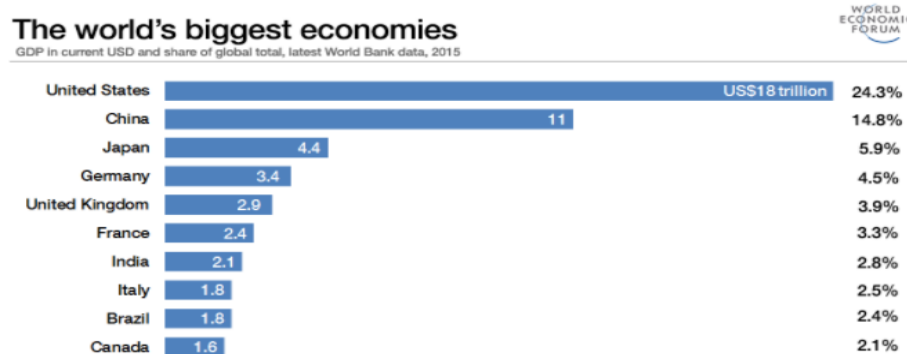
Gambar 5.2 Angka impor India dari Nepal 2008-2016



Sumber: <https://tradingeconomics.com/india/imports/nepal>

Tiongkok di sisi lain dalam beberapa dekade ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Tiongkok saat ini telah menjadi negara dengan tingkat perekonomian terbesar kedua di dunia.⁵ Hal ini menimbulkan banyak spekulasi bahwa Tiongkok akan menjadi negara *superpower* dan menimbulkan kecemasan pada pembuat kebijakan AS bahwa Tiongkok akan mengambil alih pasar dunia yang dipegang AS.⁶

Gambar 5.3 Negara GDP terbesar di dunia



sumber: <https://www.weforum.org/agenda/2017/03/worlds-biggest-economies-in-2017/>

⁵ Elwell, Craig K., Marc Labonte, Wayne M. Morrison. Is China a Threat to the U.S. Economy?, 2007.

⁶ *Ibid.*

Tiongkok menjadi negara dengan GDP terbesar kedua setelah AS dengan pertumbuhan yang cukup pesat mencapai 6,7% diakhir 2015, mengalahkan AS yang hanya bertumbuh sebanyak 1,6%.⁷ Tidak hanya itu Tiongkok juga mengalahkan India yang merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia dengan angka 6,6%.⁸ Tidak hanya sampai disitu studi oleh Price Waterhouse Cooper memperkirakan bahwa jika tingkat pertumbuhan Tiongkok tetap besar Tiongkok akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar pada tahun 2050, dan AS akan menjadi yang ketiga setelah India.⁹

Tiongkok sendiri pada periode akhir tahun 2013 mengumumkan mencanangkan rencana pembuatan proyek *One Belt One Road* yaitu sebuah jalur perdagangan Tiongkok yang akan menghubungkan jalur dagang Tiongkok dengan negara Asia, Timur Tengah dan Eropa.¹⁰ Menurut Charles Parton seorang mantan diplomat Uni Eropa untuk Tiongkok, pada dasarnya proyek ini adalah kebijakan domestik dengan pengaruh geostrategis yang besar, bukan merupakan kebijakan luar negeri. namun hal ini membuat Tiongkok malah menjadi negara yang memiliki geopolitik kelas berat.¹¹ Sebuah media di Tiongkok yang di kelola oleh negara pernah menuliskan bahwa status superpower AS saat ini hanya merupakan

⁷ "The World's 10 Biggest Economies in 2017".Weforum.org. diakses pada tanggal 9 Januari 2018. <https://www.weforum.org/agenda/2017/03/worlds-biggest-economies-in-2017/>.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ "China's \$900 Billion New Silk Road, What you Need to Know".weforum.org. diakses pada tanggal 9 Januari 2018. <https://www.weforum.org/agenda/2017/06/china-new-silk-road-explainer/>.

¹¹ *Ibid.*

selimut keamanan yang ditawarkan sekutunya, sebaliknya Tiongkok akan menjadi adidaya yang menawarkan konektivitas.¹²

AS memiliki cara untuk mendekat kepada Asia. Meresponi presur Tiongkok dalam *influence*-nya di Asia, AS, India, dan Jepang membentuk aliansi Trilateral yang memulai pertemuan pertama mereka pada tanggal 19 Desember 2011.¹³ Walaupun ketiga negara ini mengatakan bahwa pertemuan mereka ini tidak ditujukan untuk mengisolasi Tiongkok, namun isi dari pertemuan ini bertujuan untuk membagi nilai demokrasi, HAM, aturan hukum, transparansi, pasar terbuka, dan kesamaan kepentingan di perkembangan internasional bagi ketiga negara tersebut.¹⁴ Bisa dilihat bahwa aliansi ini adalah aliansi dari tiga negara yang kuat di aspek ekonominya yang dapat mengancam perkembangan ekonomi Tiongkok. Baik Jepang maupun India saat ini memprioritaskan hubungan dengan negara demokratis di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Mereka melakukan diplomasi kesamaan nilai yang seperti dilakukan AS.¹⁵ Walaupun berasal dari background yang berbeda, AS, India, dan Jepang membentuk rangka awal Indo-Pacific Alliance dan membuat “*new type of major power relation*”¹⁶.

Setelah terjadinya gempa dan melihat respon bantuan kemanusiaan yang banyak berdatangan dari negara-negara lain. Seorang mantan Brigjen *Nepal Army*

¹² *Ibid.*

¹³ “Asia’s New Triple Alliance”. *Foreignpolicy.com*. diakses pada tanggal 5 Januari 2018. <http://foreignpolicy.com/2015/02/24/asias-emerging-triple-alliance-india-china-japan-modi-obama/>.

¹⁴ “Inside the first ever U.S.-Japan-India trilateral Meeting”. *Foreignpolicy.com*. diakses pada tanggal 5 Januari 2018. <http://foreignpolicy.com/2011/12/23/inside-the-first-ever-u-s-japan-india-trilateral-meeting/>.

¹⁵ “Asia’s New Triple Alliance”. *foreignpolicy.com*. Loc. Cit.

¹⁶ *Ibid.*

sekaligus anggota peneliti di *Institutes of Defense Studies and Analysis*, Umesh K. Bhattarai menuliskan sebuah artikel yang dimuat di *The Himalayan Times*. Ia menuliskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat dari Tiongkok membuat Tiongkok dan AS bersaing menjadi negara *global power*.¹⁷ Posisi Nepal yang merupakan negara buffer antara India dan Tiongkok menjadikan Nepal negara yang cukup diperhitungkan, karena Nepal berada ditengah-tengah negara dengan pasar yang bernilai lebih dari 2,6 Milyar USD dan menjadikan geopolitik dari Nepal menjadi soft powernya.¹⁸ Hal ini juga semakin diperkuat dengan AS memasukan Nepal dalam daftar negara *Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015* dimana Nepal mendapatkan keuntungan bebas pajak untuk 77 jenis barang ekspornya ke AS.¹⁹ Selain itu AS juga memperkuat *Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)* dengan Nepal, dengan menambahkan agenda untuk memperluas perdagangan, investasi, dan kooperasi teknikal untuk meningkatkan perekonomian kedua negara.²⁰

Dari sini muncul sebuah spekulasi bahwa AS memberikan bantuan kemanusiaan dengan jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan negara-negara lain untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Nepal. dan merupakan strategi AS dalam membendung kepentingan Tiongkok di Asia Selatan, Sekaligus AS akan memiliki pengaruh yang cukup besar di Asia

¹⁷ "US-India-Nepal Alliance: Countering China". Loc. Cit.

¹⁸ "Nepal's geopolitical location is its soft power". kathmandupost.ekantipur.com. diakses pada tanggal 10 Januari 2018. <http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2014-11-30/nepals-geopolitical-location-is-its-soft-power.html>.

¹⁹ "U.S.-Nepal Joint Statement on 3rd Trade and Investment Framework Council Meeting". ustr.gov. diakses pada tanggal 7 Pebruari 2018. <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/april/us-nepal-joint-statement-3rd-trade>.

²⁰ *Ibid.*

khususnya Asia selatan karena Nepal berada diantara negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Sekaligus kita bisa melihat usaha AS dari perkembangan *joint statement* AS dengan Nepal yang semakin diperkuat dari tahun ke tahun paska terjadinya gempa dengan memperkuat perdagangan mereka dan juga investasi mereka di Nepal.

5.1.1.2 Recipient's Regime Type

AS adalah negara federal bersistem pemerintahan presidensil dan menganut rezim demokrasi. Terdapat 3 pilar utama dalam pemerintahan AS, yaitu eksekutif, legislative, dan yudikatif.²¹ Pada pemerintahan AS eksekutif bekerja sebagai pelaksana hukum atau undang-undang. Presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, wakil presiden berperan sebagai pengganti presiden ketika tidak sanggup melaksanakan tugasnya, dan terdapat jajaran kabinet yang dipilih langsung oleh presiden untuk menjadi penasehat, kabinet ini harus disetujui oleh minimal 51% senat yang aktif. Masa bakti presiden dan wakilnya adalah empat tahun dan dipilih langsung melalui pemilihan umum.²²

Pilar kedua dari pemerintahan AS adalah Legislatif yang bertugas untuk menyusun undang-undang yang berlaku di AS. Legislatif terdiri dari Senat dan *House of Representative*. Senat terdiri dari 100 orang dipilih 2 orang dari setiap negara bagian dan mengabdikan selama 6 tahun, namun setiap 2 tahun sekali diadakan pemilihan umum untuk mengganti 1/3 anggotanya. *House of Representatives* terdiri dari 435 orang yang dipilih dari setiap negara bagian, jumlah kursi per negara bagian ditentukan menurut populasi di negara bagian

²¹ "Branches of Government".usa.gov. Loc. Cit.

²² *Ibid.*

tersebut, dan dipilih melalui pemilihan umum setiap 2 tahun sekali.²³ Pilar terakhir yaitu Yudikatif yang terdiri dari *supreme court* yang beranggotakan 9 orang terdiri dari 1 hakim ketua dan 8 hakim lain yang pemilihannya dipilih presiden dan di setuju senat. Yudikatif bertugas untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan berfungsi sebagai *check and balance* pada pemerintahan di AS. Supreme court sendiri bersifat *independent* dalam artian tidak bisa di bayangi kekuasaan lain.²⁴

Saat ini Nepal merupakan negara federal dengan sistem pemerintahan yang parlementer. Rezim yang dianut Nepal memiliki kedekatan dengan AS yaitu demokratis.²⁵ Namun, Nepal perjalanan politik sangat panjang hingga Nepal pada sistem pemerintahan yang saat ini. Nepal mengalami beberapa pergantian rezim pemerintahan dari monarki, ketidak stabilan politik hingga demokratis yang baru dinyatakan pada tahun 2015 beberapa bulan setelah terjadinya bencana melalui perubahan konstitusi.²⁶

Walaupun hampir sama dengan AS namun pemerintahan di Nepal memiliki sistem pemilihan yang berbeda dengan AS. Rakyat Nepal memilih *House of Representative* (HoR) dengan 2 metode yaitu *First Pass The Post* (FPTP) dan *Proportional Representation* (PR) yang dipilih melalui voting.²⁷

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ "Nepalese vote in parliamentary and provincial elections to choose a new government to conclude democratic transition". *aljazeera.com*. diakses pada 5 Januari 2018.
<http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2017/11/nepal-elections-2017-explained-171126103009857.html>.

²⁶ "Nepal profile – Timeline". *BBC.com*. diakses pada tanggal 5 Januari 2018.
<http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12499391>.

²⁷ "Nepalese vote in parliamentary and provincial elections to choose a new government to conclude democratic transition". *aljazeera.com*. Loc. Cit.

Pertama rakyat Nepal akan memilih HoR sebanyak 275 orang dengan 60% melalui metode FPTP dan 40% dengan PR. Hanya partai yang calonnya 3% terpilih dari keseluruhan calon pada metode FPTP yang dapat mencalonkan pada metode PR. HoR akan memiliki masa jabatan selama 5 tahun. metode yang sama akan dilakukan pada pemilihan *provincial assembly* (PA) yang dipilih sebanyak 550 orang dan mereka disebut sebagai *Federal Parliament*.²⁸ Lalu dari HoR dan PA yang terpilih akan diadakan pemilihan National Assembly (NA) sebanyak 56 orang dengan metode pemilihan tidak langsung yang hanya diikuti oleh HoR dan PA. Federal Parliament juga akan memilih perdana menteri untuk memenuhi fungsi eksekutif, calonnya adalah dari partai yang memenangkan suara mayoritas pada pemilihan HoR.²⁹ Lalu pemilihan presiden akan dilakukan oleh federal parliament dan NA. Presiden ini akan berfungsi sebagai kepala negara dan bertindak sebagai penjaga konstitusi yang ada di Nepal.³⁰

Kedekatan rezim antara negara donor dengan negara resipien akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keduanya. Hal ini dibuktikan dengan sejarah bantuan AS dimana AS selalu memberikan bantuan kepada negara yang memiliki kedekatan rezim dengan AS. Hal ini bergantung pada pandangan setiap negara donor yang memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang bantuan luar negeri. AS sendiri menjadi negara yang cenderung memberikan bantuan kepada negara-negara yang memiliki kedekatan rezim dengan AS. Seperti pada

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

saat masa perang dingin AS memberikan bantuan kepada negara-negara dengan rezim demokratis dan tergabung dengan blok barat yang dipimpin AS.³¹

Sejarah pembentukan rezim di Nepal sendiri tidak lepas dari pengaruh AS. Nepal pada awalnya adalah sebuah negara monarki yang merdeka pada tahun 1768.³² Pada tahun 1959 terjadi pergantian dari monarki menjadi monarki konstitusional dan Raja Nepal pada saat itu Raja Mahendra menciptakan konstitusi baru dan mengadakan pemilu pertama secara tidak langsung.³³ Sistem ini tidak berjalan lama karna pada tahun 1960 Raja mengatakan bahwa sistem ini adalah sistem yang gagal dan kembali pada sistem monarki. Tahun 1990 beberapa muncul beberapa partai politik yang ingin mengembalikan demokrasi di Nepal, dengan mengadakan demonstrasi yang pada akhirnya memakan korban jiwa sebanyak lebih dari 50 orang. Namun gerakan itu berhasil membawa perubahan dengan bergantinya pemerintahan monarki di Nepal menjadi monarki parlemental dan mengadakan pemilu parlementer.³⁴

Pada tahun 1996 muncul gerakan yang dinamai “*People’s War*” dipimpin oleh *Underground Communist party of Nepal* (UPF) yang bertujuan untuk menggant pemerintahan monarki konstitusional dengan rezim komunis satu partai.³⁵ Kelompok ini lalu mengancam AS akan maju berperang jika AS masih

³¹ Drury, A. Cooper, Richard Stuart Olson, Douglas A. Van Belle. Op. Cit. Hlm. 457.

³² Vaughn, Bruce. *Nepal: Background and U.S. Relations*. 2006. Hlm 10.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.* hlm 12.

memberikanb bantuannya pada Nepal dengan maksud mengintervensi masalah dalam negeri Nepal.³⁶

Sejak saat itu AS memiliki kepentingan untuk mencegah Nepal menjadi negara yang *collapse*, dimana AS memiliki kekhawatiran jika Nepal *collapse* akan menjadi wilayah operasional teroris. Jika itu terjadi akan merusak stabilisasi keamanan regional.³⁷ Selain itu AS ingin membangun demokrasi di Nepal dan memberikan bantuan pembangunan, AS menyatakan bahwa dengan memperkuat Nepal dan mencegah persebaran *Maoist* adalah kunci mennggapai tujuan regional maupun bilateral AS, termasuk mengurangi terror, menjaga stabilisasi regional, mempromosikan demokrasi, dan menjaga warga negara AS di Nepal.³⁸

Hingga februari tahun 2006 AS tetap memberikan bantuan militer ke Nepal hingga kondisi politik Nepal membaik. AS memberikan bantuan persenjataan yang digunakan untuk mendukung persenjataan milik tentara Nepal.³⁹ Selain AS memberikan bantuan militer dan menjaga demokrasi di Nepal AS juga tidak membantah spekulasi akan membangun pangkalan militer di Nepal. kepentingan AS disini adalah untuk mempertahankan dan memperbaiki hubungannya dengan India, namun AS tetap membatasi kehadiran militer AS di Nepal agar tidak mengganggu aktifitas India.⁴⁰ AS juga tetap melanjutkan program pertukaran tentara yang telah dilakukan pada pertengahan tahun 1990an yaitu U.S. Pasific Command Force yang diciptakan untuk membantu Nepal

³⁶ *Ibid*, hlm.15.

³⁷ *Ibid*. hlm. 17

³⁸ *Ibid*.

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ *Ibid*. hlm 18

meningkatkan kekuatan tentaranya.⁴¹ AS juga menambahkan Communist Party of Nepal sebagai organisasi teroris di luar organisasi teroris internasional lain seperti Al Qaeda.⁴² Hingga akhirnya Nepal berdamai dengan kelompok *Maoist* pada tanggal 22 November 2006 dan kembali menjadi negara demokratis dengan sistem multi-partai. Dan hingga saat ini telah menjadi negara federal parlementer.⁴³

Dari analisis karakteristik yang penulis lakukan juga sangat terlihat aspek *ideas* tren bantuan AS mulai mempromosikan sistem pemerintahan yang demokratis kepada negara-negara penerima bantuan AS. Kedekatan rezim AS dengan Nepal ini terlihat sangat mempengaruhi banyaknya bantuan yang AS berikan kepada Nepal. Karena AS sendiri sebagai negara donor memiliki karakteristik untuk cenderung memberikan bantuan kepada negara-negara yang memiliki rezim demokrasi. Dari sejarah bantuan AS ke Nepal hingga perubahan rezim Nepal yang melalui banyak perubahan yang bahkan masih ada campur tangan AS didalamnya, penulis melihat bahwa kasus ini sangat berjalan lurus dengan indikator kedekatan tipe rezim yang dianut. AS sendiri sejak masa perang saudara berusaha memberikan bantuan kepada Nepal berupa militer untuk mempertahankan pemerintahannya untuk tidak jatuh menjadi negara komunis satu partai. Sehingga benar dalam kasus ini AS menjadi negara yang cenderung memberikan bantuan dengan jumlah yang banyak pada Nepal karena AS memiliki kedekatan rezim dengan Nepal.

⁴¹ *Ibid.* hlm 19.

⁴² *Ibid.*

⁴³ "Nepal profile – Timeline". BBC.com. Loc. Cit.

5.1.1.3 Recipient's Level of Development

Salah satu yang menjadi alasan negara donor memberi bantuan dalam jumlah yang besar adalah dengan melihat kemampuan ekonomi negara resipien. Semakin maju perekonomian negara resipien akan semakin mudah untuk negara tersebut membenahi dampak-dampak dari bencana. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kemampuan ekonomi sebuah negara maka akan semakin susah negara tersebut untuk bangkit dari bencana tersebut. Kasus gempa di Nepal sangat merugikan Nepal sebagai *less-developed countries* (LDCs). Pada saat terjadinya gempa pada tahun 2015 Nepal masih berada pada tingkat GDP sekitar 20 Miliar USD. Sedangkan kerugian yang dirasakan Nepal menurut perhitungan pemerintahnya mencapai 10 Miliar USD.⁴⁴

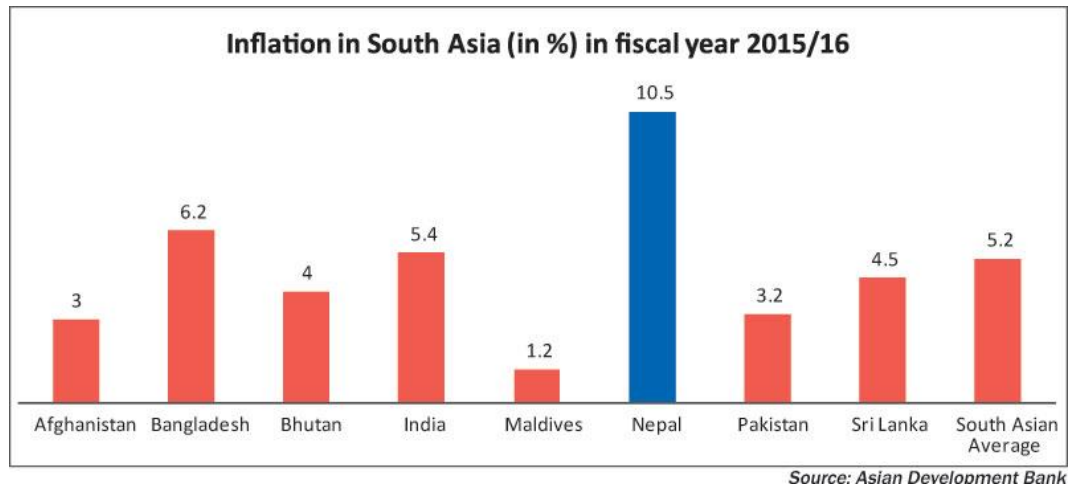
Dalam dekade terakhir Nepal seharusnya sudah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik, dengan penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan antara tahun 2005-2014. Namun akibat gempa yang menghantam Nepal pada tahun 2015 World Bank memperkirakan tingkat kemiskinan di Nepal akan bertambah sekitar 2,5% hingga 3,5%.⁴⁵ Tingkat pertumbuhan ekonomi Nepal yang diperkirakan akan meningkat 4,6% turun menjadi 3%. Selain itu Nepal juga mengalami kerugian yang parah dari sektor pariwisata dan akan sangat mempengaruhi perekonomian Nepal. Kerugian sektor pariwisata mencapai 10% dan akan mempengaruhi 8,6% GDP Nepal karena

⁴⁴ "Economic Impact of Nepal Earthquake". Globoledge.msu.edu. Loc. Cit.

⁴⁵ "what's next for Nepal economy?". weforum.org. diakses pada tanggal 5 Januari 2018.
<https://www.weforum.org/agenda/2015/10/whats-next-for-nepals-economy/>.

perputaran turis menurun bahkan di tempat wisata yang tidak terlalu terkena dampak gempa.⁴⁶

Gambar 5.4 Angka inflasi Nepal tahun 2015



Sumber: <http://www.myrepublica.com/news/2273/>

Asian Development Bank (ADB) pada tanggal 19 mengeluarkan data inflasi negara-negara di Asia Selatan dan Nepal berada pada tingkat tertinggi di Asia Selatan dengan angka inflasi mencapai 10.5%⁴⁷ Hal ini diperparah dengan defisit perdagangan Nepal yang makin membesar akibat bencana. Hal ini dikarenakan produksi agrikultur Nepal mengalami penurunan yang cukup besar⁴⁸ Menurut kementerian pertanian Nepal, sektor pertanian mengalami kerugian sebesar 10 Milyar NPR.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ "Nepal inflation highest in South Asia".myrepublica.com. diakses pada tanggal 5 Januari 2018. <http://www.myrepublica.com/news/2273/>.

⁴⁸ "target pertumbuhan ekonomi nepal sulit tercapai".ekbis.sindonews.com. diakses pada 5 januari 2018. <https://ekbis.sindonews.com/read/1002466/35/target-pertumbuhan-ekonomi-nepal-sulit-tercapai-1431944571>.

Kerugian dari kerusakan penyimpanan hasil pertanian saja mencapai 8 Milyar NPR.⁴⁹ The Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan bahwa produksi gandum di Nepal menurun hingga 5% dari hasil panen tahun lalu. Dan tak hanya itu, terdapat 33,7% populasi di sektor pertanian Nepal yang akan juga berpengaruh terhadap angka pengangguran di Nepal. Kerugian di sektor pangan juga diperparah dengan rusaknya infrastruktur, distribusi pangan local menjadi melemah, dan menimbulkan ketergantungan terhadap impor pangan yang akan meningkatkan harga pangan itu sendiri.⁵⁰

Kondisi Nepal paska bencana yang sangat merugikan Nepal ini membuat AS sebagai negara yang sangat penting bagi Nepal, sejak tahun 2014 AS menjadi negara yang sangat berkontribusi dalam ekspor dan impor Nepal.⁵¹

Tabel 5.1 Nilai ekspor-impor Nepal ke AS (NPR)

Year	Export	Import	Balance
2012	5,141,836	4,757,639	384,197
2013	6,531,238	5,498,613	1,032,625
2014	7,806,483,315	6,867,459,065	939, 024, 310
2015	8,415,217,476	7,869,054,024	546, 163, 4522
2016	4,642,439,205	5,600,845,065	-958, 405, 860

Sumber: <http://mofa.gov.np/nepal-us-relations/>

⁴⁹ Economic Impact of Earthquake – Agriculture”.Nepaleconomicforum.org. diakses tanggal 5 Januari 2018. <http://www.nepaleconomicforum.org/news/news.php?n=106>.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ “Nepal-US Relation”.Mova.gov.np. diakses pada tanggal 9 Januari 2018. <http://mofa.gov.np/nepal-us-relations/>.

Nilai ekspor Impor Nepal dengan AS pada tahun 2013 ke tahun 2014 berkembang dengan sangat pesat. begitu pula dari tahun 2015 ke tahun 2015 yang meningkat hingga rata-rata 1 Milyar NRP. Namun, angka tersebut turun dengan sangat drastis paska gempa yaitu pada tahun 2015 ke 2016, hal ini menunjukkan adanya kerugian yang sangat besar dari sektor perdagangan Nepal.⁵²

Kondisi Nepal sebagai salah satu negara LDCs dan perekonomian Nepal yang sangat buruk paska bencana tersebut membuat Nepal tidak memiliki kapabilitas untuk memperbaiki kondisi negaranya sendiri. Hal ini yang juga membuat AS memberikan bantuan kemanusiaan dalam jumlah yang sangat banyak kepada Nepal. Konsep yang penulis gunakan untuk menganalisis kasus ini mengatakan bahwa semakin sebuah negara berada dalam tingkat ekonomi yang buruk maka semakin sulit negara tersebut untuk bangkit sendiri dari bencana.⁵³ Dari data tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Nepal sangat terpuruk dan ini menjadi alasan yang kuat untuk AS memberikan bantuan dalam jumlah yang cukup besar.

5.1.2 Donors Domestic Political Concerns

Sub-variabel ini akan menganalisis kondisi domestik negara donor yang mendorong negara donor memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara resipien yang terkena bencana. Dalam konsep ini terdapat beberapa indikator antara lain *donors current budget deficit*, *The Salience of the disaster*, dan *current donor's disasters (severity of the disaster)*. Indikator-indikator ini akan penulis

⁵² *Ibid.*

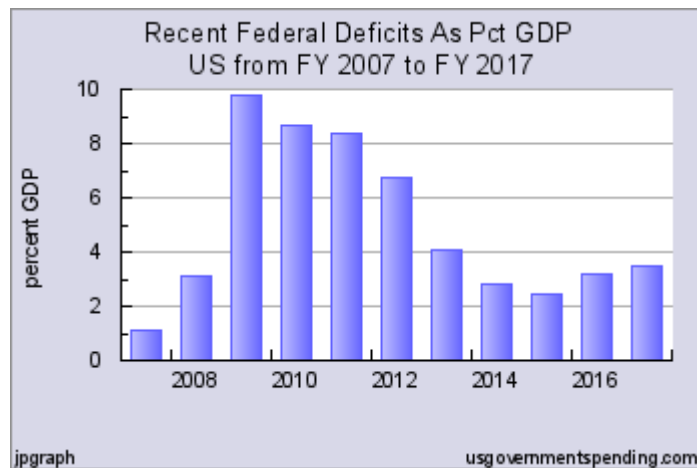
⁵³ Drury, A. Cooper, Richard Stuart Olson, Douglas A. Van Belle. Op. Cit. Hlm. 458.

gunakan untuk menjawab faktor politik apa yang membuat AS memberikan bantuan kemanusiaan kepada Nepal pasca gempa tahun 2015.

5.1.2.1 Donors Current Budget Deficits

Pengertian dari indikator ini adalah berhubungan dengan nilai defisit anggaran negara donor yang semakin besar akan berpengaruh pada jumlah bantuan yang semakin sedikit. Berlaku juga sebaliknya saat defisit anggaran mengalami penurunan secara otomatis semakin besar dana yang dialokasikan untuk bantuan. pada tahun 2015 defisit anggaran AS menurun hingga angka 3% dari GDP dan merupakan defisit anggaran AS yang terendah dalam 10 tahun terakhir.⁵⁴

Gambar 5.5 Persentase defisit anggaran AS 2007-2017



Sumber: www.usgovernmentdebt.us

Dari grafik tersebut terlihat bahwa AS mengalami penurunan defisit yang paling rendah selama 10 tahun terakhir. Angka penurunan defisit hingga 3% GDP ini memiliki nilai sebesar 439 Milyar USD. jauh lebih rendah dibanding

⁵⁴ "Recent US Current Budget Deficit".usgovernmentdebt.us. Loc. Cit

tahun lalu yang mencapai 485 Milyar USD.⁵⁵ hal ini akan berpengaruh kepada peningkatan dana ke berbagai sektor salah satunya adalah dana bantuan luar negeri AS. Secara keseluruhan bantuan AS meningkat sekitar 5 Milyar USD dari tahun 2014 yang berada pada angka sekitar 42 Milyar USD menjadi sekitar 47 Milyar USD pada tahun 2015.⁵⁶

Jika dilihat dari data tersebut, pengertian indikator berbanding lurus dengan fakta yang terjadi. Penurunan angka defisit anggaran negara yang menurun akan meningkatkan jumlah dana di berbagai sektor termasuk sektor bantuan luar negeri. Dalam hal ini konsep yang penulis pakai terbukti benar bahwa memang penurunan angka defisit anggaran AS berdampak pada tingkatan pemberian bantuan yang di berikan ke Nepal. Secara keseluruhan jumlah bantuan AS meningkat sekitar 5 Milyar USD untuk bantuan luar negeri. untuk bantuan kemanusiaan AS ke Nepal meningkat sekitar 40 juta USD yang menurut penulis cukup signifikan untuk negara kecil seperti Nepal.

5.1.2.2 The Salience of the Disaster

Pada indikator ini dijelaskan banyaknya bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh negara donor dipengaruhi juga oleh banyaknya media yang meliput bencana tersebut. Pada kasus yang penulis ambil bencana yang terjadi berupa gempa bumi di Nepal sangat menyita perhatian dari media internasional. Bencana alam yang sangat besar ini diliput berbagai media besar dari seluruh dunia. Salah satunya media AS yaitu CNN. dimana CNN pada saat terjadinya gempa langsung

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ "Map of Foreign Assistance worldwide".foreignassistance.gov. diakses pada tanggal 5 januari 2018. <https://foreignassistance.gov/explore>.

memberitakan secara berurutan dari hari kehari untuk memperlihatkan betapa besarnya gempa yang terjadi di Nepal. CNN meliput mengenai jumlah korban, jumlah kerugian, kondisi bangunan bahkan betapa sulitnya tim penyelamat dalam mencari korban-korban yang masih selamat.⁵⁷

Tidak hanya sampai disitu, media juga meliput mengenai pemberian bantuan oleh pemerintah AS melalui USAID, sehingga publik juga tau apa yang dilakukan pemerintah AS meresponi bencana yang terjadi di Nepal. Media sendiri juga dimanfaatkan oleh pemerintah AS yang melalui USAID yang menerbitkan Newsletter dimana dalam newsletter tersebut di beritakan khusus tentang apa yang telah dilakukan USAID bagi korban bencana di Nepal. Media juga dimanfaatkan pemerintah AS untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membantu korban bencana di Nepal.

Gambar 5.6 Newsletter USAID-Nepal



Sumber:USAID.gov

⁵⁷ "Nepal earthquake: Death toll passes 4,800 as rescuers face challenges".edition.cnn.com. diakses pada 5 januari 2018. <http://edition.cnn.com/2015/04/28/asia/nepal-earthquake/index.html>.

Jumlah turis AS di Nepal juga berjumlah cukup banyak. Hal ini juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah AS sebagai langkah untuk melindungi warga negaranya dari bencana. Data di bawah ini menunjukkan bahwa turis AS di Nepal mengalami peningkatan dari 5 tahun sebelumnya, pada tahun 2010 yang hanya berjumlah 36.425 orang meningkat pada tahun 2014 menjadi 49.830 orang.⁵⁸ Ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan banyak warga negara AS yang menjadi korban dalam bencana gempa Nepal.

Gambar 5.7 Peningkatan Jumlah Turis di Nepal

Tourist Arrival by Nationalities

Country	Year					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
India	120,898	149,504	165,815	180,974	135,343	75,124
China	46,360	61,917	71,861	113,173	123,805	66,894
Sri Lanka	45,531	59,884	69,476	32,736	37,546	44,367
Thailand	N/A	N/A	N/A	40,969	33,422	30,953
Japan	23,332	26,283	28,642	26,694	25,829	17,613
Australia	16,243	19,824	22,030	20,469	24,516	18,619
UK	35,091	39,091	41,294	35,668	36,759	29,730
USA	36,425	42,875	48,985	47,355	49,830	42,687

Sumber: <http://www.newbusinessage.com/MagazineArticles/view/1706>

Indikator ini memiliki kemiripan dengan studi mengenai *CNN Effect* dimana *CNN Effect* didefinisikan sebagai power yang dimiliki media untuk membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan, ataupun merubah kebijakan dengan cara meliput sebuah kejadian mengenai krisis kemanusiaan.⁵⁹ Tidak bisa dipungkiri bahwa media akan membentuk cara pandang orang setiap hari melalui

⁵⁸ "50 Years of Nepali Tourism".Newbusinessage.com. diakses pada tanggal 10 Januari 2018.
<http://www.newbusinessage.com/MagazineArticles/view/1706>.

⁵⁹ Bredeson, Jared. The CNN Effect. 2011. Hlm.10

apa yang diliputnya, semakin mendalam liputan itu akan semakin membentuk respon publik terhadap isu tersebut.⁶⁰ Hal ini yang akhirnya mendesak pemerintah untuk segera merespon apa yang diinginkan publik.

Disisi pemerintah media juga membantu pemerintah untuk membentuk citra pemerintah tersebut. Media meliput bantuan yang diberikan AS ke Nepal juga akan tersiar dan ini akan menguntungkan pemerintah AS. Dengan adanya media pemerintah AS akan lebih mudah menunjukkan citranya sebagai negara dengan jumlah bantuan terbesar bagi Nepal, sehingga hal ini sejalan dengan strategi AS untuk membuat Nepal condong terhadap bantuan AS. Citra ini yang akan menjadi keuntungan bagi AS. Sepanjang sejarah bantuan AS pada bencana-bencana alam AS selalu menjadi negara yang paling cepat dalam pemberian bantuan kemanusiaannya. Contohnya adalah pada saat terjadi gempa dan tsunami di Aceh, Indonesia. Beberapa jam setelah terjadi gempa dan tsunami pada tanggal 26 desember 2004 di Aceh, AS langsung mengirimkan tim DART dan memberikan bantuan kemanusiaan sejumlah 100 ribu USD untuk langkah awal penyelamatan korban bencana.⁶¹

Kasus lain yang menunjukkan respon cepat dari AS adalah ketika terjadi gempa di Haiti pada tanggal 12 januari 2010, setelah tersiar berita mengenai bencana yang terjadi AS langsung mengirimkan angkatan militer dan penanggulangan bencana. Mereka juga mengirimkan tim DART yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan bantuan kemanusiaan. Bantuan AS ini

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 30

⁶¹ U.S. Agency for International Development. *Stunami Relief.2005.*

langsung hadir pada tanggal 13 Januari.⁶² Peran media untuk menyorot aktifitas bantuan yang diberikan AS ini akan menunjukkan bahwa AS adalah negara yang sangat tanggap dan cepat dalam memberikan bantuan kemanusiaannya.

Selain media adanya gerakan *civil society* yang peduli terhadap nepal juga menjadi dorongan bagi pemerintah untuk bersama-sama membantu Nepal untuk segera bangkit dari keterpurukan akibat bencana gempa. contohnya adalah colorado nepal alliance dimana sejak tahun 2003 mereka telah bergerak membantu rakyat nepal yang kurang mampu untuk menciptakan pendidikan yang layak dan kehidupan yang layak dengan memberi pelatihan wirausaha untuk rakyat miskin di Nepal. Hingga pada tahun 2015 berfokus untuk membantu Nepal kembali dari kehancuran.⁶³

5.1.2.3 Current Donor Disasters (Severity of Donor Disasters)

Pengalaman-pengalaman bencana yang dialami oleh negara donor akan mempengaruhi negara donor sehubungan dengan banyaknya bantuan kemanusiaan yang diberikan. Hal ini berhubungan dengan kesamaan rasa penderitaan yang memunculkan empati dan trauma pada masa negara donor terkena bencana. AS sendiri sudah merasakan banyak sekali bencana baik bencana yang disebabkan oleh alam maupun manusia.

Hurricane katrina misalnya, angin topan yang terjadi di Florida, Louisiana, Mississippi, dan Alabama pada tahun 2005 ini memakan banyak sekali korban jiwa dan merupakan angin topan yang sangat parah dalam sejarah AS ,

⁶² "Haiti-earthquake factsheet #1, Fiscal Year (FY) 2010".Reliefweb.int. diakses pada tanggal 10 Januari 2018. <https://reliefweb.int/report/haiti/haiti-earthquake-fact-sheet-1-fiscal-year-fy-2010>.

⁶³ "About Colorado Nepal Alliance".coloradonepalalliance.org. Loc. Cit.

tercatat ada sekitar 1839 korban jiwa dan sekitar 108 Milyar USD kerugian materil.⁶⁴ Pada tahun 2014 banyak terjadi kebakaran dan banjir di negara-negara bagian AS yang memakan banyak korban jiwa dan kerugian jutaan USD.⁶⁵ AS juga pernah mengalami bencana yang disebabkan oleh manusia. Pada tahun 2001 terjadi peristiwa yang sangat mengguncang yaitu tragedi 9/11 yang merupakan serangan teroris di kota New York yang menewaskan sekitar 3000 orang.⁶⁶ Bencana-bencana yang dialami AS ini meninggalkan rasa trauma terhadap bencana dan menumbuhkan rasa empati terhadap negara yang terkena bencana.

Pada saat terjadi bencana gempa John Kerry sebagai sekretaris negara mengungkapkan sebuah pernyataan yang mewakili perasaan rakyat AS.

"I join the people of the United States in expressing our deepest condolences to all of those affected by today's earthquake in Nepal, including the families of those who died in Nepal, India, and Bangladesh. We are working closely with the government of Nepal to provide assistance and support. Ambassador Bodde has issued a disaster declaration in order to immediately release an initial \$1 million for humanitarian assistance. USAID is preparing to deploy a Disaster Assistance Response Team and is activating an Urban Search and Rescue Team to accompany disaster experts and assist with assessments of the situation.

*To the people in Nepal and the region affected by this tragedy we send our heartfelt sympathies. The United States stands with you during this difficult time"*⁶⁷

Pernyataan ini mewakili rakyat AS dalam merespon bencana yang terjadi di Nepal. Rasa empati AS terbentuk dari sejarah yang dialami AS dalam menghadapi bencana-bencana yang ada di negaranya. Sehingga AS memberikan bantuan cukup banyak kepada Nepal untuk segera kembali bangkit.

⁶⁴ "The 10 worst U.S. Natural Disaster". Livescience.com. Loc. Cit.

⁶⁵ "The Worst Natural Disaster In 2004". Time.com. Loc. Cit.

⁶⁶ "A Decade of Disaster 2000-2009". Govtech.com. Loc. Cit.

⁶⁷ "Statement by Secretary Kerry: The Earthquake in Nepal". np.usembassy.gov. diakses pada tanggal 5 Januari 2018. <https://np.usembassy.gov/statement-secretary-kerry-earthquake-nepal/>.

Pengalaman bencana yang dimiliki AS membuat AS sangat terbiasa menangani bencana. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tim yang dibentuk oleh AS dengan keahliannya yang menjadi salah satu bantuan jangka panjang yang akan berguna untuk membangun kembali negara resipien. pada kasus bantuan AS ke Nepal, AS memberikan bantuan jangka panjang untuk membangun rumah dan infrastruktur yang termasuk di dalamnya adalah keamanan pangan, kesehatan, air dan sanitasi, *good governance* dan tindakan preventif dan perlindungan terhadap kekerasan gender dan perdagangan manusia.⁶⁸

Beberapa contoh dari bantuan AS secara nyata adalah dengan melakukan pelatihan 900 warga, ahli bangunan, dan 800 kepala rumah tangga untuk membuat bangunan yang lebih aman dari bencana, mendanai konstruksi 1.000 tempat belajar temporer untuk tetap memberikan anak-anak ilmu dan pelajaran, mendukung lebih dari 33.000 rumah dengan penyimpanan hasil panen, alat-alat dan pelatihan pertanian,⁶⁹ membuat proyek kesehatan nutrisi anak, USAID telah membantu 84.000 anak dibawah 5 tahun, dan merawat 3.000 pasien malnutrisi, dan mengkonsultai 40.000 Ibu untuk informasi nutrisi yang baik.⁷⁰

Selain itu dengan pengalaman pemberian bantuannya, AS telah menciptakan dan menggunakan alat-alat elektronik canggih yang digunakan untuk alat penyelamatan pada saat mencari korban bencana. *Finding Individuals for Disaster and Emergency Response* (Finder) merupakan alat yang dikembangkan oleh NASA dan U.S Department of Homeland Security untuk mendeteksi detak

⁶⁸ "2015 Nepal Earthquake".USAID.Gov. diakses pada tanggal 10 Januari 2018.
<https://www.usaid.gov/nepal-earthquake>.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

jantung korban yang tertimbun reruntuhan.⁷¹ Selain itu AS juga menggunakan teknologi drone atau pesawat tanpa awak yang dapat digunakan untuk melihat permukaan tanah dari atas langit dengan mudah, serta menggunakan drone tersebut untuk mendistribusikan obat-obatan ke desa yang terisolir.⁷²

5.2 *Nonpolitical Factor*

Disamping variabel faktor politik dengan indikator-indikator yang kental dengan kondisi politiknya terdapat variabel *nonpolitical factor* yang mempengaruhi sebuah negara donor memberikan bantuan kemanusiaannya. Hal ini akan menjadi pertimbangan mengenai tipe bantuan kemanusiaan yang cocok untuk diberikan kepada negara resipien. Variabel ini memiliki satu indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis bencana apa yang terjadi.

5.2.1 *Type of Disaster*

Variabel ini digunakan untuk melihat tipe bencana apa yang terjadi, bencana alam yang disebabkan oleh kondisi alam, perubahan iklim, ataupun bencana manusia seperti radiasi nuklir, bom, dan lain sebagainya. Indikator pada variabel ini hanya satu yang nantinya akan penulis gunakan untuk menentukan tipe bencana yang terjadi di Nepal.

5.2.1.1 *Control For The Type of Disaster*

Dalam memberi bantuan kontrol terhadap tipe bencana sangat diperlukan. Dengan menggunakan data yang rinci mengenai bencana dan pembagian sektor-sektor yang membutuhkan bantuan, akan meningkatkan

⁷¹ "One Year Later: Nepali Earthquake Recovery Move Forward".Share.America.Gov. diakses pada tanggal 10 Januari 2018. <https://share.america.gov/technologys-role-in-earthquake-recovery/>.

⁷² *Ibid.*

efisiensi distribusi bantuan itu sendiri. Gempa yang terjadi di Nepal adalah gempa bumi yang terjadi dikarenakan tumbukan 2 lempeng benua India dan lempeng Eurasia, pada pusat gempa dan menimbulkan gempa dengan kekuatan 8,7 skala Richter dengan kedalaman 15km dan pergeseran sebesar 3m⁷³. korban jiwa 8000 orang dan 22.000 orang mengalami cedera. Tidak hanya itu, ada sekitar 700.000 tempat tinggal hancur total akibat gempa ini.⁷⁴

Melihat parahnya kondisi paska gempa di Nepal, AS harus bertindak cepat melakukan bantuan kemanusiaan. Hal ini dilakukan AS pada saat itu tepat setelah Nepal mengumumkan kondisi emergensi AS mengirimkan tim DART dan memberikan dana langsung sebesar 1 juta USD.⁷⁵ Selain itu, AS juga memberikan *Emergency Shelter, hygiene kits, dan medical supplies*.⁷⁶ AS juga memberi bantuan pangan untuk para korban yang selamat dari bencana gempa Nepal.⁷⁷ Bantuan-bantuan yang diberikan AS merupakan bantuan yang bersifat kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa korban yang selamat dari bencana yang sangat besar ini.

AS juga memberikan dana yang cukup besar untuk membenahi infrastruktur dan membangun kembali rumah dan bangunan yang korban bencana miliki.⁷⁸ Hal ini menunjukkan bahwa bantuan AS tidak hanya sampai pada level penyelamatan nyawa namun juga memberikan bantuan untuk memulai kembali

⁷³ "the Science behind Nepal Earthquake". Earthsky.org. Loc. Cit.

⁷⁴ "Nepal Earthquake: Rescue Effort Intensifies". Loc. Cit.

⁷⁵ "Nepal Earthquake-factsheet #1". USAID.gov. Loc. Cit.

⁷⁶ "Nepal Earthquake-factsheet #9". USAID.Gov. Loc. Cit.

⁷⁷ "Nepal Earthquake-Factsheet #3". USAID.gov.. Loc. Cit.

⁷⁸ "USAID post-earthquake contributions for housing reconstruction". Usaid.gov. diakses pada tanggal 5 Januari 2018. <https://www.usaid.gov/nepal/fact-sheets/usaids-post-earthquake-contributions-housing-reconstruction>.

membangun kehidupan para korban. Faktor non politik ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam analisa penulis. Sekaligus dapat menggambarkan keadaan Nepal yang sangat terpuruk karena bencana gempa ini.

5.3 Faktor Dominan Bantuan Kemanusiaan Amerika Serikat Kepada Nepal Paska Gempa Tahun 2015

Dalam Bab ini penulis telah menganalisi faktor-faktor politik maupun non politik pemberian bantuan kemanusiaan AS kepada Nepal paska gempa tahun 2015, dengan menggunakan indikator –indikator yang relevan yang ada dalam konsep *The Politics Humanitarian Aid*. untuk menutup bab ini penulis akan berargumen terkait faktor yang paling dominan dan mendorong AS memberikan bantuan kemanusiaan yang cukup besar kepada Nepal.

Melihat dari analisa data yang telah penulis lakukan, penulis menemukan ada 2 faktor yang paling dominan yang mendasari AS memberikan bantuan kemanusiaan ke Nepal dengan jumlah yang cukup besar. Pertama dilihat dari hubungan aliansi AS dan Nepal, walaupun tidak ada aliansi AS dan Nepal secara resmi. Namun, AS dan Nepal tidak melakukan hubungan yang saling menguntungkan dengan Nepal. AS menjadi negara pertama yang memberikan bantuan luar negeri kepada Nepal dimulai saat menandatangani *Assistance Agreement*. Pada level pembangunan AS memberikan bantuan infrastruktur pertama di Nepal, dan pesawat telepon, serta membasmi penyakit malaria di Nepal. sejarah hubungan AS menunjukkan bahwa AS dan Nepal telah membangun hubungan yang baik walupun tidak secara resmi memiliki aliansi.

Nepal merupakan negara *Landlock* diantara 2 negara besar yang makin berkembang yaitu India dan Tiongkok. Namun masyarakat Nepal lebih dekat dengan India secara kultural, baik budaya, linguistik, agama dan ekonomi yang sangat bergantung dengan perdagannya dengan India. India merupakan pemasok barang impor bagi Nepal dan pasar ekspor bagi Nepal. Disisi lain Tiongkok adalah negara yang mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Saat ini Tiongkok sudah menjadi negara dengan tingkat ekonomi terkuat kedua setelah AS. Hal ini membuat para ahli berspekulasi bahwa Tiongkok akan menjadi negara *superpower* yang akan mengalahkan AS. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,7% diakhir tahun 2015, mengalahkan AS yang hanya bertumbuh sebanyak 1,6% dan India yang berada pada nilai 6,6%.

Tiongkok juga memiliki rencana untuk menciptakan *One Belt One Road* yaitu jalur perdagangan Tiongkok yang menghubungkan negara-negara Asia, Timur Tengah, dan Eropa. AS dalam menghadapi *Influence* Tiongkok di Asia, membuat aliansi dengan India, dan Jepang yang merupakan negara dengan tingkat ekonomi yang kuat di Asia. walaupun tidak secara gamblang mengatakan bahwa hubungan aliansi ini untuk membendung Tiongkok namun, mereka membahas mengenai kerjasama yang akan dilakukan di kedepannya. Dengan melihat situasi yang terjadi penulis berargumen bahwa AS dengan sengaja memberikan bantuan kemanusiaan dengan jumlah paling banyak di Nepal adalah untuk membendung pengaruh Tiongkok di Nepal, serta mendekat dengan Nepal karena melihat posisi Nepal sebagai *Buffer Zone* antara 2 negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat besar yakni India dan Tiongkok, menjadikan

Nepal sebagai negara yang strategis bagi AS untuk memiliki pengaruh yang kuat di Asia.

Kedua, berkaitan dengan tipe rezim yang masih berdekatan. AS merupakan negara federal dengan sistem pemerintah presidensial dan menganut rezim demokrasi, sedangkan Nepal memiliki bentuk federal dengan sistem pemerintahan parlementer dan rezim demokrasi. Dalam sejarah panjang pembentukan rezim yang ada di Nepal, terdapat campur tangan AS berupa bantuan militer dan bantuan pembangunan yang memang bertujuan untuk membuat Nepal sebagai negara yang demokratis. Hal ini disebabkan adanya ancaman dari kelompok *Maoist* yang ingin menciptakan pemerintahan bersistem komunis satu partai. Selain itu AS juga telah memasukkan Communist Party of Nepal sebagai organisasi teroris.

Sudah menjadi karakteristik *ideas* dari AS jika AS selalu memberikan bantuan kepada negara dengan kedekatan rezim dengan AS. Walaupun rezim yang dianut Nepal sempat berganti-ganti dan tidak tercipta kestabilan politik namun, Nepal dapat membuktikan bahwa Nepal masih merupakan negara dengan rezim demokrasi. Hal ini merupakan salah satu yang membuat AS memberikan bantuannya dengan jumlah yang cukup besar.

Penulis berargumen bahwa indikator-indikator tersebut merupakan faktor dominan yang menjadi alasan AS memberikan bantuan kemanusiaan kepada Nepal paska gempa tahun 2015 yang penulis teliti. Karena faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang cukup kuat dengan keadaan politik yang sedang terjadi di Nepal dan Asia Selatan.

BAB VI

PENUTUP

Bab ini akan berisi kesimpulan yang didapat dari proses analisis yang sudah dilakukan. Selain itu, juga dituliskan saran yang diharapkan akan berguna untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya sehubungan dengan tema maupun konsep yang penulis angkat di dalam penelitian ini.

6.1 Kesimpulan

Penelitian mengenai faktor politik yang mempengaruhi bantuan kemanusiaan Amerika Serikat kepada Nepal pasca gempa pada Tahun 2015 ini menemukan jawaban yang cukup menarik. Bantuan kemanusiaan AS kepada Nepal ini tidak di dasarkan pada hubungan aliansi secara resmi antara kedua negara. baik AS dan Nepal memang telah memiliki hubungan bilateral yang baik sejak pada masa pembentukan negara Nepal. namun belum ada hubungan aliansi secara resmi yang dideklarasikan oleh AS maupun Nepal. Tiongkok merupakan negara di Asia yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Hingga saat ini menjadi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia.

Tiongkok juga sudah melakukan banyak perjanjian dan kerjasama dengan negara-negara lain. Para pembuat kebijakan di AS berspekulasi bahwa Tiongkok akan menggantikan AS sebagai pemimpin pasar dunia. Meresponi hal tersebut AS membuat aliansi dengan India dan Jepang, walaupun tidak dikatakan untuk menyaingi Tiongkok di Asia, namun hubungan aliansi trilateral ini

membahas nilai demokrasi, HAM, aturan hukum, transparansi, pasar terbuka, dan kesamaan kepentingan di perkembangan internasional bagi ketiga negara tersebut. Hal ini menunjukkan AS, India, dan Jepang memiliki agenda kerjasama yang akan menciptakan kekuatan baru di Asia.. Hal ini tentu saja secara tidak langsung akan membendung tiongkok untuk menguasai pasar Asia.

Jika melihat pola hubungan antara AS, India, dan Jepang. Pendekatan AS ke Nepal melalui bantuan kemanusiaan ini merupakan strategi AS untuk mendekati Nepal sehingga Nepal memiliki hubungan yang lebih condong ke AS. Hal ini tentu saja akan menghambat kepentingan Tiongkok dan memperlebar pengaruh AS di Asia. hal ini di karenakan Nepal merupakan negara yang diapit dengan negara-negara dengan angka pertumbuhan ekonomi yang besar.

Faktor rezim juga sangat mempengaruhi bantuan yang diberikan AS, mengingat AS dan Nepal memiliki kedekatan rezim dan bentuk negara. Sesuai dengan karakteristik bantuan luar negeri AS yang lebih cenderung memberi bantuan kepada negara-negara dengan rezim yang sama. Sejarah perkembangan rezim yang terjadi di Nepal juga tidak lepas dari bantuan AS. Dimana AS membantu Nepal dalam kondisi-kondisi konflik dan ketidak stabilan politik yang ada. Kedekatan rezim AS dan Nepal mendasari AS memberikan bantuan kemanusiaan dengan jumlah yang cukup banyak.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Nepal yang masih sangat rendah ditambah dengan bencana yang merusak sektor-sektor pendapatan vital Nepal membuat Nepal tidak mampu membangun kembali negaranya dengan usahanya sendiri. Hal ini juga dibuktikan dengan menurunnya angka ekspor impor AS

dengan Nepal ditahun 2015 ke tahun 2016 menunjukkan dampak dari bencana yang terjadi di Nepal. Sehingga bantuan kemanusiaan yang AS berikan akan sangat membantu pembangunan Nepal yang hancur akibat bencana gempa.

Penelitian ini membenarkan konsep *The Politics of Humanitarian Aid* mengenai penurunan defisit yang akan meningkatkan jumlah bantuan luar negeri. sesuai dengan konsep tersebut AS mengalami defisit anggaran yang cukup banyak dan kemudian angka bantuan kemanusiaan AS dari tahun 2014 ke tahun 2015 meningkat sekitar 40 juta USD dan secara keseluruhan bantuan luar negeri AS meningkat sekitar 5 milyar USD yang dibagi dalam beberapa sektor.

Pemberitaan media mengenai bencana di Nepal juga memberikan dampak positif bagi AS untuk memberitakan bantuan AS kepada Nepal. disisi lain, menurut definisi CNN effect media memang berperan untuk membangun opini publik mengenai sebuah hal, yang pada akhirnya pemahaman public berubah akan hal tersebut dan akan mendesak pemerintah untuk memberikan keinginan mereka. Begitu juga dengan berita bencana yang ada di Nepal. pengalaman AS terhadap bencana juga membuat AS memberikan bantuan kepada korban bencana di Nepal hal ini di perkuat dengan *statement* sekretaris Kerry yang mewakili warga AS menunjukkan rasa empatinya dan memberikan bantuan yang cukup besar. Selain berdampak pada pemerintah, media juga menyorot keberhasilan pemerintah dalam memberikan bantuan, pada kasus ini AS menunjukkan bahwa AS adalah negara yang sangat tanggap dengan bantuan bencana, terbukti dengan sejarah pemberian bantuan AS dari tahun ke tahun yang selalu bertindak secara langsung ketika terjadi bencana alam.

Pengalaman AS sebagai negara yang juga sering terkena bencana juga mempengaruhi respon AS dalam memberikan bantuan kemanusiaan pada bencana alam. Hal ini terjadi karena pengalaman AS dalam menangani bencana. Sehingga AS telah mengembangkan ilmu dan teknologi penanggulangan bencana yang lebih canggih dari pada negara lain. Contohnya adalah Finder, dan penggunaan drone untuk melihat permukaan tanah dari atas serta mendistribusikan bantuan pada lokasi yang sulit terjangkau oleh tim penyelamat. Selain itu AS juga mengembangkan ilmu dalam penanggulangan bencana dan pembangunan kembali paska bencana.

Faktor non politik dalam konsep ini juga berperan sebagai pengukur tipe bencana dan bentuk bantuan apa yang cocok diberikan untuk menangani bencana tersebut. Pada kasus ini Nepal mengalami bencana gempa dan AS memberikan bantuan-bantuan yang berhubungan dengan penyelamatan nyawa baik dari bantuan pangan, bantuan tempat tinggal darurat, air bersih, kebersihan penampungan, dan yang terpenting adalah persediaan obat-obatan yang akan segera menyelamatkan korban-korban yang masih selamat dari bencana tersebut. Dengan adanya klasifikasi tipe bencana yang dilakukan bantuan AS lebih efisien dan tepat sasaran ke korban bencana.

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan konsep *The Politics of Humanitarian Aid* kelemahan dari konsep ini adalah tidak adanya sumber berupa buku yang rinci seperti pada jurnal milik Drury, Olson, dan Van Belle. Sedangkan penggunaan konsep seharusnya bersumber pada buku, bukan jurnal. Konsep ini juga sangat cocok untuk meneliti bantuan kemanusiaan secara khusus karena

konsep ini memiliki variabel dan indikator yang cocok untuk menjawab faktor-faktor politik yang berada di balik sebuah bantuan kemanusiaan.

6.2 Saran

Penelitian ini merupakan penelitian yang masih banyak kekurangan, baik dari konten dan data yang ada. Namun disini penulis ingin membagikan sedikit saran bagi peneliti yang ingin membahas penelitian dengan menggunakan konsep maupun tema pembahasan yang sama. Bagi peneliti selanjutnya penulis sarankan untuk meneliti faktor-faktor lain yang belum pernah diteliti peneliti-peneliti sebelumnya.

Penelitian yang penulis lakukan berfokus pada faktor hubungan politik antara Amerika Serikat dan Nepal terkait pemberian bantuan kemanusiaan ke Nepal pasca gempa tahun 2015. Karena itu penelitian ini tidak bisa menjawab secara menyeluruh bagaimana hubungan bilateral AS dan Nepal. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk bisa mencari fokus yang lain agar dapat mengembangkan penelitian yang sudah penulis buat.

Penelitian yang penulis buat hanya berfokus pada periode tahun 2015 dimana pada periode ini merupakan 1 tahun pertama dari bantuan yang diberikan. Penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti pemberian bantuan kemanusiaan pada periode selanjutnya mengingat kerusakan Nepal yang sangat parah memerlukan waktu bertahun-tahun.

Penelitian yang penulis buat pada awalnya tidak ditemukan anomali yang membuat penelitian ini menarik. Penulis ingin memberi saran bagi peneliti selanjutnya untuk memahami terlebih dulu kasus yang ingin diteliti secara

mendalam sehingga penelitian yang peneliti buat akan lebih matang dan lebih siap untuk dikerjakan,

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Branczik, Amelia. *Humanitarian Aid and Development Assistance*, 2004.
- Lancaster, Carol. Chapter 1. *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*. University of Chicago, 2007
- Stromberg, David. *Natural Disasters, Economic Development, and Humanitarian Aid*. Nashville: American Economic Association, 2007.
- Terry, Fiona. 1998. *The Paradox of Humanitarian Aid*.
- Therien, Jean-Philippe. *Debating Foreign Aid: Right Versus Left*. London: Taylor & Francis, Ltd., 2002

JURNAL:

- Bredeson, Jared. *The CNN Effect*. 2011
- Drury, A. Cooper, Richard Stuart Olson, Douglas A. Van Belle. *The Politics of Humanitarian Aid: U.S Foreign Disaster Assistance, 1964-1995*, 1995.
- Elwell, Craig K., Marc Labonte, Wayne M. Morrison. *Is China a Threat to the U.S. Economy?*, 2007.
- Hyde, Susan D., *The Pseudo-Democrat's Dilemma*. 2011.
- Ploch, Lauren. *Africa Command: U.S. Strategic Interests and the Role of the U.S. Military in Africa*. 2007.
- WHO. *Humanitarian Crisis After The Nepal Earthquakes 2015*. 2015.

PAPER:

- U.S. Agency for International Development. *Stunami Relief*. 2005.
- USAID *Evaluation Policy*. Washington DC: 2011 Updated 2016.
- Vaughn, Bruce. *Nepal: Background and U.S. Relations*. 2006.

WEBSITE:

- Aljazeera. "Nepalese Vote in Parliamentary and Provincial Elections to Choose a New Government to Conclude Democratic Transition". diakses pada 5

- Januari 2018. <http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2017/11/nepal-elections-2017-explained-171126103009857.html>.
- BBC Indonesia. “*Gempa Susulan 6,7 Skala Richter Guncang Nepal*”. 26 April 2015. Diakses 27 April 2017.
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150426_gempa_susulan_nepal
- BBC “*Nepal Earthquake: Rescue Effort Intensifies*”. 26 April 2015. Diakses 27 April 2017. <http://www.bbc.com/news/world-asia-32470731>.
- BBC. “*Nepal Profile – Timeline*”. diakses pada tanggal 5 Januari 2018. <http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12499391>.
- CBC. “*Floods, Earthquakes, Wildfires and Heat Waves: The Worst Natural Disasters of 2015*”.. diakses pada 19 Oktober 2017.
<http://www.cbc.ca/news/world/year-end-2015-natural-disasters-1.3346639>
- CNN.“*Nepal Earthquake: Death Toll Passes 4,800 as Rescuers Face Challenges*”. Diakses pada 5 Januari 2018. <http://edition.cnn.com/2015/04/28/asia/nepal-earthquake/index.html>
- Coloradonepalalliance. “*About Colorado Nepal Alliance*”. diakses pada tanggal 24 September 2017. <https://coloradonepalalliance.org/about-us/>..
- Dawn.”*U.S. Warns Nepal of Aid Freeze*”. diakses pada 8 Agustus 2017. <https://www.dawn.com/news/383033>.
- Disaster Emergency Committee. “*Nepal Earthquake Appeal*”. Diakses 27 April 2017. <http://www.dec.org.uk/appeal/nepal-earthquake-appeal>.
- European Commission .“*Humanitarian Principle*.”. Diakses 5 Juni 2017. http://ec.europa.eu/echo/who/humanitarian-aid-and-civil-protection/humanitarian-principles_en
- Foreignassistance .“*Foreign Aid in South Asia*”. diakses pada 29 Agustus 2017. [http://foreignassistance.gov/explore/country/Asia-\(South-&-Central-Asia\)](http://foreignassistance.gov/explore/country/Asia-(South-&-Central-Asia)).
- Foreignassistance. “*Map of Foreign Assistance Worldwide*”. diakses pada tanggal 5 januari 2018. <https://foreignassistance.gov/explore>.
- Foreignassistance “*Map of Humanitarian Worldwide*”. diakses pada 1 November 2017. <https://foreignassistance.gov/explore>
- Foreignassistance. “*Nepal*”. gov. diakses tanggal 7 Agustus 2017. <http://www.foreignassistance.gov/explore/country/Nepal>

- Foreignassistance. “*What is US Government Assistance?*”. diakses 6 Juli 2017. <http://foreignassistance.gov/>.
- Foreignpolicy. “*Asia’s New Triple Alliance*”. diakses pada tanggal 5 Januari 2018. <http://foreignpolicy.com/2015/02/24/asias-emerging-triple-alliance-india-china-japan-modi-obama/>.
- Foreignpolicy. “*Inside the first ever U.S.-Japan-India trilateral Meeting*”. diakses pada tanggal 5 januari 2018. <http://foreignpolicy.com/2011/12/23/inside-the-first-ever-u-s-japan-india-trilateral-meeting/>.
- Globaleledge.”*Economic Impact of Nepal Earthquake*”. 5 Juli 2015. Diakses 2 Mei 2017. <https://globaleledge.msu.edu/blog/post/21933/economic-impact-of-nepal-earthquake->.
- Global Humanitarian Assistance. “*Defining Humanitarian Assistance.*”. Diakses 5 Juni 2017. <http://www.globalhumanitarianassistance.org/data-guides/defining-humanitarian-aid/>
- kathmandupost.ekantipur. “*Nepal’s Geopolitical Location is Its Soft Power*”. diakses pada tanggal 10 Januari 2018. <http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2014-11-30/nepals-geopolitical-location-is-its-soft-power.html>.
- Govtech “*A Decade of Disaster 2000-2009*”. diakses pada 9 Agustus 2017. <http://www.govtech.com/em/disaster/A-Decadeof Disasters 2000 2009.html>.
- Livescience. “*The 10 Worst U.S. Natural Disaster*” Diakses pada tanggal 7 Agustus 2017. <https://www.livescience.com/11365-10-worst-natural-disasters.html>.
- Mova. “*Nepal-US Relation*”. diakses pada tanggal 9 Januari 2018. <http://mofa.gov.np/nepal-us-relations/>.
- Myrepublica.”*Nepal Inflation Highest in South Asia*”. diakses pada tanggal 5 Januari 2018. <http://www.myrepublica.com/news/2273/>.
- Nepaleconomicforum.”*Economic Impact of Earthquake – Agriculture*”. diakses tanggal 5 Januari 2018. <http://www.nepaleconomicforum.org/news/news.php?n=106>.
- Nepalcount. “*Nepalese Organization*”. Diakses pada 2 Januari 2018. <https://nepalcount.com/nepalese-organizations.html>.

- Newbusinessage. *"50 Years of Nepali Tourism"*.diakses pada tanggal 10 Januari 2018. <http://www.newbusinessage.com/MagazineArticles/view/1706>.
- Reliefweb. *"Haiti-Earthquake Factsheet #1, Fiscal Year (FY) 2010"*.diakses pada tanggal 10 Januari 2018. <https://reliefweb.int/report/haiti/haiti-earthquake-fact-sheet-1-fiscal-year-fy-2010>.
- Reuters *"UK should Cut Aid to Nepal if 'Endemic' Corruption Presist: Report"*.. diakses pada 8 Juni 2017. <http://www.reuters.com/article/us-britain-nepal-aid-corruption-idUSKBN0MN00F20150327>
- Sindonews. *"Target Pertumbuhan Ekonomi Nepal Sulit Tercapai"*.diakses pada 5 januari 2018. <https://ekbis.sindonews.com/read/1002466/35/target-pertumbuhan-ekonomi-nepal-sulit-tercapai-1431944571>
- State.*"U.S. Relation with Nepal"*. diakses 6 Juli 2017. <https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5283.htm>.
- Statista. *"Nepal Distribution of Gross Domestic Product (GDP) Across Economic Sectors From 2005 to 2015"*. <https://www.statista.com/statistics/425750/nepal-gdp-distribution-across-economic-sectors/>.
- Time. *"Nepal's Economy Will Take Years to Recover From the Deadly Earthquake"*. <http://time.com/3837817/nepal-earthquake-economicbusiness-financial-impact/>.
- Time. *"The Worst Natural Disaster in 2014"*. Diakses pada 9 Agustus 2017. <http://time.com/3630106/natural-disaster-weather-photos-2014/>.
- Thediplomat. *"Nepal's Unending Political Instability"*. diakses pada 8 Juni 2017. <http://thediplomat.com/2016/07/nepals-unending-political-instability/>
- The Himalayan Times. *"US-India-Nepal Alliance: Countering China"*. Diakses pada 11 September 2017. <https://thehimalayantimes.com/opinion/us-india-nepal-alliance-countering-china/>
- The Rising Nepal. *"Ideological Deviation in Politics"*. Diakses pada 7 Juni 2017. <http://therisingnepal.org.np/news/14941>
- Transparencyinternational. *"Corruption Preception Index 2016"*. diakses pada 8 Juni 2017. https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
- USA. *"Branches of Government"*. Diakses pada tanggal 2 Januari 2018. <https://www.usa.gov/branches-of-government>.

USAID. “*2015 Nepal Earthquake*”.diakses pada tanggal 10 Januari 2018.
<https://www.usaid.gov/nepal-earthquake>.

USAID. “*Aid Trends*”.*Explore*. Diakses pada tanggal 2 Januari 2018. <https://explorer.usaid.gov/aid-trends.html>

USAID. ”*Budget*”. Diakses 3 Juli 2017. <https://www.usaid.gov/resultsand data/budget-spending>

USAID.”*Evaluation*”.diakses pada tanggal 2 Januari 2018. <https://www.usaid.gov/evaluation>

USAID. “*History*”. Diakses pada tanggal 5 Desember 2017.<https://www.usaid.gov/nepal/history>

USAID. “*Nepal Eartquake Fact Sheet #1*”. diakes 11 Juli 2017.
<https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/12.23.15%20-%20USAIDDDCHA%20Nepal%20Earthquake%20Fact%20Sheet%20%231%20%281%29.pdf>

USAID. “*Nepal Earthquake-factsheet #1 (FY 2016)*”.diakses pada 9 Januari 2018.
<https://www.usaid.gov/nepal-earthquake/fy16/fs01>.

USAID. “*Nepal Earthquake-Factsheet #2*”. diakses pada 2 januari 2018.
<https://www.usaid.gov/nepal-earthquake/fy15/fs02>.

USAID. “*Nepal Earthquake-Factsheet #3*”. diakses pada 2 januari 2018.
<https://www.usaid.gov/nepal-earthquake/fy15/fs04>.

USAID. “*Nepal Earthquake-Factsheet #7*”. Diakses pada 2 januari 2018.
<https://www.usaid.gov/nepal-earthquake/fy15/fs07>

USAID. “*Nepal Earthquake-Factsheet #9*”. diakses pada 2 Januari 2018.
<https://www.usaid.gov/nepal-earthquake/fy15/fs09>.

USAID. “*Nepal Earthquake-Factsheet #13*”. Diakses pada 2 Januari 2018.
<https://www.usaid.gov/nepal-earthquake/fy15/fs13>.

USAID. “*Nepal Earthquake-Factsheet #15*”. Diakses pada 2 Januari 2018.
<https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/05.20.15-USAID-DCHANepalEarthquakeFactSheet15.pdf>.

USAID. “*Mission, Vision, and Values*”... diakses 3 Juli 2017.
<https://www.usaid.gov/who-we-are/mission-vision-values>.

USAID. “*Non-Governmental Organizations(NGOs)*”. diakses 11 Juli 2018
<https://www.usaid.gov/partnership-opportunities/ngo>.

USAID. “*USAID Arrives in Nepal, Earthquake Response Effort Begin*”. 29 April 2015. Diakses 11 Juli 2017. <https://blog.usaid.gov/2015/04/usaaid-arrives-in-nepal-earthquake-response-efforts-begin/>

USAID. “*USAID Partners*”. diakses pada 3 Januari 2018. <https://www.usaid.gov/work-usaid/resources-for-partners/usaaid-partners>.

USAID. “*USAID Post Earthquake Contributions for Housing Reconstruction*”. diakses pada tanggal 5 Januari 2018. <https://www.usaid.gov/nepal/fact-sheets/usaaid-post-earthquake-contributions-housing-reconstruction>

USAID. “*US Announces \$130 Million Contribution to Nepal to Built Back Better*”. Diakses 11 Juli 2017. <https://www.usaid.gov/nepal/fact-sheets/us-announces-130-million-contribution-nepal-build-back-better>.

USAID. “*Who We Are*”. diakses pada 2 Januari 2018. <https://www.usaid.gov/who-we-are>.

Usembassy. “*Statement by Secretary Kerry: The Earthquake in Nepal*”. Diakses pada tanggal 5 Januari 2018. <https://np.usembassy.gov/statement-secretary-kerry-earthquake-nepal/>.

Usgovernmentdebt “*Recent US Current Budget Deficit*”. Diakses tanggal 7 Agustus 2017. http://www.usgovernmentdebt.us/spending_chart_2006_2016USp_XXs2li111mcn_G0f_Recent_Federal_Deficits_as_Pct_GDP

Ustr. “*U.S.-Nepal Joint Statement on 3rd Trade and Investment Framework Council Meeting*” diakses pada tanggal 7 Pebruari 2018.
<https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/april/us-nepal-joint-statement-3rd-trade>.

Weforum. “*China’s \$900 Billion New Silk Road, What you Need to Know*”. diakses pada tanggal 9 Januari 2018.
<https://www.weforum.org/agenda/2017/06/china-new-silk-road-explainer/>

Weforum. “*The World’s 10 Biggest Economies in 2017*”. diakses pada tanggal 9 Januari 2018. <https://www.weforum.org/agenda/2017/03/worlds-biggest-economies-in-2017/>

Weforum. “*What’s Next for Nepal Economy?*”. diakses pada tanggal 5 Januari 2018. <https://www.weforum.org/agenda/2015/10/whats-next-for-nepals-economy/>

World Factbook. “*Nepal*”. Diakses pada tanggal 7 Juni 2017. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/np.html>

Worldbank. “*Nepal Product Export US\$ Thousand*”.diakses pada 2 januari 2018. <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/NPL/StartYear/2012/EndYear/2016/TradeFlow/Export/Indicator/XPRT-TRD-VL/Partner/USA/Product/All-Groups>.

Worldbank.“*Nepal Trade at a Glance: Most Recent Values*”. diakses pada 2 januari 2018. <https://wits.worldbank.org/CountrySnapshot/en/NPL> .

USAID Assistance Agreement No. 367-012 (3670182.00)

ASSISTANCE AGREEMENT
BETWEEN
THE UNITED STATES OF AMERICA
AND
THE GOVERNMENT OF NEPAL
FOR
USAID
FOREIGN ASSISTANCE PROGRAMS

September 22, 2009

Assistance Agreement

Table of Contents

Article 1: Purpose.

Article 2: Objectives of the Assistance and Results.

Section 2.1. Objectives.

Section 2.2. Results.

Section 2.3. Annex 1, Amplified Description.

Article 3: Contributions of the Parties.

Section 3.1. USAID Contribution.

Section 3.2. Grantee Contribution.

Article 4: Completion Date.

Article 5: Conditions Precedent to Disbursement.

Section 5.1. First Disbursement.

Section 5.2. Notification.

Section 5.3. Terminal Date for Conditions Precedent.

Article 6: Special Covenants.

Section 6.1. Required Documents.

Section 6.2. Procurement and Disbursement of Funds.

Section 6.3. Taxation.

Article 7: Miscellaneous.

Section 7.1. Communications.

Section 7.2. Representatives.

Section 7.3. Standard Provisions Annex.

Annex 1: Amplified Description.

Annex 2: Standard Provisions.

ASSISTANCE AGREEMENT

Dated: September 22, 2009

Between

The United States of America, acting through the United States Agency for International Development ("USAID")

and

The Government of Nepal (hereinafter referred to as the "Government of Nepal" or "Grantee")

Article 1: Purpose.

The purpose of this Assistance Agreement (the "Agreement") is to set out the understanding of the parties named above (the "Parties") in connection with the Objectives described below.

Article 2: Objectives of the Assistance and Results.

Section 2.1. Objectives. In an effort to assist the Government of Nepal to build and sustain a democratic, well-governed state that responds to the needs of its people and reduces widespread poverty, the following six objectives will be pursued under this agreement: 1. Peace and Security; 2. Governing Justly and Democratically; 3. Investing in People; 4. Economic Growth; 5. Humanitarian Assistance; and 6. Program Development and Program Administrative Costs (the "Objectives").

Description of Objectives:

1. **Peace and Security:** To help nations effectively establish the conditions and capacity for achieving peace, security, and stability; and for responding effectively against rising threats to national or international security and stability.
2. **Governing Justly and Democratically:** To promote and strengthen effective democracies in recipient states and move them along a continuum toward democratic consolidation.
3. **Investing in People:** To help nations achieve sustainable improvements in the well-being and productivity of their populations through effective and accountable investments in education, health, and other social services.
4. **Economic Growth:** To generate rapid, sustained, and broad-based economic growth.

5. **Humanitarian Assistance:** To strengthen national capacity to respond to disasters and address the needs of vulnerable populations.

6. **Program Development and Program Administrative Costs:** To provide the general management support required to ensure completion of U.S. foreign assistance objectives by facilitating program management, accounting and tracking for costs.

Section 2.2. Results. In order to achieve the Objectives, the Parties agree to work together to achieve progress against the indicators described in Annex 1, Amplified Description.

Section 2.3. Annex 1, Amplified Description. Annex 1, Amplified Description (attached hereto and forming part of this Agreement), further describes the Objectives as well as indicators that will be used to measure the progress and achievement in each of the Objectives. Within the limits of the definitions of the Objectives set forth in Section 2.1, Annex 1 may be changed by written agreement of the authorized representatives of the Parties without formal amendment of this Agreement.

Article 3: Contributions of the Parties.

Section 3.1. USAID Contribution.

(a) The Grant. To help achieve the Objectives set forth in this Agreement, USAID, pursuant to the Foreign Assistance Act of 1961, as amended, hereby grants to the Grantee under the terms of the Agreement an amount not to exceed \$40,720,292 (Forty Million Seven Hundred Twenty Thousand Two Hundred Ninety-Two United States ("U.S.") Dollars) (the "Grant").

(b) Total Estimated USAID Contribution. USAID's total estimated contribution to achievement of the Objectives will be U.S. \$205,000,000 (Two Hundred Five Million U.S. Dollars), which will be provided in increments. Subsequent increments in excess of the amount granted in Section 3.1(a) of this Agreement will be subject to the availability of funds to USAID for this purpose and the mutual agreement of the Parties, at the time of each subsequent increment, to proceed. The Parties agree that each such subsequent incremental contribution provided, if any, shall cumulatively increase the total amount of the Grant set forth in Section 3.1(a) and consequently may increase the Grantee's contribution per Section 3.2.

(c) If at any time USAID determines that its contribution under Section 3.1(a) exceeds the amount which reasonably can be committed for achieving the Objectives during the current or next U.S. fiscal year, USAID may, upon written notice to the Grantee, withdraw the excess amount, thereby reducing the amount of the Grant as set forth in Section 3.1(a). Actions taken pursuant to this subsection will not revise USAID's total estimated contribution set forth in 3.1(b).

Section 3.2. Grantee Contribution.

(a) The Grantee agrees to provide or cause to be provided all funds, in addition to those provided by USAID and any other donor identified in Annex 1, and all other resources required to complete, on or before the Completion Date, all activities necessary to achieve the Objectives.

(b) The Grantee's contribution, based on USAID's contribution in Section 3.1(a), will not be less than the equivalent of one-fourth of the portion of the Grant that is used to support activities that directly benefit the Grantee or involves the direct and substantial involvement of the Government of Nepal in the administration, control or management of such assistance, provided that such amount may be reduced with the written consent of USAID. The Grantee's contribution may include either cash or in-kind contributions or both. The dollar equivalent amount of the Grantee's contribution shall be set forth in an Implementation Letter (as defined in Annex 2, Standard Provisions, attached hereto and hereinafter defined) and shall be subsequently included in the Illustrative Financial Plan included in Annex 1 of this Agreement. The amount of the Grantee's contribution shall be adjusted upon any increase in the amount of the Grant set forth in Section 3.1(a), in accordance with the formula described in the first sentence of this paragraph, and the precise amount of such adjustment shall be indicated in an Implementation Letter. The Grantee will report at least annually in a format to be agreed upon with USAID on its cash and in-kind contributions.

Article 4: Completion Date.

(a) The Completion Date, which is September 30, 2014, or such other date as the Parties may agree to in writing, is the date by which the Parties estimate that all the activities necessary to achieve the Objectives will be completed.

(b) Except as USAID may otherwise agree to in writing, USAID will not issue or approve documentation that would authorize disbursement of the Grant for services performed or goods furnished after the Completion Date.

(c) Requests for disbursement, accompanied by necessary supporting documentation prescribed in Implementation Letters, are to be received by USAID no later than nine (9) months following the Completion Date, or such other period as USAID agrees to in writing before or after such period. After such period USAID, at any time or times, may give notice in writing to the Grantee and reduce the amount of the Grant by all or any part thereof for which requests for disbursement, accompanied by necessary supporting documentation prescribed in Implementation Letters, were not received before the expiration of such period.

Article 5: Conditions Precedent to Disbursement.

Section 5.1. First Disbursement. Prior to the first disbursement under the Grant, or to the issuance by USAID of documentation pursuant to which disbursement

will be made, the Grantee will, except as the Parties may otherwise agree in writing, furnish to USAID in form and substance satisfactory to USAID:

(a) An opinion of counsel acceptable to USAID that: (i) this Agreement has been duly authorized or ratified by, and executed on behalf of the Grantee; (ii) this Agreement constitutes a valid and legally binding obligation of the Grantee in accordance with all of its terms; and (iii) all internal actions and approvals necessary to give effect to this Agreement have been obtained by or on behalf of the Grantee; and

(b) A signed statement in the name of the person holding or acting in the office of the Grantee specified in Section 7.2, which designates by name and title any additional representatives each of whom may act pursuant to Section 7.2.

Section 5.2. Notification. USAID will promptly notify the Grantee when USAID has determined that the conditions precedent have been met.

Section 5.3. Terminal Date for Conditions Precedent. The terminal date for meeting the conditions specified in Section 5.1 is 30 (thirty) days from the date of this Agreement or such later date as USAID may agree to in writing before or after the above terminal date. If the conditions precedent in Section 5.1 have not been met by the above terminal date, USAID, at any time, may terminate this Agreement by written notice to the Grantee.

Article 6: Special Covenants.

Section 6.1. Required Documents. The Grantee, in conjunction with the appropriate Government of Nepal ministries and offices, hereby covenants and agrees to issue, renew and/or extend free of charge and in a timely manner all official permits, visas, exemptions and any other permissions (including all approvals as may be required from time to time to ensure full access to information, project sites and relevant offices) for the Applicable Persons (as defined below) carrying out activities financed by USAID under this Agreement (collectively, the "Required Documents"). For purposes of this provision, Applicable Persons is defined as: (1) employees and consultants of any contractors, grantees and other organizations carrying out activities financed by USAID under this Agreement; and (2) members of such employees' and consultants' households. Any renewals or extensions of such Required Documents that are required, or become required, in order for such employees, consultants and dependent family members to legally reside in Nepal and undertake the activities contemplated by and financed under this Agreement shall also be issued free of charge.

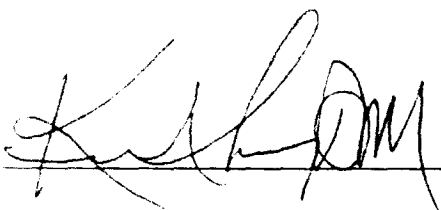
Section 6.2. Procurement and Disbursement of Funds. The Grantee agrees that any or all funds under the Grant may be contracted, granted, or otherwise committed and disbursed directly by USAID to third parties in accordance with USAID's normal regulations and procedures and in coordination with the Government of Nepal, unless otherwise agreed to by USAID in writing.

subsequently holding or acting in the office of such representatives) in accordance with this Section 7.2, until receipt of written notice of revocation of their authority.

Section 7.3. Standard Provisions Annex. Annex 2, Standard Provisions, is attached to and forms part of this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the United States of America and the Grantee, each acting through its duly authorized representatives, have caused this Agreement to be signed in their names and delivered as of the day and year first above written.

ON BEHALF OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

By: 

Name: Kevin A. Rushing, DVM

Title: Mission Director
USAID/Nepal

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
OF NEPAL

By: 

Name: Kapil Dev Ghimire

Title: Joint Secretary
Ministry of Finance

Section 6.3. Taxation. As set forth in greater detail in Annex 2, Standard Provisions (attached hereto and hereinafter defined), the Grantee agrees to ensure that assistance provided under this Agreement will not be subject to any taxation.

Article 7: Miscellaneous.

Section 7.1. Communications. Any notice, request, document, or other communication submitted by either Party to the other under this Agreement will be in writing or by telegram, telefax, cable or electronic mail ("e-mail"), and will be deemed duly given or sent when delivered to such Party at the following address:

To USAID:

Mail Address:
United States Agency for International Development
U.S. Embassy
P.O. Box 295
Maharajgunj
Kathmandu, Nepal

Telefax: 977-1-400-7285

E-mail: krushing@usaid.gov; lmeline@usaid.gov

To the Grantee:

Mail Address:
Secretary or Joint Secretary
Foreign Aid Coordination Division
Ministry of Finance
Singh Durbar
Kathmandu, Nepal

Telefax: 977-1-425-9891

E-mail: kghimire@mof.gov.np

All such communications will be in English, unless the Parties otherwise agree in writing. Other addresses may be substituted for the above upon the giving of notice.

Section 7.2. Representatives. For all purposes relevant to this Agreement, the Grantee will be represented by the individual holding or acting in the Office of the Secretary or Joint Secretary of the Ministry of Finance, and USAID will be represented by the individual holding or acting in the Office of the Mission Director, each of whom, by written notice, may designate additional representatives for all purposes other than signing formal amendments to the Agreement or exercising the authority under Section 2.3 to change Annex 1. The names and titles of the additional representatives of the Grantee will be provided pursuant to Section 5.1(b) to USAID, which may accept as duly authorized any instrument signed by such additional representatives (or any individuals

ANNEX 1

Amplified Description

Annex 1 to Assistance Agreement Amplified Description

I. Introduction.

This Annex 1 describes the activities to be undertaken and the progress and achievements to be made with the funds obligated under this Agreement. Terms used in this Annex 1 have the same meaning or reference as in the Agreement, and nothing in this Annex 1 shall be construed as amending any of the definitions or terms of the Agreement.

II. Background.

The United States has had a positive and productive relationship with Nepal for more than 55 years and has contributed more than \$1 billion in assistance. This assistance has affected the lives of the Nepali people in measurable ways. For example, during the last 25 years, U.S. assistance has helped Nepal reduce the fertility rate from 6.3 to 3.1 children per woman. In just the last 10 to 15 years, USAID has also helped to increase contraceptive prevalence from 15% to 44.2% and lower under-five mortality by 52%. In recent years, more than 275,000 rural farmers have increased their incomes by at least 50% and 735,000 Nepalese now benefit from access to rural roads as a result of U.S. assistance programs.

Following a decade-long insurgency, Nepal has sustained a comprehensive peace agreement for more than three years and has taken major steps toward instituting democratic constitutional rule. The monarchy has been abolished and a representative Constituent Assembly has been elected to draft a new constitution and serve as an interim legislative body. There is a broad national consensus on the need to address critical development challenges and on the need for political reform.

USAID anticipates that Nepal will continue to seek assistance to address peace-building, democracy, and governance objectives. Sustained robust U.S. assistance will also be needed for longer-term development priorities in the health, natural resource management, and economic growth sectors to facilitate a more durable peace and put Nepal more firmly on the path of development.

In all of USAID/Nepal's foreign assistance Objectives, there will be a special focus on social inclusion and supporting Nepal's youth. USAID recognizes the critical importance of the broad participation of all members of society, particularly those who were historically disadvantaged, and of the youth of Nepal. It is one of the Mission's highest priorities to engage with these groups in pursuit of all activities under this Agreement.

III. Funding.

Financial Plan. The financial plan for the Objectives is set forth in the attached table. Changes may be made to the financial plan by representatives of the Parties without

formal amendment to the Agreement, if such changes do not cause (1) USAID's contribution to exceed the amount specified in Section 3.1 of the Agreement; or (2) the Grantee's contribution to be less than the amount called for in Section 3.2 of the Agreement.

IV. Activities/Activity Selection.

“Peace and Security” Objective

The Peace and Security program will support peace-building at the national and local levels. Assistance will be provided to continue to strengthen national and local peace structures and promote engagement of disadvantaged groups, including Terai communities, in the peace process. The program will build on the achievements of past programs and will prioritize activities that rebuild conflict-affected communities.

Assistance to support national and local peace structures may include technical assistance and training for both the Government of Nepal (GON) and civil society organizations. USAID may provide technical support to transitional peace structures that may be formed in concurrence with the Comprehensive Peace Agreement, such as a Truth and Reconciliation Commission, High Level Peace Commission, Commission for Disappearance, and Local Peace Committees.

USAID support to civil society will help to shape the national peace dialogue, advance human rights protection, promote and build networking capacity, and disseminate information and gather public opinion on peace-building and transition issues. USAID will also support community-level peace and reconciliation processes. Illustrative activities include: community dialogue and mediation; small infrastructure repair; local development projects; and, strengthening of civil society organizations to facilitate peaceful advocacy and monitoring of the peace process.

USAID will also launch a new anti-trafficking-in-persons (TIP) program. This program will focus on three priority programmatic areas in Nepal: prevention; prosecution; and protection. Illustrative activities include: increasing public awareness of TIP; establishing and supporting safe-migration protocols; strengthening the capacity of Nepal's institutions to combat TIP; providing life skills and vocational training to those particularly at risk to trafficking and trafficking survivors in order to provide alternative employment opportunities; providing services that address the social and economic rehabilitation of the survivors; strengthening protection efforts by providing trainings on safe migration; applying standard operating procedures during rescue and rehabilitation; and training court staff, prosecutors, judges, law enforcement and social service agencies on trafficking guidelines, existing laws, and witness protection issues.

“Governing Justly and Democratically” Objective

USAID's Governing Justly and Democratically program will bolster democratic approaches to politics and governance, address key transitional processes and issues.

foster greater inclusion of disadvantaged groups, protect and support independent media, and monitor the political transition and improve public understanding of it.

USAID's programs to strengthen good governance at the national level will support Nepal's legislative functions and processes to institutionalize and uphold democratic practices. More specifically, USAID will provide technical assistance and training, as requested, to build the capacity of the Constituent Assembly/Parliament to serve as a legislative body and to reach out to constituents, civil society, and marginalized groups. USAID will also support citizen groups and organizations to help them understand and participate in legislative proceedings. At the local level, USAID plans to support government and civil society to improve service delivery to disadvantaged communities, particularly in the Terai region. This may include assisting local government officials to plan, manage, deliver, and account for local public goods and services.

USAID will continue to support peaceful political competition by creating and strengthening vehicles for all Nepalis to engage in political institutions and processes. Interventions in this area will focus on supporting systems and institutions to make the constitution drafting process transparent and participatory; strengthening elections and political processes; and assisting political parties to be more representative, democratic, and responsive to their constituencies. Illustrative activities include, but are not limited to: technical assistance (e.g., constitutional expertise, comparative research and other types of information) and training to members and staff of the Constituent Assembly/Parliament; support to civil society organizations to conduct civic education, including on the scope and limitations of a constitution; technical assistance and training to the Election Commission of Nepal and selected civil society organizations; support for reform of the voter registry system to conduct voter information/education campaigns; and technical assistance and training for political parties to reform internal party governing structures to foster more internally democratic practices, improve constituency outreach, address issues of marginalized groups within parties, and develop party platforms. USAID may also support media and local civil society organizations to constructively participate in the constitution-writing process, build their democratic oversight role, and communicate their communities' concerns to their elected representatives.

USAID may also support a Rule of Law program that will complement the efforts being undertaken by the GON and build the capacity of civil society organizations to foster public confidence and demand for an independent judiciary. Illustrative activities may include, but are not limited to: support to civil society to advocate for fair and accountable judicial processes and monitor and report publicly on judicial performance; strengthening court administration; and expanding access to justice by supporting the judiciary's efforts to introduce additional court-referred mediation centers and by making available additional legal aid services to poor and disadvantaged groups. USAID will continue to support the promotion and protection of human rights in Nepal, in part by building the capacity of national institutions to promote and protect human rights.

“Investing in People” Objective

USAID's Investing in People programs will assist the GON to provide sustainable, accessible, and quality basic health services to its people, particularly the poor, and strengthen its delivery systems to ensure achievement of its 2015 Millennium Development Goals (MDGs) for health. U.S. Foreign assistance programs will coordinate closely with the Ministry of Health and Population (MOHP) and other health sector donors to achieve maximum impact through the development of a unified Nepal Health Sector Implementation Plan – Phase II (2010 to 2015).

USAID will support the achievement of GON health sector goals in voluntary family planning and reproductive health; maternal, neonatal and child health; nutrition; and HIV/AIDS programs. Assistance to the GON to expand proven interventions that reduce maternal, neonatal and child mortality in more areas will continue, as well as testing and documenting new approaches that focus on community-based, life-saving interventions. Programs will target women, traditionally excluded groups, and groups disadvantaged by health status. All program elements address cross-cutting themes including gender, civil society and community mobilization, inclusive development, local institutional capacity building, TIP, and youth.

More specifically, USAID programs aim to stabilize and reduce HIV prevalence levels in key, high-transmission groups. This includes surveillance of the epidemic; policy development; prevention, care and supply chain management for treatment; and improving the capacity of the local non-government and private sector and the GON to deliver high-quality HIV-related services.

In the Maternal and Child Health program element, USAID will also support the GON in increasing deliveries in health facilities; increasing deliveries attended by skilled birth attendants; and expanding the following three proven health interventions to reach more Nepalis: misoprostol to prevent post partum hemorrhage; the application of chlorhexadine for umbilical cord care to prevent infection; and the distribution of calcium to pregnant women to prevent eclampsia and pre-eclampsia.

USAID will also help the GON to expand the Community-Based Integrated Management of Childhood Illness (CB-IMCI) and Community-Based Maternal and Newborn Care (CB-MNC) programs that help reduce under-five and maternal mortality through comprehensive and coordinated care. Concurrently, USAID will continue support for the national Vitamin A program, polio immunization, Avian Influenza surveillance and preparedness, and other infectious disease surveillance initiatives.

USAID, in coordination with other stakeholders and the GON, plans to design and implement a comprehensive nutrition activity to address malnutrition of women and children. This activity will be designed based on recommendations provided from a joint National Nutrition Assessment to be completed in August 2009.

USAID plans to continue to provide leadership and management training for health facility management committees. The support will focus on: management, monitoring, social inclusion of underrepresented community members, and community mobilization.

USAID will continue to support the National Family Planning Program by providing technical assistance nationally and in districts and sub-districts, to ensure year-round availability of voluntary, comprehensive quality family planning services. This will include addressing the challenges of hard-to-reach geographic areas as well as families with men who migrate seasonally, younger married couples and socially and economically marginalized populations. To strengthen appropriate and rational availability of family planning commodities in the public sector, USAID will maintain support of the GON's procurement and logistics management information system. Assistance will also continue to support initiatives that encourage the use of subsidized health products and services such as condoms and other temporary methods of contraception using social marketing mechanisms. USAID will continue to supply donated contraceptive commodities to ensure that subsidized family planning products reach those most in need.

USAID will seek to improve the quality of services for victims of armed conflict and others who have suffered mobility-related injuries. USAID will work with the GON and local service organizations to provide treatment and community-based rehabilitation services to people living with disabilities and to improve the quality of rehabilitation treatment services available in Nepal.

USAID will also work with the GON to improve primary school retention levels and learning outcomes through a comprehensive Early Childhood Development (ECD) program. USAID will help to revise the ECD as needed and support teacher training. This activity could also include support for non-formal home-based care, parenting orientation and parent community groups as well as support for child development centers which would provide a holistic learning environment and instruction for pre-school-aged children.

"Economic Growth" Objective

In 2009 USAID will launch a comprehensive economic growth program aimed at improving the foundation for rapid, sustained, and inclusive economic growth. Program activities will support the GON, the private sector, and civil society organizations to foster a conducive business environment for private sector-led growth; encourage competitiveness and exports in selected agricultural and non-agricultural commodities or services; increase agricultural productivity to enhance food security; improve trade and fiscal policies and practices to facilitate trade and increase revenues without distorting the economy; strengthen microfinance policies and institutions to further the participation of the poor; and train youth and disadvantaged groups to contribute productively to the economy.

Proposed assistance for macroeconomic policy development will be focused on improving fiscal policy. At the request of the GON, USAID plans to provide technical assistance, training and limited commodity support to help the GON improve revenue collection.

In the area of trade and investment, USAID plans to work with business associations, chambers of commerce, civil society, and consumer groups and firms to identify constraints and opportunities. USAID will then help actors along the value chain, from producers to manufacturers to wholesalers, to plan sector-enhancing strategies. Program interventions may focus on agricultural commodities with the greatest potential for high-value export: non-timber forest products, off-season vegetables, essential oils, tea, and coffee, cardamom, lentils, and honey. Potential non-agricultural exportable products and services may include: tourism, overseas employment, gems and jewelry, and wooden handicrafts. Quality, price, timing, transparency, and dependability will be promoted as part of a market-driven, private-sector approach. USAID will strive to create equitable opportunities for disadvantaged groups to market and brand their own products. In addition, USAID will promote the formation of private-public partnerships in an effort to form lasting business relationships between producers and wholesalers.

USAID will also aim to improve the competitiveness and the production of selected exportable agricultural products by providing technical assistance in production and marketing to all players in the value chain, from farmers to manufacturers to wholesalers. Technical assistance will also be provided to aid both government and civil society to create a business environment which supports rapid, sustained and inclusive economic growth. This program will encourage private-public partnerships, and the inclusion of disadvantaged groups, and will support microenterprise activity. Additionally it will support pilot projects focused on innovative production, processing, and/or marketing ideas for commodities or services. The project may also use funding to increase and improve existing production, processing and marketing practices.

To improve private sector competitiveness, USAID will implement a range of activities to improve the business environment, enhance competition and encourage business expansion. Likely interventions include technical support for key institutions, including regional chambers of commerce and industry and the National Planning Commission; and assisting with preparation and active dissemination of economic policy analyses on topics such as: the role of the private sector in creating wealth and jobs in a market economy; essential reforms to ensure private sector investment and inclusive growth; and trade reform for growth.

USAID's assistance for the environment will be two-pronged, consisting of community-based interventions in priority geographic areas and policy and legal reform activities focused on improving the enabling policy and legal environment. USAID's policy and legal activities will engage at the national and local-levels to encourage the inclusion of community rights to natural resources in the constitutional and federal process, as well as any new policies and regulations. USAID will also build on its success in working with local communities that are dependent on the environment for their livelihoods to

improve biodiversity conservation and sustainable forest management while also improving income.

USAID's vocational education program will combine skills training, literacy, and targeted scholarships for disadvantaged youth - including internally-displaced persons, low-caste groups, ethnic minorities, and girls - aimed at building a functionally literate and employable workforce in underserved communities.

"Humanitarian Assistance" Objective

USAID's support for humanitarian assistance and recovery seeks to strengthen national capacity to respond to disasters and address the needs of vulnerable populations. Specifically, USAID will continue its flood recovery program, which re-builds the livelihoods of flood-affected communities in a way that will leave them more prepared in the event of future flooding. Because floods have damaged crops and arable land, water and sanitation sources, and community infrastructure, all of these sub-sectors need to be addressed through comprehensive recovery interventions. USAID assistance will integrate livelihoods, health, and infrastructure interventions for increased efficiency and synergies.

The program supports rehabilitation and rebuilding of small-scale infrastructure; provision of income-generation activities; improved sanitation, hygiene and nutrition; strengthening of local peace committees or other local groups; and the protection of women and children, all with the aim of making communities less vulnerable to future floods.

"Program Development and Program Administrative Costs" Objective

Under this Objective, funds will be used to support the following illustrative program-funded costs: salaries of staff working for the U.S. Government managing, administering, and supporting programs and their program-funded benefits; the program-funded share of operational expenses including utilities; equipment and supplies; vehicle fuel and maintenance; institutional contractors that provide such staff; and staff training costs and the cost of developing and administering training programs.

In addition, funds will also be used to develop and conduct needs assessments, baseline studies, targeted evaluations, special studies or other information-gathering efforts specifically for the design, monitoring and evaluation of USG-funded programs. Activities may also include developing and disseminating best practices and lessons learned, testing demonstration and/or pilot models, or the preparation of strategic plans and other short-term programming tasks. Funds may also be used for web page development and maintenance; outreach such as publications and the cost of their preparation (including staff costs); and technical assistance to ensure USG compliance with regulations.

V. Indicators.

A representative sample of the main indicators of performance under each Objective is listed below. They are listed here as illustrative indicators only and will be modified as performance-monitoring plans are developed.

1. **“Peace and Security” Objective**

- Number of people in host country trained on TIP-related issues with USG assistance
- Number of public awareness campaigns about TIP completed
- Number of TIP victims assisted by USG programs
- Number of traffickers, smugglers and accomplices arrested in USG-assisted areas
- Number of USG-supported activities that demonstrate the positive impact of a peace process through the demonstration of tangible, practical benefits
- Number of USG-supported/facilitated events geared toward strengthening understanding among conflict-affected groups
- Number of people attending facilitated events that are geared toward strengthening understanding among conflict-affected groups that were supported with USG assistance

2. **“Governing Justly and Democratically” Objective**

- Number of justice sector personnel that received USG training
- Number of legal aid groups and law clinics assisted by USG
- Number of legal institutions and associations supported by USG
- Number of domestic human rights NGOs receiving USG support
- Number of national legislators and national legislative staff attending USG-sponsored training or educational events
- Number of public forums resulting from USG assistance in which national legislators and members of the public interact
- Number of USG-assisted civil society organizations that participate in legislative proceedings and/or engage in advocacy with national legislature and its committees
- Number of local mechanisms supported with USG assistance for citizens to engage their sub-national government
- Number of people reached by USG-assisted voter education
- Number of individuals who receive USG-assisted political party training

3. **“Investing in People” Objective**

- Number of individuals who received counseling and testing for HIV and received their test results
- Total number of individuals provided with HIV-related palliative care (including TB/HIV)

- Number of postpartum/newborn visits within 3 days of birth in USG-assisted programs
- Number of cases of child pneumonia treated with antibiotics by trained facility or community health workers in USG-supported programs
- Number of USG-assisted service delivery points experiencing stock-outs of specific tracer drugs and contraceptives
- Number of people trained in health through USG-supported programs
- Couple Years of Protection (CYP) in USG-supported programs
- Number of administrators and officials trained
- Number of teachers/educators trained with USG support

4. “Economic Growth” Objective

- Number of key personnel in fiscal policy and fiscal administration trained with USG assistance
- Number of consultative processes with private sector as a result of USG assistance
- Number of customs harmonization procedures implemented in accordance with internationally-accepted standards as a result of U.S. assistance
- Number of USG-supported training events held that related to improving the trade and investment environment
- Number of USG-supported training events on topics related to investment capacity building and improving trade
- Number of new technologies or management practices made available for transfer as a result of USG assistance
- Number of rural households benefiting directly from USG interventions
- Number of producers organizations, water users’ associations, trade and business associations, and community-based organizations (CBOs) receiving USG assistance
- Number of the core commercial laws drafted and presented for public/stakeholder consultation as a result of USG assistance
- Number of microfinance institutions supported by USG financial or technical assistance
- Number of people with increased economic benefits derived from sustainable natural resource management and conservation as a result of USG assistance
- Number of people receiving USG-supported training in global climate change including framework convention on climate change, greenhouse gas inventories, mitigation, and adaption analysis

5. “Humanitarian Assistance” Objective

- Number of beneficiaries assisted by USG-supported protection and solutions activities

6. “Program Development and Program Administrative Costs” Objective

USAID does not have indicators for program administrative costs. USAID uses the following indicators for program development activities:

- Number of baseline or feasibility studies, sector assessments, monitoring plans, evaluations conducted
- Number of people trained in monitoring and evaluation

VI. Roles and Responsibilities of the Parties.

Activities to be undertaken to achieve the Objectives under this Agreement will be implemented by USAID through Implementation Letters (as defined in Annex 2, Standard Provisions), contracts, grant agreements, cooperative agreements and interagency agreements, as appropriate.

The overall program of support will be reviewed at least once a year to assess the previous year's results. USAID will also prepare, review and approve of the next year's work plan. Once the work plan is approved, USAID will document the plan in an Implementation Letter to the Ministry of Finance.

USAID will be responsible for issuing and managing all USAID direct grants, sub-grants, cooperative agreements, contracts and interagency agreements funded under this Agreement. Implementing agencies (e.g., contractors or grantees) will be responsible for achieving the results set forth in their agreements with USAID, as well as for coordinating with appropriate GON offices and providing required support (including such in-kind resources as staff and office facilities) for specific activities undertaken with Ministries and/or other governmental bodies.

VII. Monitoring and Evaluation.

The Parties agree that activities being implemented to achieve the Objectives will be monitored regularly by USAID to assess progress towards achieving the desired results. Implementing entities will establish performance monitoring plans for their activities, including measurable indicators and timetables for collection of data. USAID will also establish a performance monitoring plan that builds on Objective-level indicators to enable the GON and USAID to measure progress towards achievement of Objectives. The Objective Team will meet at least once a year to review progress on indicators and overall program performance.

Performance monitoring will be used to direct program implementation, allocate resources, and identify and evaluate problem areas or constraints that may inhibit achievement of results. Consistent with applicable USAID rules, regulations and policies, USAID agrees to make available all information in its possession, and the GON will share with USAID all information it possesses, in order to determine whether the results have been met.

Illustrative Financial Plan

Assistance Agreement
USAID Agreement No. 3670182.00

USAID Foreign Assistance Programs
(USAID Contribution)

(in US \$)

Program Objective	Program Objective Name	Total Estimated USAID Contribution	Current Obligation Amount	Balance to be Contributed
1	Peace and Security	11,000,000	4,572,000	6,428,000
2	Governing Justly and Democratically	49,500,000	9,448,000	40,052,000
3	Investing in People	72,600,000	17,515,000	55,085,000
4	Economic Growth	52,500,000	5,855,000	46,645,000
5	Humanitarian Assistance	811,000	811,000	0
6	Program Development and Program Administrative Costs	18,589,000	2,519,292	16,069,708
Total		205,000,000	40,720,292	164,279,708

NOTE:

1. USAID may adjust the Objective budgets provided that the total USAID contribution is not exceeded. Such changes will be documented in an Implementation Letter.
2. The amount in the column entitled "Balance to be Contributed" is subject to the availability of funds and the other criteria in Section 3.1(b) of the Agreement.

Illustrative Financial Plan

Assistance Agreement
USAID Agreement No. 3670182.00

USAID Foreign Assistance Programs
(Grantee Contribution)

(in US \$)

Program Objective	Program Objective Name	Total Estimated Grantee Contribution	Current Contribution Amount	Balance to be Contributed
1	Peace and Security			
2	Governing Justly and Democratically			
3	Investing in People			
4	Economic Growth			
5	Humanitarian Assistance			
6	Program Development and Program Administrative Costs			
Total		0	0	0

NOTE:

1. Government of Nepal contributions will be determined in accordance with Section 3.2 of the agreement as activities and workplans are approved.

ANNEX 2

Standard Provisions

Annex 2 to Assistance Agreement

Standard Provisions

Table of Contents

Article A: Definitions and Implementation Letters.

Section A.1. Definitions.

Section A.2. Implementation Letters.

Article B: General Covenants.

Section B.1. Consultation.

Section B.2. Execution of Agreement.

Section B.3. Utilization of Goods and Services.

Section B.4. Taxation.

Section B.5. Reports and Information. Agreement Books and Records. Audits, and Inspections.

Section B.6. Completeness of Information.

Section B.7. Other Payments.

Section B.8. Information and Marking.

Article C: Procurement Provisions.

Section C.1. Source and Origin.

Section C.2. Eligibility Date.

Section C.3. Plans, Specifications and Contracts.

Section C.4. Reasonable Price.

Section C.5. Notification to Potential Suppliers.

Section C.6. Transportation.

Section C.7. Insurance.

Section C.8. U.S. Government-Owned Excess Property.

Article D: Disbursements.

Section D.1. Disbursement for Foreign Exchange Costs.

Section D.2. Disbursement for Local Currency Costs.

Section D.3. Other Forms of Disbursement.

Section D.4. Rate of Exchange.

Article E: Termination; Remedies.

Section E.1. Suspension and Termination.

Section E.2. Refunds.

Section E.3. Non-waiver of Remedies.

Section E.4. Assignment.

Article F: Miscellaneous.

Section F.1. Investment Promotion.

Section F.2. Voluntary Family Planning.

Section F.3. Prohibition on Assistance to Drug Traffickers.

Section F.4. Workers' Rights.

Section F.5. Terrorist Financing.

Section F.6. Prohibition on Funding Foreign Government Delegations to
International Conferences.

Annex 2 to Assistance Agreement

Standard Provisions

Article A: Definitions and Implementation Letters.

Section A.1. Definitions. As used in this Annex, the "Agreement" refers to the Assistance Agreement to which this Annex is attached and of which this Annex forms a part. Terms used in this Annex have the same meaning or reference as in the Agreement.

Section A.2. Implementation Letters. To assist the Grantee in the implementation of the Agreement, USAID, from time to time, will issue implementation letters ("Implementation Letters") that will furnish additional information about matters stated in this Agreement. The Parties may also issue jointly agreed-upon Implementation Letters to confirm and record their mutual understanding on aspects of the implementation of this Agreement. Implementation Letters can also be issued to record revisions or exceptions which are permitted by the Agreement.

Article B: General Covenants.

Section B.1. Consultation. The Parties will cooperate to assure that the Objective and Program Elements of this Agreement will be accomplished. To this end, the Parties, at the request of either, will exchange views on progress toward the Objectives and Program Elements, the performance of obligations under this Agreement, the performance of any consultants, contractors, or suppliers engaged under the Agreement, and other matters relating to the Agreement.

Section B.2. Execution of Agreement. The Grantee will:

(a) Carry out the Agreement and the activities required to be undertaken directly (or caused to be undertaken) by the Grantee, or cause the Agreement and such activities to be carried out with due diligence and efficiency, in conformity with sound technical, financial, and management practices, and in conformity with those documents, plans, specifications, contracts, schedules, or other arrangements, and with any modifications therein, approved by USAID pursuant to this Agreement; and

(b) Provide qualified and experienced management for, and train such staff as may be appropriate for the maintenance and operation of activities financed under the Agreement, and, as applicable for continuing activities, cause those activities to be operated and maintained in such manner as to ensure the continuing and successful achievement of the Objectives and indicators under the Agreement.

Section B.3. Utilization of Goods and Services. Any goods and services financed under this Agreement, unless otherwise agreed in writing by USAID, will be

devoted to the Agreement until the completion or termination of the Agreement, and thereafter (as well as during any period of suspension of the Agreement) will be used to further the Objectives of the Agreement or as USAID may direct in Implementation Letters.

Section B.4. Taxation.

(a) General Exemption. The Agreement and the assistance thereunder are free from any taxes imposed under laws in effect in the territory of the Grantee.

(b) Except as provided otherwise in this provision, the General Exemption in subsection (a) applies to, but is not limited to (1) any activity, contract, grant or other implementing agreement financed by USAID under this Agreement; (2) any transaction or supplies, equipment, materials, property or other goods (hereinafter collectively "goods") under (1) above; (3) any contractor, grantee, or other organization carrying out activities financed by USAID under this Agreement; (4) any employee of such organizations; and (5) any individual contractor or grantee carrying out activities financed by USAID under this Agreement.

(c) Except as provided otherwise in this provision, the General Exemption in subsection (a) applies to, but is not limited to, the following taxes:

(1) Exemption 1. Customs duties, tariffs, import taxes, or other levies on the importation, use and re-exportation of goods or the personal belongings and effects (including personally-owned automobiles) for the personal use of non-national individuals or their family members; provided however that any duty-free goods imported into Nepal under this Agreement may be subject to sales or other taxes if sold to those without duty-free privileges. Exemption 1 includes, but is not limited to, all charges based on the value of such imported goods, but does not include service charges directly related to services performed to transfer goods or cargo.

(2) Exemption 2. Taxes on the income, profits or property of all (i) non-national organizations of any type; (ii) non-national employees of national and non-national organizations; or (iii) non-national individual contractors and grantees. Exemption 2 includes income and social security taxes of all types and all taxes on the property, personal or real, owned by such non-national organizations or persons. The term "national" refers to organizations established under the laws of the Grantee and citizens of the Grantee, other than permanent resident aliens in the United States.

(3) Exemption 3. Taxes levied on the last transaction for the purchase of goods or services financed by USAID under this Agreement, including sales taxes, value-added taxes (VAT), or taxes on purchases or rentals of real or personal property. The term "last transaction" refers to the last transaction by

which the goods or services were purchased for use in the activities financed by USAID under this Agreement.

(d) If a tax has been levied and paid contrary to the provisions of an exemption, USAID may, in its discretion (1) require the Grantee to refund to USAID or to others as USAID may direct the amount of such tax with funds other than those provided under the Agreement; or (2) offset the amount of such tax from amounts to be disbursed under this or any other agreement between the Parties.

(e) In the event of a disagreement about the application of an exemption, the Parties agree to promptly meet and resolve such matters, guided by the principle that the assistance furnished by USAID is free from direct taxation, so that all of the assistance furnished by USAID will contribute directly to the economic development of the country of the Grantee.

Section B.5. Reports and Information, Agreement Books and Records, Audits, and Inspections.

(a) Reports and Information. The Grantee shall furnish USAID accounting records and such other information and reports relating to the Agreement as USAID may reasonably request.

(b) Grantee Agreement Books and Records. The Grantee shall maintain accounting books, records, documents and other evidence relating to the Agreement, adequate to show, without limitation, all costs incurred directly by the Grantee under the Agreement, the receipt and use of goods and services acquired by the Grantee under the Agreement, agreed-upon cost sharing requirements, the nature and extent of solicitations of prospective suppliers of goods and services acquired by the Grantee, the basis of award of contracts and orders made directly by the Grantee, and the overall progress of the Agreement toward completion ("Agreement books and records"). The Grantee shall maintain Agreement books and records in accordance with generally accepted accounting principles prevailing in the United States, or at the Grantee's option, with approval by USAID, other accounting principles, such as those (1) prescribed by the International Accounting Standards Committee (an affiliate of the International Federation of Accountants) or (2) prevailing in the country of the Grantee. Agreement books and records shall be maintained for at least three (3) years after the date of last disbursement by USAID or for such longer period, if any, required to resolve any litigation, claims or audit findings. For the avoidance of doubt, this Section B.5(b) applies solely to Grant funds expended directly by the Grantee.

(c) Grantee Audit. If \$300,000 or more of USAID funds are expended directly by the Grantee in its fiscal year under the Agreement, the Grantee shall have financial audits made of the expenditures in accordance with the following terms, except as the Parties may otherwise agree in writing:

(1) The Grantee shall use the Office of the Auditor General in accordance with the "Guidelines for Financial Audits Contracted by Foreign Recipients" issued by the USAID Inspector General ("Guidelines"), and the audits shall be performed in accordance with the Guidelines; and

(2) The audit shall determine whether the receipt and expenditure of the funds provided under the Agreement are presented in accordance with generally accepted accounting principles agreed to in subsection (b) above and whether the Grantee has complied with the terms of the Agreement. Each audit shall be completed no later than nine (9) months after the close of the Grantee's year under audit.

(d) Sub-recipient Audits. The Grantee, except as the Parties may otherwise agree in writing, shall submit to USAID, in form and substance satisfactory to USAID, a plan for the audit of the expenditures of "covered" sub-recipients, as defined below, that receive funds in connection with a direct contract or agreement entered into directly with the Grantee pursuant to the activities contemplated by this Agreement.

(1) A "covered" sub-recipient is one who expends \$300,000 or more in its fiscal year in "USAID awards" (i.e., as sub-recipients under USAID program objective and other grant agreements with foreign governments).

(2) The plan shall describe the methodology to be used by the Grantee to satisfy its audit responsibilities for covered sub-recipients. The Grantee may satisfy such audit responsibilities by relying on independent audits of the sub-recipients; expanding the scope of the independent financial audit of the Grantee to encompass testing of sub-recipients' accounts; or a combination of these procedures.

(3) The plan shall identify the funds made available to covered sub-recipients that will be covered by audits conducted in accordance with other audit provisions that would satisfy the Grantee's audit responsibilities. (A non-profit organization organized in the United States is required to arrange for its own audits. A for-profit contractor organized in the United States that has a direct contract with USAID is audited by the cognizant U.S. Government Agency. A private voluntary organization organized outside the United States with a direct grant from USAID is required to arrange for its own audits. A host-country contractor should be audited by the Grantee's auditing agency.)

(4) The Grantee shall ensure that covered sub-recipients under direct contracts or agreements with the Grantee take appropriate and timely corrective actions; consider whether sub-recipients' audits necessitate adjustment of its own records; and require each such sub-recipient to permit independent auditors to have access to records and financial statements as necessary.

(e) **Audit Reports.** The Grantee shall furnish or cause to be furnished to USAID an audit report for each audit arranged for by the Grantee in accordance with this Section within thirty (30) days after completion of the audit and no later than nine (9) months after the end of the period under audit.

(f) **Other Covered Sub-recipients.** For "covered" sub-recipients who receive funds under the Agreement pursuant to direct contracts or agreements with USAID, USAID will include appropriate audit requirements in such contracts or agreements and will, on behalf of the Grantee, conduct the follow-up activities with regard to the audit reports furnished pursuant to such requirements.

(g) **Cost of Audits.** Subject to USAID approval in writing, costs of audits performed in accordance with the terms of this Section may be charged to the Agreement.

(h) **Audit by USAID.** USAID retains the right to perform the audits required under this Agreement on behalf of the Grantee by utilizing funds under the Agreement or other resources available to USAID for this purpose, conduct a financial review, or otherwise ensure accountability of organizations expending USAID funds regardless of the audit requirement.

(i) **Opportunity to Audit or Inspect.** The Grantee shall afford authorized representatives of USAID the opportunity at all reasonable times to audit or inspect activities financed under the Agreement, the utilization of goods and services financed by USAID, and books, records and other documents relating to the Agreement.

(j) **Sub-recipient Books and Records.** The Grantee will incorporate paragraphs (a), (b), (d), (e), (g), (h) and (i) of this provision into all sub-agreements with non-U.S. organizations which meet the \$300,000 threshold of paragraph (c) of this provision. Sub-agreements with non-U.S. organizations, which do not meet the \$300,000 threshold, shall, at a minimum, incorporate paragraphs (h) and (i) of this provision. Sub-agreements with U.S. organizations shall state that the U.S. organization is subject to the audit requirements contained in OMB Circular A-133.

Section B.6. Completeness of Information. The Grantee confirms:

(a) that the facts and circumstances of which it has informed USAID, or caused USAID to be informed, in the course of reaching agreement with USAID on the Agreement, are accurate and complete, and include all facts and circumstances that might materially affect the Agreement and the discharge of responsibilities under this Agreement; and

(b) that it will inform USAID in timely fashion of any subsequent facts and circumstances that might materially affect, or that it is reasonable to believe might so affect, the Agreement or the discharge of responsibilities under this Agreement.

Section B.7. Other Payments. Grantee affirms that no payments have been or will be received by any official of the Grantee in connection with the procurement of goods or services financed under the Agreement, except fees, taxes, or similar payments legally established in the country of the Grantee.

Section B.8. Information and Marking. The Grantee will give appropriate publicity to the Agreement as a program to which the United States has contributed, identify Agreement activity sites, and mark goods financed by USAID, as described in Implementation Letters.

Article C: Procurement Provisions.

Section C.1. Source and Origin.

(a) Except as noted herein, or in a sub-agreement issued by USAID, Grant funds will be used to finance the cost of goods and services having their source and origin, and with respect to suppliers of goods and services, their nationality, in the United States. Exceptions to this requirement include local procurement transactions in accordance with USAID policy or procurements made after obtaining source, origin, and nationality waivers from USAID in writing.

Additionally:

(1) Ocean transportation costs shall be financed under the Agreement only on vessels under flag registry of countries included in Code 935. Also see Section C.6 on use of U.S. flag vessels.

(2) The country of the Grantee is an eligible source for foreign exchange cost for marine insurance, if otherwise eligible under Section C.7(a).

(3) Any motor vehicles financed under the Agreement will be of United States manufacture, except as USAID may otherwise agree in writing.

(b) Local Currency Costs. Disbursements for local currency costs will be used exclusively to finance the costs of goods and services required for the Agreement which meet the requirements of USAID's local procurement policy which will be provided in an Implementation Letter.

(c) The source and origin of ocean and air shipping will be deemed to be the ocean vessel's or aircraft's country of registry at the time of shipment.

(d) Provisions concerning restricted and ineligible goods and services may be provided in an Implementation Letter.

(e) Transportation by air of property or persons financed under this Agreement will be on carriers holding United States certification, to the extent service by

such carriers is available under the Fly America Act. This requirement may be further described by USAID in Implementation Letters.

Section C.2. Eligibility Date. No goods or services may be financed under the Agreement which are procured pursuant to orders or contracts firmly placed or entered into prior to the date of this Agreement, except as the Parties may otherwise agree in writing.

Section C.3. Plans, Specifications and Contracts. In order for there to be mutual agreement on the following matters, and except as the Parties may otherwise agree in writing:

(a) The Grantee will furnish to USAID upon preparation:

(1) any plans, specifications, procurement or construction schedules, contracts, or other documentation between the Grantee and third parties, relating to goods or services to be financed under the Agreement, including documentation relating to the prequalification and selection of contractors and to the solicitation of bids and proposals. Material modifications in such documentation will likewise be furnished USAID on preparation; and

(2) such documentation will also be furnished to USAID, upon preparation, relating to any goods or services, which, though not financed under the Agreement, are deemed by USAID to be of major importance to the Agreement. Aspects of the Agreement involving matters under this subsection (a)(2) will be identified in Implementation Letters.

(b) Documents related to the prequalification of contractors, and to the solicitation of bids or proposals for goods and services financed under the Agreement will be approved by USAID in writing prior to their issuance, and their terms will include United States standards and measurements;

(c) Contracts and contractors financed under the Agreement for engineering and other professional services, for construction services, and for such other services, equipment, or materials as may be specified in Implementation Letters, will be approved by USAID in writing prior to execution of the contract. Material modifications in such contracts will also be approved in writing by USAID prior to execution; and

(d) Consulting firms used by the Grantee for the Agreement but not financed under the Agreement, the scope of their services and such of their personnel assigned to activities financed under the Agreement as USAID may specify, and construction contractors used by the Grantee for the Agreement but not financed under the Agreement, shall be acceptable to USAID.

Section C.4. Reasonable Price. No more than reasonable prices will be paid for any goods or services financed, in whole or in part, under the Agreement. Such items will be procured on a fair and, to the maximum extent practicable, competitive basis.

Section C.5. Notification to Potential Suppliers. To permit all United States firms to have the opportunity to participate in furnishing goods and services to be financed under the Agreement, the Grantee will furnish USAID such information with regard thereto, and at such times, as USAID may request in Implementation Letters.

Section C.6. Transportation.

(a) In addition to the requirements in Section C.1(a), costs of ocean or air transportation and related delivery services may not be financed under the Agreement, if the costs are for transportation under an ocean vessel or air charter which has not received prior USAID approval.

(b) Unless USAID determines that privately-owned United States-flag commercial ocean vessels are not available at fair and reasonable rates for such vessels, or otherwise agrees in writing:

(1) at least fifty percent (50%) of the gross tonnage of all goods (computed separately for dry bulk carriers, dry cargo liners and tankers) financed by USAID which may be transported on ocean vessels will be transported on privately-owned United States-flag commercial vessels; and

(2) at least fifty percent (50%) of the gross freight revenue generated by all shipments financed by USAID and transported to the territory of the Grantee on dry cargo liners shall be paid to or for the benefit of privately owned United States-flag commercial vessels. Compliance with the requirements of (1) and (2) of this subsection must be achieved with respect to both any cargo transported from U.S. ports and any cargo transported from non-U.S. ports, computed separately.

Section C.7. Insurance.

(a) Marine insurance on goods financed by USAID which are to be transported to the territory of the Grantee may be financed as a foreign exchange cost under this Agreement provided

(1) such insurance is placed at the most advantageous competitive rate;

(2) such insurance is placed in a country which is authorized under Section C.1(a); and

(3) claims thereunder are payable in U.S. dollars or any freely convertible currency unless USAID agrees otherwise in writing.

If the Grantee (or government of the Grantee), by statute, decree, rule, regulation, or practice discriminates with respect to USAID-financed procurement against any marine insurance company authorized to do business in any State of the United States, then all goods shipped to the territory of the Grantee financed by USAID hereunder shall be insured against marine risks and such insurance shall be placed in the United States with a company or companies authorized to do marine insurance business in the United States.

(b) Except as USAID may otherwise agree in writing, the Grantee will insure, or cause to be insured, goods financed under the Agreement imported for the Agreement against risks incident to their transit to the point of their use under the Agreement; such insurance will be issued on terms and conditions consistent with sound commercial practice and will insure the full value of the goods. Any indemnification received by the Grantee under such insurance will be used to replace or repair any material damage or any loss of the goods insured or will be used to reimburse the Grantee for the replacement or repair of such goods. Any such replacement will be of source and origin of countries listed in USAID Geographic Code 935 as in effect at the time of replacement and, except as the Parties may agree in writing, will be otherwise subject to the provisions of the Agreement.

Section C.8. U.S. Government-Owned Excess Property. The Grantee agrees that wherever practicable United States Government-owned excess personal property, in lieu of new items financed under the Agreement, should be utilized. Funds under the Agreement may be used to finance the costs of obtaining such property.

Article D: Disbursements.

Section D.1. Disbursement for Foreign Exchange Costs.

(a) After satisfaction of conditions precedent, if any, the Grantee may obtain disbursements of funds under the Agreement for the foreign exchange costs of goods or services required for the Agreement in accordance with its terms, by such of the following methods as may be mutually agreed upon:

(1) by submitting to USAID, with necessary supporting documentation as prescribed in Implementation Letters (A) requests for reimbursement for such goods or services; or (B) requests for USAID to procure commodities or services in Grantee's behalf for the Agreement; or

(2) by requesting USAID to issue letters of commitment for specified amounts directly to one or more contractors or suppliers, committing USAID to pay such contractors or suppliers for such goods or services.

(b) Banking charges incurred by the Grantee in connection with letters of commitment will be financed under the Agreement unless the Grantee instructs USAID to the contrary. Such other charges as the Parties may agree to may also be financed under the Agreement.

Section D.2. Disbursement for Local Currency Costs.

(a) After satisfaction of conditions precedent, if any, the Grantee may obtain disbursements of funds under the Agreement for local currency costs required for the Agreement in accordance with terms of this Agreement, by submitting to USAID, with necessary supporting documentation as prescribed in Implementation Letters, requests to finance such costs.

(b) The local currency needed for such disbursements may be purchased by USAID with U.S. Dollars. The U.S. Dollar equivalent of the local currency made available hereunder will be the amount of U.S. Dollars required by USAID to obtain the local currency.

Section D.3. Other Forms of Disbursement. Disbursements may also be made through such other means as the Parties may agree to in writing.

Section D.4. Rate of Exchange. If funds provided under the Agreement are introduced into the country of the Grantee by USAID or any public or private agency for purposes of carrying out obligations of USAID hereunder, the Grantee will make such arrangements as may be necessary so that such funds may be converted into local currency at the highest rate of exchange which, at the time the conversion is made, is not unlawful in the country of the Grantee to any person for any purpose.

Article E: Termination; Remedies.

Section E.1. Suspension and Termination.

(a) Either Party may terminate this Agreement in its entirety by giving the other Party thirty (30) days' written notice. USAID also may terminate this Agreement in part by giving the Grantee thirty (30) days written notice, and suspend this Agreement in whole or in part upon giving the Grantee written notice. In addition, USAID may terminate this Agreement in whole or in part, upon giving the Grantee written notice, if (i) the Grantee fails to comply with any provision of this Agreement; (ii) an event occurs that USAID determines makes it improbable that the Objective or Program Elements of the Agreement or the assistance program will be attained or that the Grantee will be able to perform its obligations under this Agreement; or (iii) any disbursement or use of funds in the manner herein contemplated would be in violation of the legislation governing USAID, whether now or hereafter in effect.

(b) Except for payment which the Parties are committed to make pursuant to non-cancellable commitments entered into with third parties prior to such suspension or

termination, suspension or termination of this entire Agreement or part thereof will suspend (for the period of the suspension) or terminate, as applicable, any obligation of the Parties to provide financial or other resources to the Agreement, or to the suspended or terminated portion of the Agreement, as applicable. Any portion of this Agreement which is not suspended or terminated shall remain in full force and effect.

(c) In addition, upon such full or partial suspension or termination, USAID may, at USAID's expense, direct that title to goods financed under the Agreement, or under the applicable portion of the Agreement, be transferred to USAID if the goods are in a deliverable state.

Section E.2. Refunds.

(a) In the case of any disbursement which is not supported by valid documentation in accordance with this Agreement, or which is not made or used in accordance with this Agreement, or which was for goods or services not used in accordance with this Agreement, USAID, notwithstanding the availability or exercise of any other remedies under this Agreement, may require the Grantee to refund the amount of such disbursement in U.S. Dollars to USAID within sixty (60) days after receipt of a request therefor.

(b) If the failure of Grantee to comply with any of its obligations under this Agreement has the result that goods or services financed or supported under the Agreement are not used effectively in accordance with this Agreement, USAID may require the Grantee to refund all or any part of the amount of the disbursements under this Agreement for or in connection with such goods or services in U.S. Dollars to USAID within sixty (60) days after receipt of a request therefor.

(c) The right under subsections (a) or (b) to require a refund of a disbursement will continue, notwithstanding any other provision of this Agreement, for three (3) years from the date of the last disbursement under this Agreement.

(d) (1) Any refunds under subsections (a) or (b); or (2) any refund to USAID from a contractor, supplier, bank or other third party with respect to goods or services financed under the Agreement, which refund relates to an unreasonable price for or erroneous invoicing of goods or services, or to goods that did not conform to specifications, or to services that were inadequate, will (A) be made available first for the Agreement, to the extent justified, and (B) the remainder, if any, will be applied to reduce the amount of the Grant.

(e) Any interest or other earnings on funds disbursed by USAID to the Grantee under this Agreement prior to the authorized use of such funds for the Agreement will be returned to USAID in U.S. Dollars by the Grantee, unless USAID otherwise agrees in writing.

Section E.3. Non-waiver of Remedies. No delay in exercising any right or remedy accruing to a Party in connection with its financing under this Agreement will be construed as a waiver of such right or remedy.

Section E.4. Assignment. The Grantee agrees, upon request, to execute an assignment to USAID of any cause of action which may accrue to the Grantee in connection with or arising out of the contractual performance or breach of performance by a Party to a direct U.S. Dollar contract which USAID financed in whole or in part out of funds granted by USAID under this Agreement.

Article F: Miscellaneous.

Section F.1. Investment Promotion.

(a) Except as specifically set forth in the Agreement or otherwise authorized by USAID in writing, no funds or other support provided hereunder may be used for any activity that involves investment promotion in a foreign country.

(b) In the event the Grantee is requested or wishes to provide assistance in the above area or requires clarification from USAID as to whether the activity would be consistent with the limitation set forth above, the Grantee must notify USAID and provide a detailed description of the proposed activity. The Grantee must not proceed with the activity until advised by USAID that it may do so.

(c) The Grantee must ensure that its employees and subcontractors and sub-recipients providing investment promotion services hereunder are made aware of the restrictions set forth in this clause and must include this clause in all subcontracts and other sub-agreements entered into hereunder.

Section F.2. Voluntary Family Planning.

The Parties agree that all USAID funds provided under this Agreement shall be used in accordance with applicable United States policy and statutory requirements relating to voluntary family planning projects, and that none of the USAID funds provided under this Agreement, or goods or services financed by such funds, may be used for:

(a) the performance of abortion as a method of family planning or to motivate or coerce any person to practice abortions;

(b) the performance of involuntary sterilizations as a method of family planning or to coerce or provide any financial incentive to any person to undergo sterilizations; or

(c) any biomedical research which relates, in whole or in part, to methods of, or the performance of, abortions or involuntary sterilizations as a method family planning.

(d) The requirements of this Section are fully described below.

(1) Voluntary Participation and Family Planning Methods

(A) The Grantee shall take any steps necessary to ensure that USAID funds made available under this Agreement will not be used to coerce any individual to practice methods of family planning inconsistent with such individual's moral, philosophical, or religious beliefs. Further, the Grantee shall conduct its activities in a manner which safeguards the rights, health and welfare of all individuals who take part in the program.

(B) Activities which provide family planning services or information to individuals, financed in whole or in part under this Agreement, shall provide a broad range of family planning methods and services available in the country in which the activity is conducted or shall provide information to such individuals regarding where such methods and services may be obtained.

(2) Requirements for Voluntary Family Planning Projects

(A) A family planning "project" must comply with the requirements of this paragraph.

(B) A "project" is a discrete activity through which a governmental or nongovernmental organization or public international organization provides family planning services to people and for which funds obligated under this award, or goods or services financed with such funds, are provided under this Agreement, except funds solely for the participation of personnel in short-term, widely-attended training conferences or programs.

(C) Service providers and referral agents in the project shall not implement or be subject to quotas or other numerical targets of total number of births, number of family planning acceptors, or acceptors of a particular method of family planning. Quantitative estimates or indicators of the number of births, acceptors, and acceptors of a particular method that are used for the purpose of budgeting, planning, or reporting with respect to the project are not quotas or targets under this paragraph, unless service providers or referral agents in the project are required to achieve the estimates or indicators.

(D) The project shall not include the payment of incentives, bribes, gratuities or financial rewards to (i) any individual in exchange for becoming a family planning acceptor; or (ii) any personnel performing functions under the project for achieving a numerical quota or target of total number of births, number of family planning acceptors, or acceptors of a particular method of contraception. This restriction applies to salaries or payments paid or made to personnel performing functions under the project if the amount of the salary or payment increases or decreases based on a predetermined number of births, number of family planning acceptors, or number of acceptors of a particular method of contraception that the personnel affect or achieve.

(E) No person shall be denied any right or benefit, including the right of access to participate in any program of general welfare or health care, based on the person's decision not to accept family planning services offered by the project.

(F) The project shall provide family planning acceptors comprehensible information about the health benefits and risks of the method chosen, including those conditions that might render the use of the method inadvisable and those adverse side effects known to be consequent to the use of the method. This requirement may be satisfied by providing information in accordance with the medical practices and standards and health conditions in the country where the project is conducted through counseling, brochures, posters, or package inserts.

(G) The project shall ensure that experimental contraceptive drugs and devices and medical procedures are provided only in the context of a scientific study in which participants are advised of potential risks and benefits.

(H) With respect to projects for which USAID provides, or finances the contribution of, contraceptive commodities or technical services and for which there is no sub-agreement under paragraph (5), the organization implementing a project for which such assistance is provided shall agree that the project will comply with the requirements of this paragraph while using such commodities or receiving such services.

(I) (i) The Grantee shall notify USAID when it learns about an alleged violation in a project of the requirements of subparagraphs (C), (D), (E) or (F) of this paragraph; (ii) the Grantee shall investigate and take appropriate corrective action, if necessary, when it learns about an alleged violation in a project of subparagraph (F) of this paragraph and shall notify USAID about violations in a project affecting a number of people over a period of time that indicate there is a systemic problem in the project; and

(iii) the Grantee shall provide USAID such additional information about violations as USAID may request.

(3) Additional Requirements for Voluntary Sterilization Programs

(A) None of the funds provided under this Agreement shall be used to pay for the performance of involuntary sterilization as a method of family planning or to coerce or provide any financial incentive to any individual to practice sterilization.

(B) The Grantee shall ensure that any surgical sterilization procedures supported in whole or in part by this Agreement are performed only after the individual has voluntarily appeared at the treatment facility and has given informed consent to the sterilization procedure. Informed consent means the voluntary, knowing assent from the individual after being advised of the surgical procedures to be followed; the attendant discomforts and risks; the benefits to be expected; the availability of alternative methods of family planning; the purpose of the operation and its irreversibility; and the option to withdraw consent anytime prior to the operation. An individual's consent is considered voluntary if it is based upon the exercise of free choice and is not obtained by any special inducement or any element of force, fraud, deceit, duress, or other forms of coercion or misrepresentation.

(C) Further, the Grantee shall document the patient's informed consent by (i) a written consent document in a language the patient understands and speaks, which explains the basic elements of informed consent, as set out above, and which is signed by the individual and by the attending physician or by the authorized assistant of the attending physician; or (ii) when a patient is unable to read adequately, a written certification by the attending physician or by the authorized assistant of the attending physician that the basic elements of informed consent above were orally presented to the patient and that the patient thereafter consented to the performance of the operation. The receipt of this oral explanation shall be acknowledged by the patient's mark on the certification and by the signature or mark of a witness who shall speak the same language as the patient.

(D) The Grantee must retain copies of informed consent forms and certification documents for each voluntary sterilization procedure for a period of three years after performance of the sterilization procedure.

(4) Abortion restrictions

(A) None of the USAID funds provided under this Agreement shall be used to finance, support, or be attributed to the following

activities: (i) procurement or distribution of equipment intended to be used for the purpose of inducing abortions as a method of family planning; (ii) special fees or incentives to any person to coerce or motivate them to have abortions; (iii) payments to persons to perform abortions or to solicit women to undergo abortions; (iv) information, education, training, or communication programs that seek to promote abortion as a method of family planning; and (v) lobbying for or against abortion. The term "motivate," as it relates to family planning assistance, shall not be construed to prohibit the provision, consistent with local law, of information or counseling about all pregnancy options.

(B) None of the USAID funds provided under this Agreement shall be used to pay for any biomedical research, which relates, in whole or in part, to methods of, or the performance of, abortions or involuntary sterilizations as a means of family planning. Epidemiologic or descriptive research to assess the incidence, extent or consequences of abortions is not precluded.

(5) Requirement for Sub-agreements

The Grantee shall insert these requirements in all sub-agreements involving family planning or population activities which will be supported in whole or in part with USAID funds under the Agreement.

Section F.3. Prohibition on Assistance to Drug Traffickers.

(a) USAID reserves the right to terminate this Agreement or take other appropriate measures if the Grantee or a key individual of the Grantee is found to have been convicted of a narcotics offense or to have been engaged in drug trafficking as defined in 22 CFR Part 140.

(b) USAID reserves the right to terminate assistance to, or take or take other appropriate measures with respect to, any participant approved by USAID who is found to have been convicted of a narcotics offense or to have been engaged in drug trafficking as defined in 22 CFR Part 140.

(c) For any loan over \$1000 made under this Agreement, the Grantee shall insert a clause in the loan agreement stating that the loan is subject to immediate cancellation, acceleration, recall or refund by the Grantee if the borrower or a key individual of a borrower is found to have been convicted of a narcotics offense or to have been engaged in drug trafficking as defined in 22 CFR Part 140.

(d) Upon notice by USAID of a determination under section (c) and at USAID's option, the Grantee agrees to immediately cancel, accelerate or recall the loan, including refund in full of the outstanding balance. USAID reserves the right to have the loan refund returned to USAID.

(e) The Grantee agrees not to disburse, or sign documents committing the Grantee to disburse, funds to a sub-recipient designated by USAID ("Designated Sub-recipient") until advised by USAID that: (1) any United States Government review of the Designated Sub-recipient and its key individuals has been completed; (2) any related certifications have been obtained; and (3) the assistance to the Designated Sub-recipient has been approved.

(1) The Grantee shall insert the following clause, or its substance, in its agreement with the Designated Sub-recipient:

(2) The Grantee reserves the right to terminate this Agreement or take other appropriate measures if the [Sub-recipient] or a key individual of the [Sub-recipient] is found to have been convicted of a narcotic offense or to have been engaged in drug trafficking as defined in 22 CFR Part 140."

Section F.4. Workers' Rights.

(a) Except as specifically set forth in the Agreement or otherwise authorized by USAID in writing, no funds or other support provided hereunder may be used for any activity that involves workers' rights in a foreign country.

(b) In the event the Grantee is requested or wishes to provide assistance in the above area or requires clarification from USAID as to whether the activity would be consistent with the limitation set forth above, the Grantee must notify USAID and provide a detailed description of the proposed activity. The Grantee must not proceed with the activity until advised by USAID that it may do so.

(c) The Grantee must ensure that all employees and subcontractors and sub-recipients providing employment-related services hereunder are made aware of the restrictions set forth in this clause and must include this clause in all subcontracts and other sub-agreements entered into hereunder.

Section F.5 Terrorist Financing. The Grantee is reminded that U.S. Executive Orders and U.S. law prohibit transactions with, and the provision of resources and support to, individuals and organizations associated with terrorism and specially designated nationals and blocked persons identified by the U.S. Department of Treasury (Office of Foreign Assets Control). It is the legal responsibility of the Grantee under this Agreement to ensure compliance with these Executive Orders and laws. This provision must be included in all subcontracts or subawards issued under this Agreement.

Section F.6 Prohibition on Funding Foreign Government Delegations to International Conferences. Except as USAID may otherwise agree in writing, funds obligated under this Agreement which are provided by USAID from the Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs Appropriations Act for any U.S. Government fiscal year after fiscal year 1999 may not be used to finance the travel, per

diem, hotel expenses, meals, conference fees or other conference costs for any member of a foreign government's delegation to an international conference sponsored by a public international organization. This restriction may be further described by USAID in Implementation Letters.

Comprehensive Peace Accord
Signed between
Nepal Government
And the
Communist Party of Nepal (Maoist)
22 November 2006

Preamble

Respecting the people's mandate expressed in favor of democracy, peace and progressive movement by the Nepali people since prior to 2007 from time to time through historical struggles and people's movements;

Reaffirming the full commitment towards the twelve-point agreement reached between the seven political parties and the CPN (Maoist); the eight-point understanding; the twenty-five point code of conduct agreed between Nepal Government and the CPN (Maoist); the decision made in the meeting held between senior leaders of the seven political parties and the CPN (Maoist) held on Nov. 8, 2006, as well as all agreements, understandings, code of conducts reached between Nepal Government and CPN (Maoist); and correspondence of similar intent sent to the United Nations,

Expressing determination to carry out a progressive restructuring of the state to resolve existing class-based, ethnic, regional and gender problems,

Reiterating full commitment towards democratic norms and values including competitive multiparty democratic governance, civil liberties, fundamental rights, human rights, full press freedom and the concept of the rule of law,

Remaining committed to the Universal Declaration of Human Rights, 1948, and international humanitarian laws and fundamental principles and values related to human rights;

Guaranteeing the fundamental right of the Nepali people to take part in the constituent assembly elections in a free, fair and fear-less environment,

Keeping democracy, peace, prosperity, progressive socio-economic change and the independence, integrity, sovereignty, and self-respect of the country at the centre,

Expressing the determination to implement the commitment to carry out the constituent assembly elections in a free and fair manner by the end of the month of Jestha 2064 BS,

Declaring the beginning of a new chapter of peaceful collaboration by ending the armed conflict being practiced in the country from 2052 BS based on the political understanding among the two parties in order to accomplish, through the constituent assembly, certainty of sovereignty of Nepali people, progressive political outlet, democratic restructuring of the state, and social-economic-cultural transformation,

This comprehensive peace agreement has been reached between the Nepal Government and the CPN (Maoist) with a commitment to transform the ceasefire between the Nepal Government and the CPN (Maoist) into long-term peace.

1. Preliminary

1.1. The name of this agreement is Comprehensive Peace Accord. In short, the agreement shall be called Peace Accord.

1.2. The agreement shall come into effect today after a public declaration by the government and Maoist parties.

1.3. Both the parties shall issue necessary directives to all the agencies under them to immediately implement and abide by the agreement and implement /ensure implementation.

1.4. All the agreements, understandings, code of conducts and decisions reached between the seven political parties, the government and the Maoists that are attached in the addendum shall constitute an integral part of this accord.

1.5. All the understandings and agreement to be reached later as necessary to implement this agreement shall also be considered an integral part of this agreement.

2. Definitions:

Unless the subject and context mean otherwise, in this agreement:

(a) "Ceasefire" refers to the act of prohibiting all forms of attack, kidnapping, disappearance, obstruction, carried out between Nepal Government and CPN (Maoist) by aiming at each other, mobilization of armed forces, strengthening, aggressive and violent activities, and activities spreading destruction, incitement and instigation through whatever means.

(b) "Interim Constitution" refers to the "Interim Constitution of Nepal 2063" to be promulgated for the period until a new constitution is prepared and issued by the constituent assembly.

(c) "Interim Council of Ministers" refers to the "Interim Council of Ministers" to be formed according to the Interim Constitution.

(d) "Both the Parties" refers to the party of Government of Nepal and the party of the Communist Party of Nepal (Maoist).

(e) "Prevailing Law" refers to the Interim Constitution of Nepal, 2063 and the prevailing Nepal Laws that are not in conflict with it. But this definition will not obstruct legal provisions before the promulgation of Interim constitution 2063.

(f) "Verification" refers to the subject of preparing authentic record after verification of army, combatants and arms by the United Nations.

3. Political - Economic - Social Transformation and Conflict Management

Both the parties are in agreement to adopt the following policies and programs for political-economic-social transformation and to creatively manage conflict existing in the country:

3.1. To ensure progressive political, economic and social transformation on the basis of the decisions reached at the meeting of senior leaders of seven political parties and the CPN (Maoist) on Nov. 8, 2006 (Addendum-6)

3.2. To form an interim legislature-parliament on the basis of interim constitution, and hold elections to the constituent assembly in a free and fair manner by the month of Jestha, 2064 BS and practically ensure sovereignty inherent in the Nepali people.

3.3. None of the authorities related to the country's rule to remain with the King. To use the properties of late King Birendra, late queen Aishwarya and their family for national interest by bringing the properties under the Nepal Government and forming a trust. To nationalize all properties (like palaces situated in different places, forests and reserves, heritages with historical and archeological importance) obtained by King Gyanendra in his capacity as the King. To decide whether or not to retain the monarchy by a simple majority in the first meeting of the constituent assembly.

3.4. To adopt a political system that fully abides by the universally accepted principles of fundamental human rights, multiparty competitive democratic system, sovereignty of the people and supremacy of the people, constitutional balance and control, rule of law, social justice, equality, independent judiciary, periodic elections, monitoring by civil society, complete press freedom, people's right to information, transparency and accountability in the

activities of political parties, people's participation, impartial, competent, and clean bureaucracy.

3.5. To carry out an inclusive, democratic and progressive restructuring of the state by ending the current centralized and unitary form of the state in order to address the problems related to women, Dalit, indigenous people, Janajatis, Madheshi, oppressed, neglected and minority communities and backward regions by ending discrimination based on class, caste, language, gender, culture, religion, and region.

3.6. To gradually implement by deciding through mutual agreement a minimum common program for the economic and social transformation to end all forms of feudalism.

3.7. To adopt a policy of implementing a scientific land reforms program by ending feudal land ownership.

3.8. To follow a policy of protecting and promoting national industries and resources.

3.9. To adopt policy of establishing the rights of all citizens to education, health, housing, employment and food security

3.10. To adopt policy of providing land and other economic protection to socially and economically backward classes including land less squatters, bonded laborers and pastoral farmers.

3.11. To adopt a policy of severely punishing people amassing limitless wealth through corruption while remaining in a government position.

3.12. To form a common development concept for economic and social transformation and justice as well as to quickly make the country developed and economically prosperous.

3.13. To follow a policy of massive increase in employment and income generation opportunities by increasing investment in industries, trade and export promotion etc. while ensuring the professional rights of the laborers.

4. Management of Army and Armament

To carry out the following tasks in accordance with the 12-point understanding, eight-point agreement, 25-point code of conduct, the five point letter sent to the United Nations and the decisions of the meeting of senior leaders held on November 8 taken in the past in order to hold the constituent assembly elections in a peaceful, fair and fear-less environment and to carry out democratization and restructuring of the army:

Concerning the Maoist Army-

4.1. As per the commitment expressed in the letter sent on behalf of the Nepal Government and the CPN (Maoist) to the United Nations on August 9, 2006, the Maoists' Army combatants to remain within the following temporary cantonments in the following places. The UN to verify and monitor them.

The main cantonments shall remain in the following locations:

1. Kailali
2. Surkhet
3. Rolpa
4. Nawalparasi
5. Chitwan
6. Sindhuli
7. Ilam

Sub-cantonments will remain at the rate of 3 each around the main cantonments.

4.2. After placing the Maoist combatants within the Cantonments, all the arms and ammunition except those required for the security of the cantonments to be securely stored in the cantonment and the keys to remain with the party concerned after putting a single lock. In the process of installing the lock, to assemble a mechanism including its record, siren for the monitoring by the UN. While carrying out the necessary examination of the stored arms, the UN to do so under the presence of the concerned party. To prepare other technical details related to this along with camera monitoring through agreement of the UN, CPN (Maoist) and the Nepal Government.

4.3. After the Maoist combatants stay in the temporary cantonments, Nepal Government to provide for food supplies and other necessary arrangements.

4.4. The Interim Council of Ministers to work by forming a special committee to supervise, integrate and rehabilitate the Maoist combatants.

4.5. To make security provisions for the Maoist leaders through understanding with the government.

Concerning the Nepali Army-

4.6. The Nepali Army to be confined within the barracks as per the commitment expressed in the letter sent to the UN. To ensure that their arms are not used for or against any party. The Nepali Army to store the arms in equal numbers to that of the Maoists, to seal it with a single-lock and give the key to the concerned party. In the process of installing the lock, to assemble a mechanism including its record, siren for the monitoring by the UN. While carrying out the necessary examination of the stored arms, the UN to do so under the presence of the concerned party. To prepare other technical details related to this along with camera monitoring through agreement of the UN, CPN (Maoist) and the Nepal Government.

4.7. The Council of Ministers to control, mobilize and manage the Nepali Army as per the new Military Act. The Interim Council of Ministers to prepare and implement the detailed action plan of the Nepali Army's democratization by taking suggestions from the concerned committee of the Interim Parliament. Under this to carry out activities like the appropriate number of the Nepali Army, to train the army through democratic and human rights values while developing democratic structure, national and inclusive character.

4.8. To give continuity to functions of the Nepali Army like border security, security of the conservation areas, protected areas, banks, airports, power houses, telephone towers, central secretariat and security of VIPs.

5. Ceasefire

5.1. Termination of military action and armed mobilization:

5.1.1. Both sides express commitment to not to carry out the following activities:

a. Use of any type of arms and weapons targeted against each other in direct or indirect way or an act of attack,

b. An act, with or without weapons, of searching or confiscating weapons belonging to other at the place where the arms have been stored as per the understanding reached between the two sides.

c. To harm any person, or exert mental pressure.

d. Set up ambush targeting each other.

e. Murder and violent operations.

f. Activity of kidnapping/detention/imprisonment/disappearance

g. Damaging public/private/government or military property

h. Aerial attack or bombardment.

i. Mining and sabotage.

j. To spy on military activity of the other side.

5.1.2. Both sides shall not recruit additional armed forces or conduct military activities against each other, including transporting weapons, ammunitions and explosives.

However, the security forces deployed by the interim government shall have authority to conduct routine patrol, explore in order to prevent illegal trafficking of the weapons, explosives or raw materials used in assembling weapons at the international border or custom points and seize them.

5.1.3. No individual or group shall travel with illegal weapons, ammunitions or explosives.

5.1.4. Both sides shall assist each other to mark landmines and booby-traps used during the time of armed conflict by providing necessary information within 30 days and defuse and excavate it within 60 days.

5.1.5. Armies of both sides shall not bear arms or show their presence wearing combat fatigue during any public program, political meeting or civil assembly.

5.1.6. Nepal Police and Armed Police Force shall continue the task of maintaining legal system and law and order and criminal investigation as per the spirit and sentiment of the Jana Andolan and peace accord as well as the prevailing law.

5.1.7. Both sides shall issue circulars to their respective armed agencies or personnel to stop an armed person of one side to address an armed person of the opposite side by the term 'enemy' or behave in similar manner.

5.1.8. Both sides express an understanding to create a record of government, public and private buildings, land and other properties and return them immediately.

5.2 Situation Normalization Measures:

5.2.1. It is not allowed to collect cash or kind and levy tax against one's wishes and against the existing law.

5.2.2. Both sides agree to make public the status of the people in their custody and release them within 15 days.

5.2.3. Both sides agree to make public within 60 days of signing of the agreement information about the real name, caste and address of the people 'disappeared' or killed during war and to inform the family about it.

5.2.4. Both sides agree to form a National Peace and Rehabilitation Commission to establish peace in the society by normalizing adverse situation generated by armed conflict and to carry out relief for and rehabilitate people victimized and displaced by war, and to carry forward the tasks related to this through the Commission.

5.2.5. Both sides agree to set up a High-level Truth and Reconciliation Commission through mutual agreement in order to investigate truth about people seriously violating human rights

and involved in crimes against humanity, and to create an environment of reconciliations in the society.

5.2.6. Both sides pledge to abandon all types of war, attack, counter-attack, violence and counter-violence in the country with a commitment to ensure democracy, peace and progressive change in the Nepali society. There is an agreement between both sides in the matter of assisting one another in peace building and maintaining law and order.

5.2.7. Both sides guarantee to withdraw accusations, claims, complaints and cases under-consideration leveled against various individuals due to political reasons and immediately make public the state of those imprisoned and immediately release them.

5.2.8. Both sides express the commitment to allow without any political prejudice the people displaced due to the armed conflict to return back voluntarily to their respective ancestral or former residence, reconstruct the infrastructure destroyed as a result of the conflict and rehabilitate and reintegrate the displaced people into the society.

5.2.9. Both sides agree to solve problems created in the above context on the basis of mutual agreement and to take responsibility at the individual and collective manner in the task of creating appropriate environment for normalizing relations and reconciliation and ensure implementation with the help of all political parties, civil society and local organizations.

5.2.10. Both sides express commitment not to discriminate against or exert any kind of pressure on other members of the family if a member of the family is associated with one or the other side.

5.2.11. Both sides agree to let employees of Nepal Government and public agencies to travel freely to any part of the country, to fulfill their duties and not to create any obstacle or obstruction while executing their work or not to let obstructions to arise and to facilitate their work.

5.2.12. Both parties agree to allow the United Nations, International Donors Agencies and Diplomatic Missions based in Nepal, National and International Non-Government Organizations, Press, Human Rights Activists, Election Observers and foreign tourists to travel unrestricted according to law in the state of Nepal.

5.2.13. Both parties are committed to operation of publicity programs in a decent and respectable manner.

6. End of War

6.1. Giving permanent form to the ongoing ceasefire between the government and the Maoists on the basis of the historic agreement reached between the seven political parties and

the CPN (Maoist) on November 8, 2006, we declare that the armed war going on since 1995 has ended.

6.2. The decisions taken by the meeting of senior leaders of the seven political parties and the CPN (Maoist) on November 8, 2006 will be the main policy basis for long term peace.

6.3. After the placement of the Nepali Army in the barracks and the Maoist Army combatants in temporary camps, carrying arms in violation of the law, display, intimidation and any type of use of violence and use of arms will become legally punishable.

6.4. Army of both the parties will not be allowed to publicize for or against any party and to take sides. But they shall not be deprived from their voting rights.

7. Human Rights, Fundamental Rights and Adherence to Humanitarian Law

By remaining committed to the Universal Declaration of Human Rights, 1948, International Humanitarian Law and fundamental principles and values, both sides express their agreement to the following issues:

7.1. Human Rights :

7.1.1. Both sides reconfirm their commitment to the respect and protection to human rights and commitment to international humanitarian law and accept that nobody should be discriminated on the basis of color, gender, language, religion, age, race, national or social origin, wealth, disability, birth or other standing, ideology or faith.

7.1.2. Both sides agree to create an atmosphere for the Nepali people to enjoy their civil, political, economic, social and cultural rights and are committed to creating an atmosphere where such rights are not violated in the future under any condition.

7.1.3. Both sides express the commitment that impartial investigation and action would be carried according to law against people responsible creating obstructions to the exercise of the rights envisaged in the letter of agreement and ensure that impunity will not be tolerated. Apart from this, they also ensure the right of the victims of conflict and torture and the family of disappeared to obtain relief.

7.1.4. Both sides will not carry out acts of torture, kidnapping and forced labor and will take necessary action to discourage such acts.

7.1.5. On the basis of norms and values of secularism, both sides shall respect social, cultural, religious sensitivity, religious sites and the religious faith individuals.

7.2. Right to Live:

7.2.1. Both sides respect and protect an individual's fundamental right to life. Nobody shall be deprived of this fundamental right and no law shall be formulated to award death penalty.

7.3. Right to Individual Dignity, Freedom and Mobility

7.3.1. Both parties respect and protect the right to individual dignity. In this connection, no person including those deprived of their freedom according to the law would be subjected to torture or any other cruel, inhuman or degrading behavior or punishment. The citizen's right to confidentiality shall be respected.

7.3.2. Both sides, fully respecting the individual's right to freedom and security, will not keep anyone under arbitrary or illegal detention, commit kidnapping or hold captive. Both sides agree to make public the status of every individual 'disappeared' and held captive and inform about this to their family members, legal advisors and other authorized people.

7.3.3. Both sides shall respect and protect the citizens' right to free mobility and the freedom to choose within legal norms the location of one's residence and express the commitment to respect the right of the people displaced by the conflict and their families to return back to their homes or to settle in any other location of their choice.

7.4. Civil and Political Rights

7.4.1. Both parties are committed to respecting and protecting every individual's right to ideology, expression, open organization and gather peacefully as well as right against exploitation.

7.4.2. Both sides respect the right of every citizen to take part directly or through one's selected representative in issues of public concern, to vote, to be elected and to enjoy the right to equality of entering public service.

7.4.3. Both sides are committed to respect the individual's right to be informed.

7.5. Economic-Social Rights

7.5.1. Both parties are committed to respect and protect the individual's right to livelihood through freely chosen or accepted employment.

7.5.2. Both parties are committed to respecting and guaranteeing the rights of food security to all the people. They guarantee that there would be no interference in the transportation, use and distribution of food, food products and food grains.

7.5.3. Both parties acknowledge that the citizens' right to health should be respected and protected. Both parties will not obstruct the supply of medicine, assistance and health related campaigns, and express commitment to treatment and rehabilitation of the people injured in course of the conflict.

7.5.4. Acknowledging that the right to education should be ensured and respected, both parties are committed to maintaining appropriate academic environment in educational institutions. Both sides agree to guarantee that the right to education will not be impeded. They agree to put to an end, on an immediate basis, to activities like taking the educational institutions under control and using them, abducting teachers and students, taking them under control and disappearing them, and to not to establish barracks in a way that it would impede them.

7.5.5. Both sides agree that the private property of any individual will not be seized or usurped, except when permitted by law.

7.5.6. Both sides believe in giving continuity to production by not disturbing the industrial climate in the country, respecting the right of collective bargaining and social security in industrial institutions, encouraging industrial institutions and laborers to solve the problem in peaceful manner if any problem arises between them and respect the right to work determined by the International Labor Organization.

7.6. Women and Child Rights

7.6.1. Both parties fully agree to provide special protection to the rights of women and children, to immediately stop all types of violence against women and children, including child labor, as well as sexual exploitation and abuse, and not to include or use children who are 18 years old and below in the armed force. Children thus affected would be immediately rescued and necessary and appropriate assistance will be provided for their rehabilitation.

7.7. Right to Personal Liberty

7.7.1. Both parties agree to the freedom of opinion and expression; freedom to assemble peaceably and without arms; freedom of movement; freedom to practice any profession, or to carry on any occupation, industry or trade; press and publication rights; the freedom to take part in peaceful political activities; the right of equality before the law; and to implement and have a tolerant system of justice.

8. Dispute Settlement and Implementation Mechanism

8.1. Both sides express the understanding to be individually and collectively accountable, by not repeating mistakes committed in the past and to gradually correct them.

8.2. The National Peace and Rehabilitation Commission can create mechanisms as necessary to make the peace campaign successful. The formation and terms of reference of the Commission will be as determined by the interim Council of Ministers.

8.3. Both parties are committed to resolving all types of current or possible future mutual differences or problems through mutual dialogue, understanding, agreement and negotiation.

8.4. Both parties express commitment to the fact that the interim Council of Ministers can constitute and determine the working procedures of the National Peace and Rehabilitation Commission, the Truth and Reconciliation Commission, the High-level State Restructuring Recommendation Commission and other mechanisms as necessary to implement this agreement, the Interim Constitution and all the decisions, agreements and understandings reached between the seven parties, the Nepal Government and the CPN (Maoist).

9. Implementation and Follow-up

Both parties have agreed to make the following arrangements for the implementation of the understandings mentioned in this agreement and for their follow-up -

9.1. Both parties agree to give continuity to the task of monitoring provisions related to human rights mentioned in this agreement by the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, Nepal.

9.2. Both parties agree to the monitoring of the management of arms and the armies by the United Nations Mission in Nepal as mentioned in the five-point letter send to the UN earlier and in the present agreement.

9.3. Both sides agree to carry out supervision of the constituent assembly elections through the United Nations.

9.4. The National Human Rights Commission will also carry out works related to the monitoring of human rights as mentioned in this agreement in addition to its duties as determined by law. In the course of implementing its duties, the Commission can receive the help of national and international human rights organizations after carrying out necessary coordination with them.

9.5. Both parties agree to receive the reports submitted by the above-mentioned bodies, to provide information requested by them, and to implement the suggestions and recommendations provided by them on the basis of agreement and discussions.

10. Miscellaneous

10.1. Both parties agree not to operate parallel or other forms of mechanism in any areas of the state or state machinery as per the spirit of the decisions of November 8 and the essence of the peace agreement.

10.2. Both parties consent to sign any complementary understandings, as necessary, for the implementation of the present accord.

10.3. This accord can be revised at any time with the consent of both parties. Both parties agree to provide to each other prior written information if they wish to make any change. The amendments can be made to the accord with the consent of both sides after receiving the information. The provisions to be made by such an amendment will not fall below the minimum standards of accepted international human rights and humanitarian laws.

10.4. If any dispute arises in the interpretation of this agreement, a joint mechanism consisting of both parties shall make the interpretation on the basis of the preamble and the documents included in the addendum of this agreement, and this interpretation will be final.

10.5. The concept of 'two parties as mentioned in this agreement would automatically cease to exist after the constitution of the Interim Legislature-Parliament. Thereafter, all the responsibility of implementing the obligations stated in this agreement will be as per the arrangements made by the interim Council of Ministers. It will be the duty and responsibility of all the political parties to extend cooperation in the compliance and implementation of the agreement.

10.6. At a time when the entire country is centered on the main campaign of constituent assembly elections, we heartily appeal to all to end their problems and demands through dialogue and negotiations and to help constituent assembly elections and law and order situation.

10.7. We heartily appeal to the civil society, professional groups, class organizations, media, intellectual community and all Nepali people to actively participate in this historic campaign to build a new Nepal and to establish lasting peace through the constituent assembly elections by ending the armed conflict.

10.8. We heartily urge all the friendly countries and the United Nations, as well as the International Community to extend support to Nepal in this campaign of establishing full democracy and lasting peace.

Cognizing the responsibility to the future of the country and people, and being fully committed to this comprehensive peace accord, we sign the peace accord on behalf of the Nepal Government, and the Communist Party of Nepal (Maoist), and hereby make this Comprehensive Peace Accord public.

Prachanda
President
*Communist Party
of Nepal (Maoist)*

Girija Prasad Koirala
Prime Minister
*Government of
Nepal*

Signed on November 21, 2006